



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjamin tercapainya kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dengan tetap menjamin keberlanjutannya. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah ini perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global. Komitmen Pemerintah Kalimantan Timur untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dengan kerangka dasar: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) Ekosistem penyedia jasa yang berfungsi dan produktif, (3) Pertumbuhan yang inklusif dan merata, (4) Ketahanan sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta (5) Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Indonesia, merupakan bentuk komitmen untuk melakukan transformasi menuju ekonomi hijau melalui perencanaan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang menyejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB). Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat dipahami sebagai sebuah upaya terencana, baik

itu periode 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahun, maupun 1 (satu) tahun, untuk memberdayakan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, politik, infrastruktur dan aspek lainnya) yang berkelanjutan.

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun untuk merinci RPJPD dan RPKMD pada tahun yang bersangkutan. Pasal 263 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan, dalam hal ini RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Selain itu, RKPD digunakan pula sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melihat urgensi RKPD, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tengah memasuki tahun pertama pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 2018-2023 secara terstruktur merumuskan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ini. Sebagai tahun pertama atau tahun transisi pelaksanaan pembangunan jangka menengah, penentu keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang akan dirumuskan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sangat strategis karena selain menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019, Renja SKPD, landasan penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2019, dan pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, juga menjadi dokumen perencanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahap III Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Tahap IV Tahun 2018-2023. Selain itu, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2019 merupakan tahapan transisi periodisasi RPJMD IV Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2019-2023) dengan tema pembangunan “Mewujudkan masyarakat yang

adil dan sejahtera di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan”. Pada tahap transisi ini, di mana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018 sedangkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 belum ditetapkan maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2014-2019.

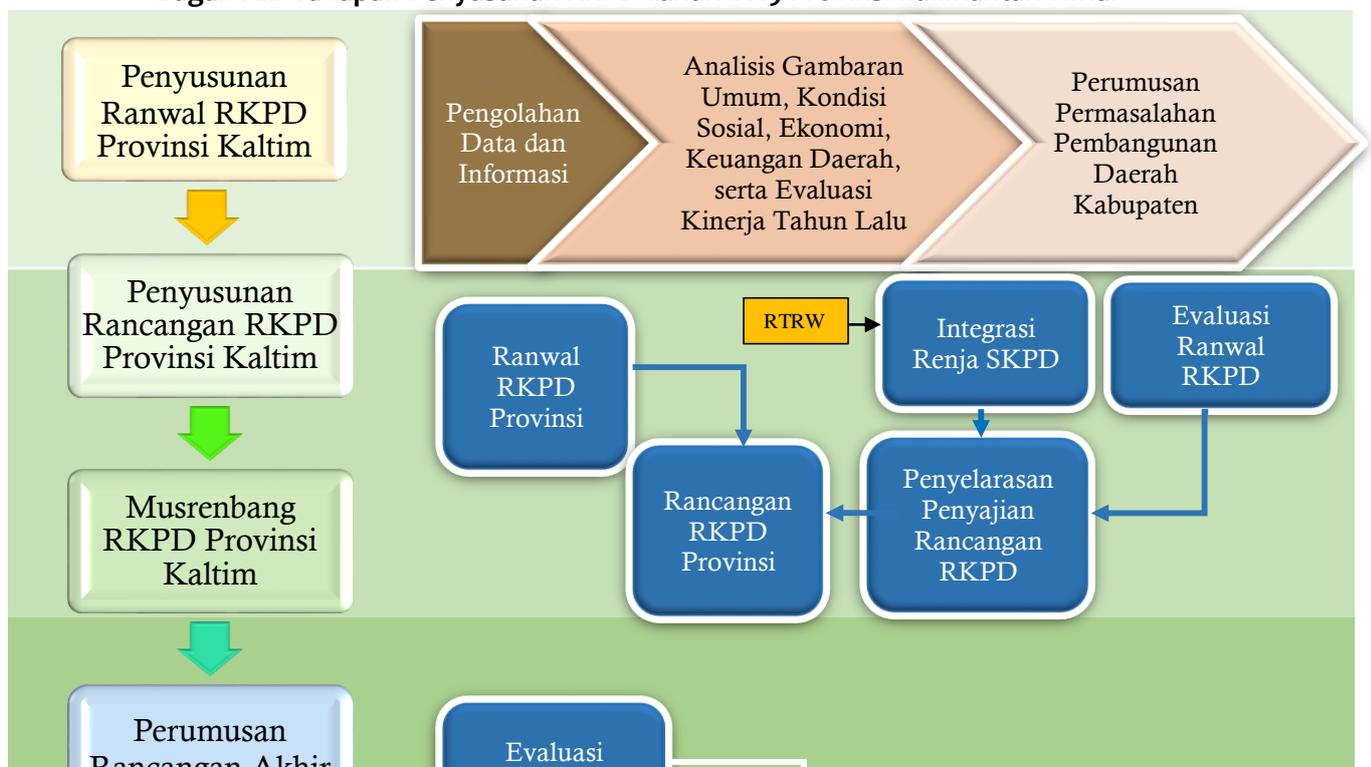
RKPD 2019 harus mampu menjaga kesinambungan antara RPJMD 2013-2018 dan periodisasi RPJMD tahap IV sebagai bagian dari RPJPD 2005-2025. Selain itu RPJMD 2018-2025 belum ditetapkan karena berkaitan dengan periode kepemimpinan Kalimantan Timur yang baru untuk periode yang sama.

Selain itu, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 perlu memerhatikan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 serta rencana tahunan nasional. Adapun penyusunan RKPD 2019 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tersebut secara runut tergambar pada bagan alir sebagai berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur



Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 perlu memerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi serta rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); serta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

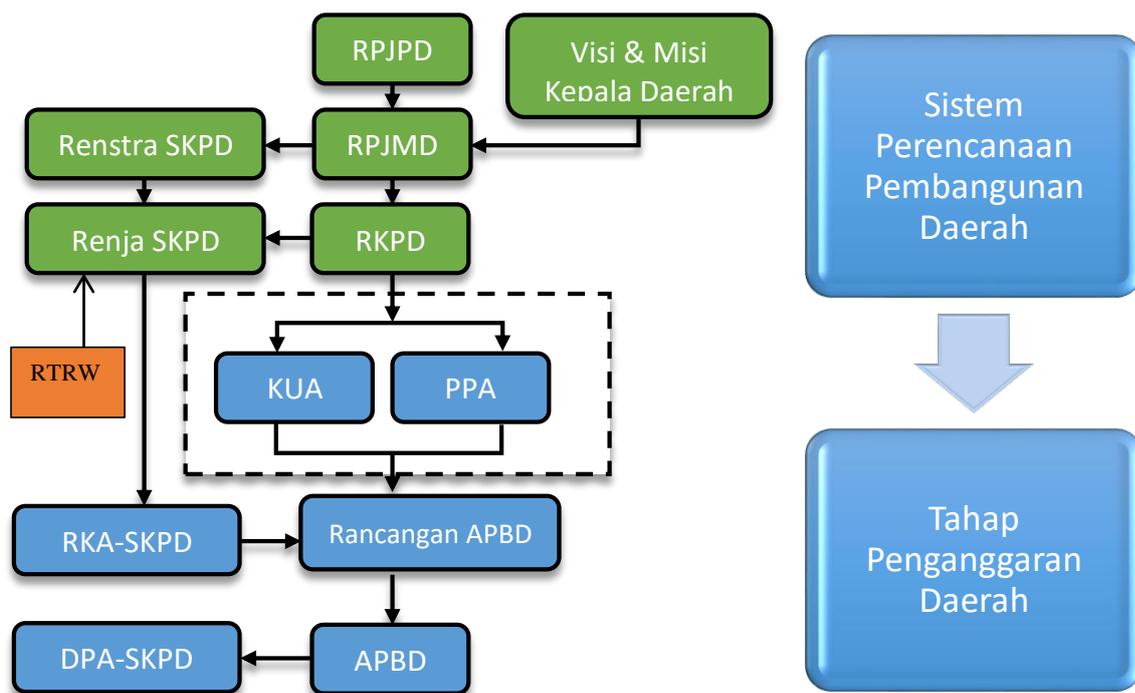
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518).

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional;

2. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; serta
3. Merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya dan dokumen lainnya seperti RTRW.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2019 termasuk menyambungkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun pertama (Tahun 2019).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi serta keanekaragaman sumber daya alam, baik terbaharukan maupun tak terbaharukan, yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kekayaan sumber daya alam yang terkenal adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbaharukan). Sedangkan SDA terbaharukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, dan pariwisata. Dari sisi letak geografis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

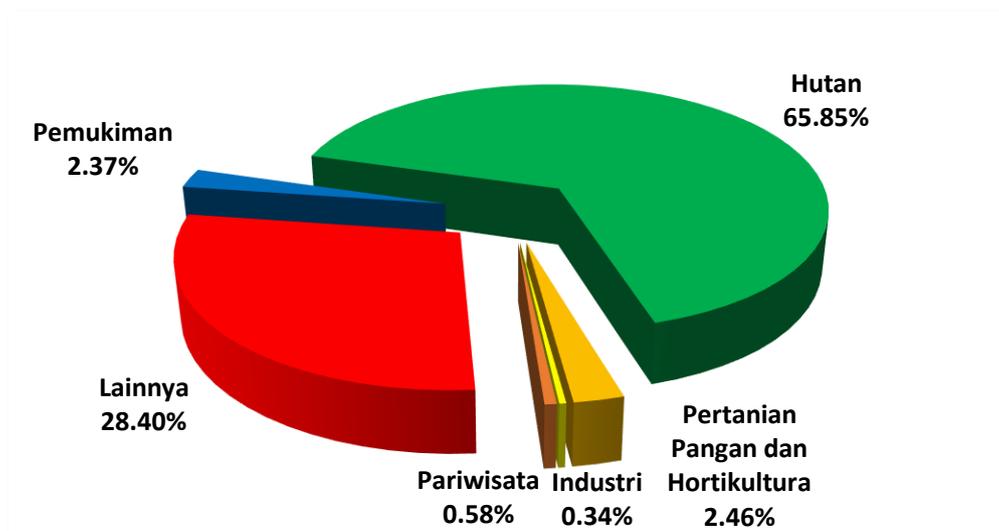
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur berstatus kawasan hutan dengan luasan mencapai 8.339.153 Ha (65,48%), sedangkan sisanya terbagi untuk kawasan industri seluas 57.176 Ha (0,45%), kawasan pariwisata darat seluas 97.442 Ha (0,77%), kawasan perikanan seluas 187.304 Ha (1,47%), kawasan perkebunan seluas 3.269.561 Ha (25,67%) kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), serta kawasan pertanian pangan, dan hortikultura sebesar 412.096 Ha (3,24%).

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. (Ditambahkan kaitannya dengan sektor pertanian dan bencana banjir). Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

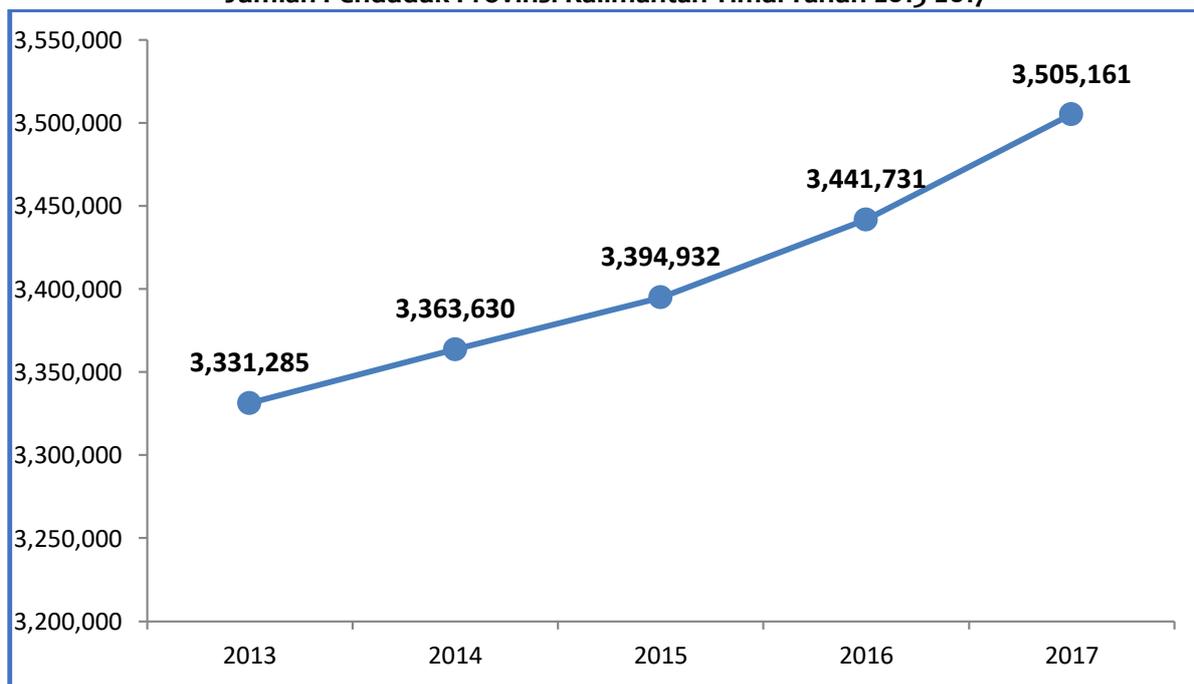
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	23,00	22,30	22,00
	- Maksimum	36,60	35,50	36,20
2	Kelembaban (%)	79,00	82,00	79,00
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,50	1.012,10	1.011,10
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	4,00	4,00
5	Curah Hujan (mm)	2.480,80	2.263,80	3.027,50
6	Penyinaran Matahari (%)	48,00	55,00	49,00

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 3.331.285 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.505.161 jiwa pada tahun 2017.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

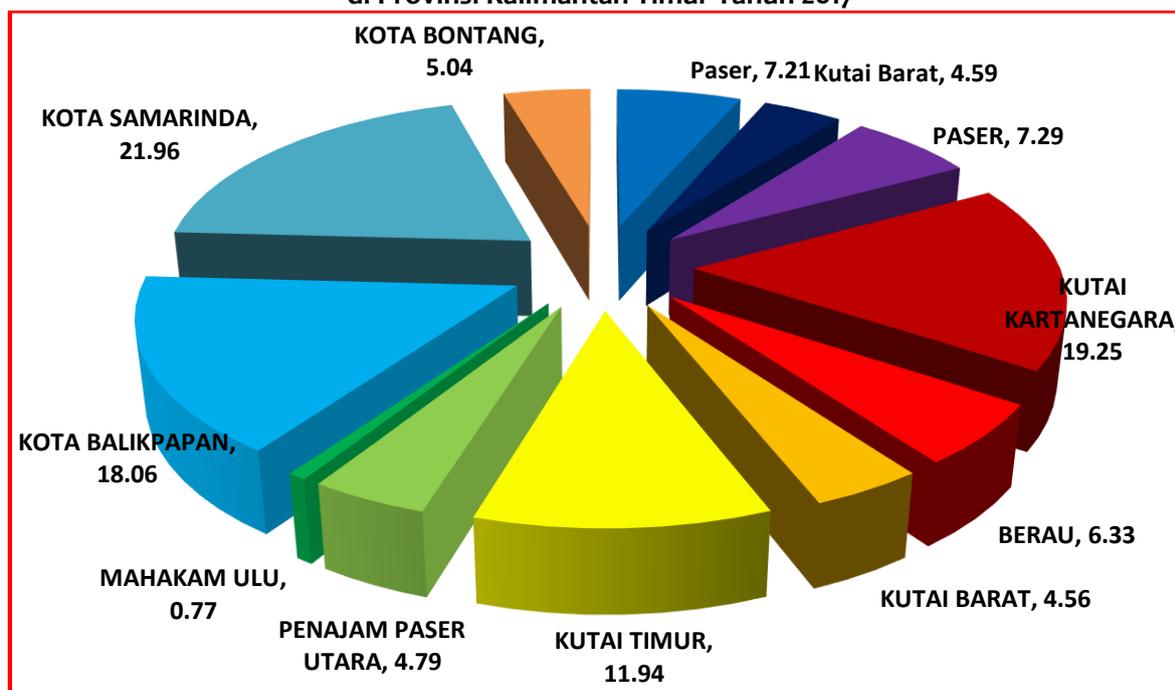


Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,96 persen, disusul Kota Balikpapan 18,06 persen, dan disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 19,25 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan

penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang paling jarang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,77%), disusul Kabupaten Kutai Barat (4,56 %) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (4,79%).

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mencapai 27,26 jiwa per Km², dengan Kota Samarinda sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.495,39 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

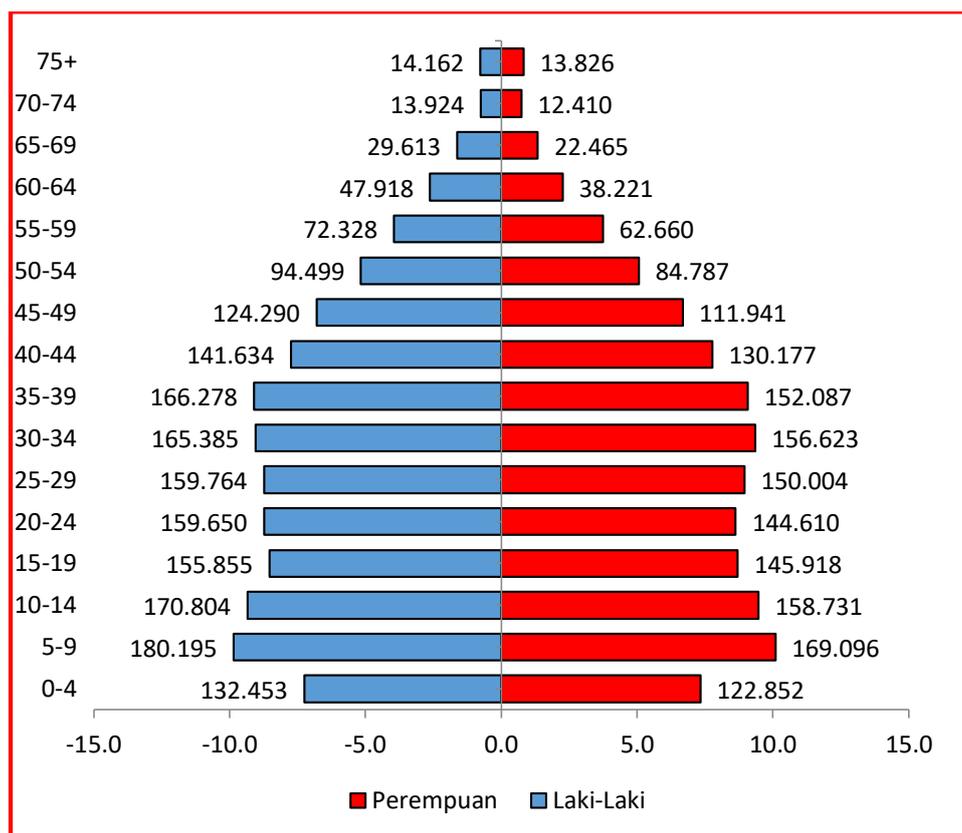
Tabel 2.3
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2014-2017) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	133.192	122.456	255.648	108,77	23,04	1,59
2	Kutai Barat	84.066	75.934	160.000	110,71	11,67	0,61
3	Kutai Kartanegara	353.323	321.436	674.759	109,92	25,96	0,85
4	Kutai Timur	227.826	190.799	418.625	119,41	13,48	0,36
5	Berau	118.392	103.444	221.836	114,45	10,21	1,68
6	Penajam Paser Utara	87.562	80.450	168.012	108,84	57,46	1,58
7	Balikpapan	323.614	309.582	633.196	104,53	1.236,11	1,44
8	Samarinda	394.435	375.197	769.632	105,13	1.074,11	1,41
9	Bontang	92.066	84.449	176.515	109,02	1.081,98	2,26
10	Mahakam Ulu	14.276	12.662	26.938	112,75	1,39	2,6
Kalimantan Timur		1.828.752	1.676.409	3.505.161	109,09	27,52	1,04

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Data sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk data diolah.

Dilihat dari struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun), sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65+). Namun pada tahun 2017 jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan dari sebesar 2,44 juta jiwa ditahun 2016, menjadi sebesar 2,5 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif meningkat dari sebesar 1,00 juta jiwa menjadi sebesar 1,04 juta jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, usia produktif di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sebesar 1,29 juta jiwa bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan usia produktif hanya sebesar 1,17 juta jiwa.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

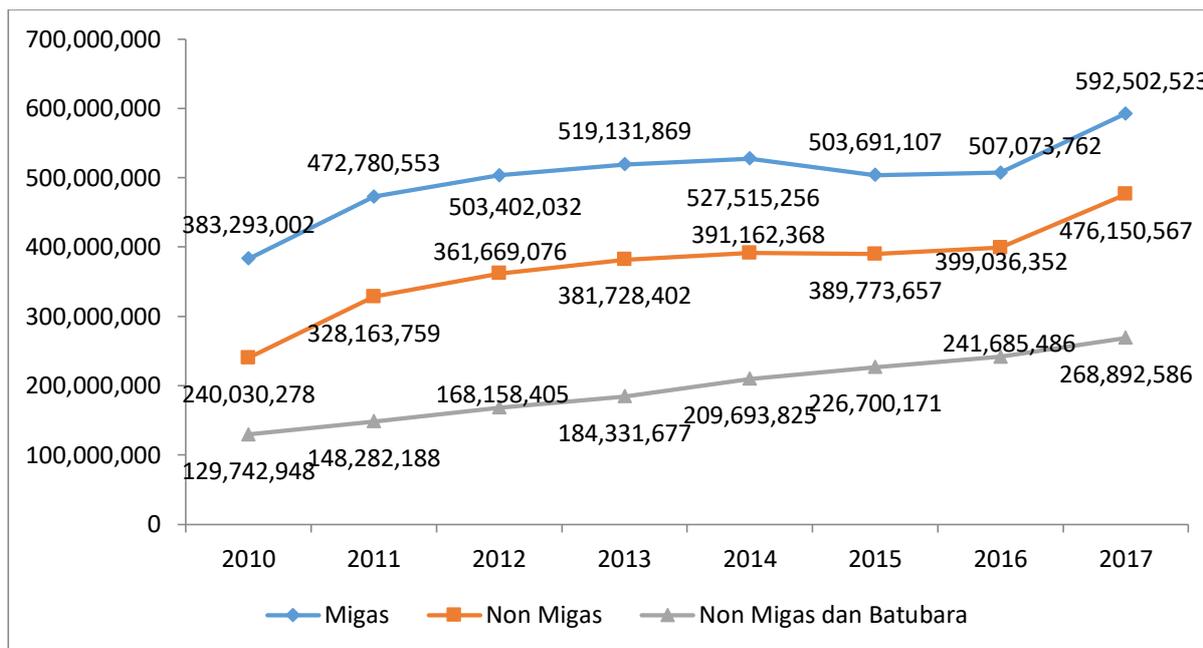
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan besaran output atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan akibat berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

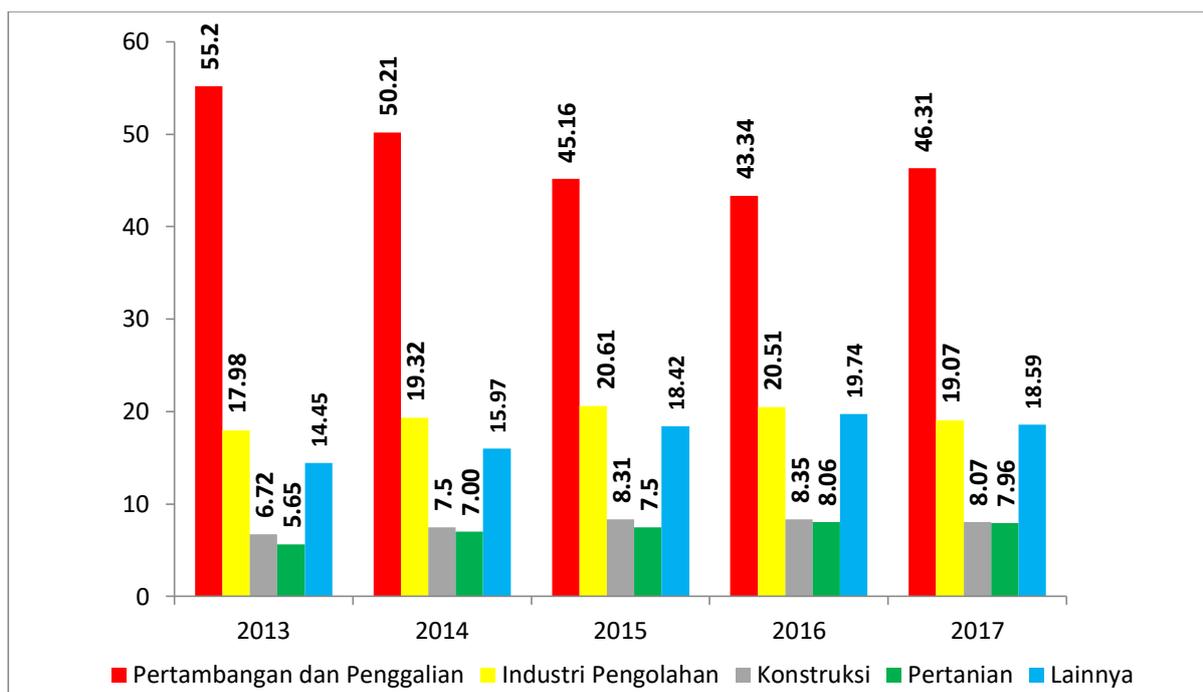


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503,69 trilyun. Jika dilihat PDRB Kalimantan Timur non migas maupun PDRB non migas dan batubara pada periode yang sama (2010-2016) mengalami peningkatan. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan gambaran bahwa struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara. Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015.

Seiring membaiknya harga minerba di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 507,07 trilyun dan Rp 592,50 trilyun diikuti PDRB Kalimantan Timur non migas dan PDRB Kalimantan Timur non migas dan batubara dimana tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Berdasarkan grafik di atas, struktur PDRB Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang terlihat dari kontribusinya yang berada di atas 43 persen selama tahun 2013-2017. Di luar Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Lapangan Usaha yang memberi kontribusi cukup besar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertanian.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur. Mengingat migas dan batubara merupakan sumber daya yang akan habis jika dieksploitasi terus menerus, maka perlu adanya sektor lain yang dapat menggantikan perannya.

Dilihat dari kontribusinya, Lapangan Usaha Konstruksi dan Pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat peranannya terhadap PDRB Kalimantan Timur.

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian yang cenderung meningkat menjadi harapan dalam mendukung transformasi ekonomi Kaltim. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat turun di tahun 2015 namun dapat kembali meningkat ditahun selanjutnya. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa

sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

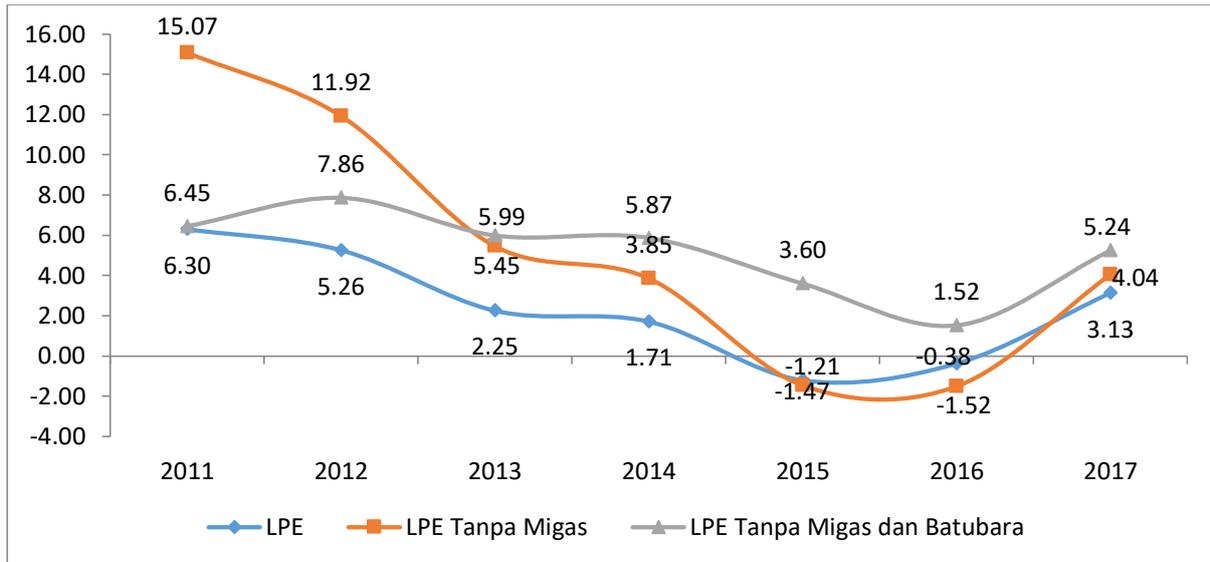
Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 5,30 persen.

Pembentukan perekonomian daerah masih didominasi oleh kelompok pertambangan dan penggalian yang mencapai 46,31 persen. Artinya, perekonomian Kaltim sangat bergantung pada sumber daya alam tak terbarui. Jika tidak dibarengi dengan pengelolaan perekonomian secara berkelanjutan, hal ini akan menimbulkan gejolak perekonomian di kemudian hari karena tingkat ketergantungan lapangan usaha lainnya juga cukup tinggi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Hal ini mengharuskan kondisi lapangan usaha pertambangan dan batubara harus stabil untuk dapat menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2015 terus mengalami perlambatan di setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpukul pada level negatif 1,21 persen, akibat menurunnya harga migas dan batubara dunia. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,47 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,60 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen. Hal ini tidak lepas dari tingginya share Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada struktur PDRB Kalimantan Timur terutama pada sektor migas dan batubara.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Meskipun harga migas dan batubara pada tahun 2016 mulai membaik, kinerja perekonomian Kalimantan Timur masih belum pulih, meski demikian kontraksi mengecil menjadi sebesar negatif 0,38 persen pada tahun 2016, Namun pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara melambat hanya sebesar 1,52 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas semakin turun menjadi sebesar negatif 1,52 persen. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat tajam menjadi sebesar 3,13 persen bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas sebesar 4,04 persen dan pertumbuhan ekonomi non migas dan no batubara sebesar 5,24 persen.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,78	4,55	0,46	5,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,40)	(4,89)	(3,52)	1,21
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,45	2,66	5,46	3,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	21,24	30,43	8,32	6,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56	6,57	9,05
F	Konstruksi	4,91	6,33	(0,94)	(3,41)	9,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	5,13	1,42	2,75	6,53
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,26	2,76	3,05	7,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,65	5,33	3,67	9,17
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,45	7,66	7,45	8,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05	1,83	(0,61)
L	Real Estate	8,23	8,29	3,59	(0,83)	3,35
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)	(4,25)	3,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,74	9,29	4,20	(3,05)	(0,23)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	18,74	12,23	9,88	7,33	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	9,03	10,53	9,31	7,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81	9,65	7,98
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,71	(1,21)	(0,38)	3,13

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada Lapangan Usaha utama, pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian selama tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan negatif, bahkan pada tahun 2015 pertumbuhannya turun hingga negatif 4,89 persen akibat anjloknya harga komoditas migas dan batubara yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kaltim. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perbaikan menjadi sebesar 1,21 persen seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas minerba di pasar internasional.

Sementara itu, Lapangan Usaha yang cenderung menurun pertumbuhannya pada tahun 2014-2017 ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Lapangan Usaha Perdagangan, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran 2013-2017

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73.396.422	80.180.287	86.563.224	90.750.793	97.284.575,47
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.766.360	2.090.681	2.460.192	2.439.025	2.629.573,96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.281.615	23.523.174	25.079.715	24.143.516	20.862.788,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.083.647	139.830.348	145.766.484	144.794.384	155.808.229,59
5	Perubahan Inventori	9.842.942	12.344.421	5.771.866	1.922.887	1.757.926,22
6	Ekspor Luar Negeri	371.841.805	350.299.172	256.979.357	197.483.435	240.954.920,95
7	Impor Luar Negeri	110.413.720	119.093.437	88.717.186	65.089.941	69.188.554,16
8	Net Ekspor Antar Daerah	23.332.798	38.340.611	69.787.455	110.629.664	142.393.061,94
PDRB		519.131.869	527.515.256,10	503.691.106,60	507.073.762,02	592.502.522,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2013-2014 terus meningkat. Namun pada tahun 2015 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur turun menjadi Rp 503,69 trilyun. Dimana pada tahun tersebut harga migas dan batubara yang menjadi komoditas utama ekspor Kalimantan Timur anjlok sehingga berdampak pada turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada Komponen Ekspor Luar Negeri, dari sebesar Rp 350,30 milyar pada tahun 2014 menjadi hanya sebesar Rp 256,98 milyar pada tahun 2015. Demikian pula nilai PDRB pada Komponen Impor Luar Negeri turun dari sebesar Rp 119,09 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 88,72 milyar pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2015 nilai PDRB pada beberapa komponen pengeluaran mengalami peningkatan seperti pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah.

Pada tahun 2017, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan harga migas dan batubara menjadi sebesar Rp 592,50 trilyun, dimana sebagian besar komponen pengeluaran mengalami peningkatan antara lain Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Komponen Ekspor Luar Negeri, Komponen Impor, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Perubahan Inventori mengalami penurunan.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14,14	15,20	17,19	17,90	16,42
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,34	0,40	0,49	0,48	0,44
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,91	4,46	4,98	4,76	3,52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,87	26,51	28,94	28,55	26,30
5	Perubahan Inventori	1,90	2,34	1,15	0,38	0,30
6	Ekspor Luar Negeri	71,63	66,41	51,02	38,95	40,67
7	Impor Luar Negeri	21,27	22,58	17,61	12,84	11,68
8	Net Ekspor Antar Daerah	4,49	7,27	13,86	21,82	24,03
	Net Ekspor LN	50,36	43,83	33,41	26,11	28,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2017 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor Luar Negeri (Ekspor luar negeri dikurang impor luar negeri), disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Jika dilihat pada tabel tersebut, kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri pada tahun 2012-2016 terus menurun. Sementara kontribusi Komponen Net Ekspor Antar Daerah terus meningkat dalam kurun waktu yang sama.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebesar 92,73 persen adalah ekspor bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam). Maka, ketika harga komoditas global sedang berada dalam tren negatif PDRB Kalimantan Timur juga terkena dampaknya terutama pada tahun 2015. Selain itu, pada saat yang sama kuantitas produksi migas dan minerba juga tak bisa digenjot sesuka hati, tergantung permintaan pasar. Ketika permintaan pasar sedikit, penerimaan Kalimantan Timur jadi tidak maksimal.

Sementara itu, kontribusi Komponen Pengeluaran Rumah Tangga cenderung meningkat, namun sedikit menurun di tahun 2017. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan non makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Selain distribusinya, nilai PDRB pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga meningkat tanpa dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi Kalimantan Timur. Sehingga perilaku konsumsi Rumah Tangga dipandang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang sedang turun.

Perkembangan investasi fisik di Kalimantan Timur dapat diamati dari kontribusi Komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kalimantan Timur. Secara garis besar, kontribusinya semakin meningkat pada tahun 2013-2015, hanya saja pada tahun 2016 dan 2017 sedikit mengalami penurunan akibat turunnya PDRB Kalimantan Timur di tahun 2015. Adapun kontribusi komponen lainnya masih berada di bawah 5 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

No	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,00	5,21	3,63	1,28	0,60	2,54
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,95	25,61	10,90	8,30	-4,04	4,89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,83	9,77	0,17	-7,77	-10,00	(15,28)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,59	1,37	4,70	-1,47	-6,91	3,01
5	Perubahan Inventori	54,53	-18,11	29,35	-35,89	-65,19	(15,85)
6	Ekspor Luar Negeri	1,69	1,80	-7,71	-16,07	-9,88	2,55
7	Impor Luar Negeri	15,76	15,82	0,63	3,49	-12,70	2,51
8	Net Ekspor Antar Daerah	-54,04	-83,01	-1238,31	225,50	33,76	7,57
PDRB		5,26	2,25	1,71	(1,21)	(0,38)	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2016 berkontraksi sebesar negatif 0,38 persen, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2015 sebesar negatif 1,21 %. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berfluktuasi mengikuti tren harga migas dan batubara dipasar global, yang dalam hal ini terlihat pada pertumbuhan Komponen Net Ekspor Luar Negeri yang tumbuh negatif terutama pada tahun 2015.

Perbaikan harga komoditas migas dan batubara di tahun 2016 membawa perbaikan pada komponen ekspor luar negeri, namun justru komponen lainnya melambat dan tumbuh negatif. Meski demikian, pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur secara keseluruhan lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih negatif.

Pada tahun 2017, PDRB Provinsi Kalimantan Timur mampu menunjukkan tren positif sebesar 3,13 persen. Menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 7,57 persen, disusul Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,89 persen, Komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan komponen lainnya di bawah 3 persen. Sementara pertumbuhan negatif ditunjukkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar negatif 15,28 persen dan Komponen Perubahan Inventori sebesar negatif 15,85 persen.

Tabel 2.8
Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
1	Paser	35.093.422	36.916.267	39.250.901	38.249.407	37.191.462
2	Kutai Barat	21.500.739	21.956.103	21.442.756	21.316.264	21.989.397
3	Kutai Kartanegara	167.314.214	161.634.301	156.723.064	127.897.432	127.831.314
4	Kutai Timur	92.109.092	98.411.527	95.030.362	93.498.672	94.921.969
5	Berau	24.907.139	28.044.279	29.366.863	30.069.865	30.788.945
6	Penajam Paser Utara	6.437.387	6.981.002	7.589.459	7.423.760	7.557.111
7	Mahakam Ulu	1.526.012	1.573.480	1.778.452	1.948.281	2.105.999
8	Balikpapan	58.695.646	64.292.573	71.622.701	74.273.354	79.650.206
9	Samarinda	41.242.818	44.824.302	48.273.715	50.802.369	52.266.340
10	Bontang	54.511.514	56.278.079	59.055.313	58.502.703	53.935.808

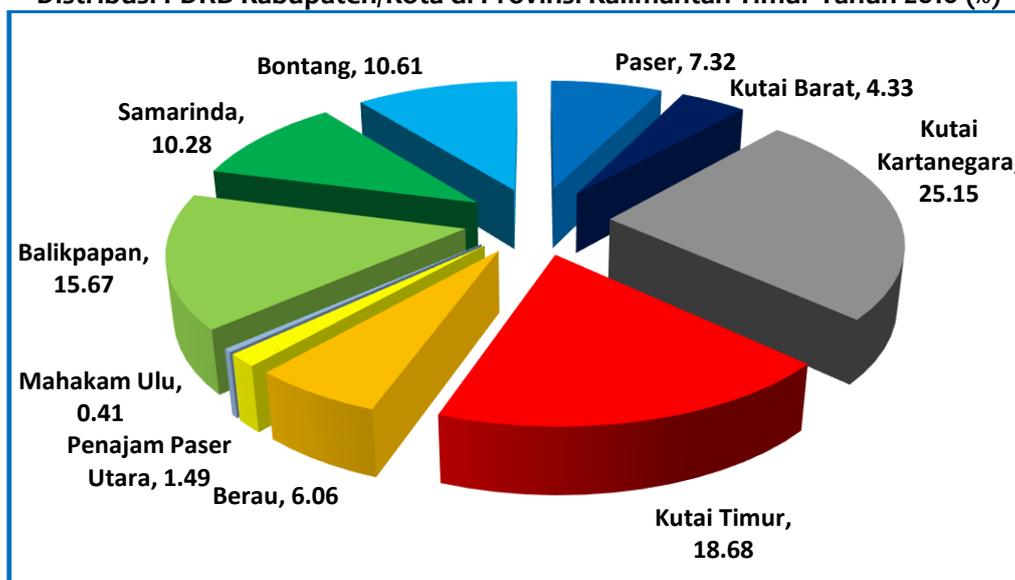
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2016 menunjukkan grafik kenaikan adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sementara itu, nilai PDRB beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan terutama pada tahun 2015 yaitu Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang.

Meskipun pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2016 mulai membaik, namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang nilai PDRB nya menurun antara lain Kota Bontang, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya menunjukkan peningkatan PDRB yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, maka terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 25,15persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 18,68 persen, dan Kota Balikpapan sebesar 15,67persen. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15persen. Besarnya peranan ini berasal dari kekayaan SDA khususnya hasil pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara.

Gambar 2.8
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 18,68 persen yang dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara. Berikutnya Kota Balikpapan yang menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 15,67 persen, sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, meskipun tidak terjadi pergeseran posisi dari ketiga daerah terbesar penyumbang total PDRB Kalimantan Timur tersebut, namun secara besaran kontribusi terjadi penurunan, khususnya kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 memiliki kontribusi cukup besar yaitu 33,24 persen sedang pada tahun 2016 hanya berkontribusi 25,15 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya produksi komoditas migas, dimana Kutai Kartanegara adalah penghasil migas terbesar di Kalimantan Timur. Penurunan produktifitas pertambangan batubara juga memberi dampak pada penurunan kontribusinya terhadap total kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sebagai dampak gejolak ekonomi global seiring dengan penurunan yang cukup drastis akan harga komoditas energi (minyak bumi dan batubara).

Berdasarkan peranan kabupaten/kota menurut lima lapangan usaha utama di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada tahun 2016, kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai tambah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Kartanegara(37,14 persen), Kabupaten Kutai Timur (33,78 persen), dan Kabupaten Paser (11,91 persen). Secara umum, peranan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terus

menurun terhadap total perekonomian Kalimantan Timur, akibat semakin menurunnya produksi migas dari sumur yang sudah tua serta belum ada penambahan eksploitasi sumur-sumur baru. Selain itu, harga komoditas migas dan batubara yang fluktuatif dan tidak menentu memberikan dampak terhadap semakin melemahnya kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Kalimantan Timur.

2. Industri Pengolahan

Secara spasial, kontribusi industri tersebut didukung oleh dua kota yaitu Kota Bontang sebesar 44,91 persen, yang mengandalkan industri LNG dan industri pupuk kimia, serta Kota Balikpapan, sebagai pusat industri kilang minyak bumi, dengan besaran peranan mencapai 37,62 persen. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil, yaitu berada dibawah 5 persen. Namun jika diamati perkembangannya, terlihat bahwa kontribusi industri di beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren meningkat, seperti di kabupaten Kutai Kertanegara, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 4,23 persen menjadi 4,94 persen, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas industri CPO.

3. Konstruksi

Pada tahun 2016, lapangan usaha Konstruksi menyumbang sebesar 8,58 persen terhadap total perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Secara kewilayahan, kontribusi lapangan usaha ini masih didominasi lapangan usaha yang ada di wilayah kota serta wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Yang tertinggi adalah Konstruksi yang ada di Kota Balikpapan,

memberikan kontribusisebesar 27,58 persen terhadap total nilai tambah Kontruksi Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh usaha Kontruksi di Kota Samarinda, yang berkontribusi sebesar 24,13 persen, dan Kutai Kertanegara sebesar 24,11 persen. Sedangkan peranan konstruksi di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil atau dibawah tujuh persen.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016, lapangan usaha Kontruksi menunjukkan perlambatan/penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan (realisasi) konstruksi baik oleh pemerintah, melalui belanja modal pembiayaan pembangunan infrastruktur umum, maupun oleh swasta dan masyarakat yang umumnya merupakan dampak ikutan dari penurunan aktivitas pertambangan batubara dan migas. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi yang paling rendah (terkoreksi) dialami oleh usaha Konstruksi di Kabupaten Berau, yang mengalami koreksi sebesar negatif 8,89 persen. Lapangan usaha konstruksi di Kabupaten Paser juga mengalami kontraksi sebesar 5,05 persen, sedangkan

kota Samarinda terkoreksi sebesar negatif 3,94 persen. Namun demikian, aktivitas usaha Konstruksi di Kabupaten Mahakam Ulu mampu tumbuh sebesar 7,39 persen dan merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Sebagai wilayah pemekaran yang baru, pembangunan/pengembangan di pada wilayah tersebut masih terus dipacu, khususnya untuk pembangunan infrastruktur umum, seperti gedung perkantoran, jalan dan lainnya, sehingga berdampak pada kinerja sektor konstruksi yang positif di wilayah tersebut. Usaha konstruksi di Kota Balikpapan juga mengalami laju pertumbuhan pada tahun 2016.

4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2016, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi sebesar 8,06 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Tiga daerah penyumbang terbesar terhadap pembentukan total PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 39,18 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 19,85 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 11,28 persen. Subkategori tanaman perkebunan menjadi penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha Pertanian, dengan produk utama berupa kelapa sawit dan produk tersebut cukup dominan di ketiga kabupaten tersebut. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan lapangan usaha pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit untuk mulai merubah struktur perekonomian dari yang didukung SDA tak terbarukan menjadi SDA terbarukan.

5. Perdagangan

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor umumnya identik dengan pusat perdagangan dan niaga yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pola umum persebaran usaha tersebut juga terlihat di Kalimantan Timur, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkonsentrasi di kota Samarinda dengan distribusi sebesar 28,98 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur. Peranan lapangan usaha Perdagangan di Kota Balikpapan juga cukup tinggi dalam menyumbang nilai tambah Perdagangan se-Kalimantan Timur, yaitu mencapai 24,10 persen. Usaha Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan peranan sebesar 16,80 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.9
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	71,31	Pertanian	12,56	Industri	4,51
Kubar	Pertambangan	46,95	Pertanian	15,20	Konstruksi	12,20
Kukar	Pertambangan	64,68	Pertanian	12,70	Konstruksi	8,23
Kutim	Pertambangan	79,23	Pertanian	8,67	Industri	2,98
Berau	Pertambangan	60,36	Pertanian	11,38	Transportasi	5,91
Penajam PU	Pertambangan	29,78	Pertanian	21,42	Industri	16,57
Mahulu	Pertanian	77,23	Pertambangan	7,68	Konstruksi	5,26
Balikpapan	Industri	47,62	Konstruksi	15,10	Transportasi	11,97
Samarinda	Konstruksi	20,14	Perdagangan	15,77	Pertambangan	12,45
Bontang	Industri	83,96	Konstruksi	4,80	Perdagangan	2,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada tahun 2016, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi andalan. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi perekonomian Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,23 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara. Peranan aktivitas tambang batubara di Kutai Timur memberikan kontribusi sebesar 71,58 persen terhadap total PDRB wilayah tersebut.

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 71,31 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara, hingga mencapai 66,06 persen dari total PDRB Kabupaten Paser. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,68 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya, dengan masing-masing kontribusi yang diberikan terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 32,95 persen, 28,98 persen, dan 2,75 persen.

Tabel 2.10
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,86	PMTB	18,40	K. Ruta	14,29
Kubar	PMTB	38,67	Net Ekspor	34,77	K. Ruta	16,65

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Kukar	Net Ekspor	49,11	PMTB	34,33	K. Ruta	12,47
Kutim	Net Ekspor	70,79	PMTB	18,97	K. Ruta	7,12
Berau	Net Ekspor	58,79	PMTB	22,34	K. Ruta	13,36
Penajam PU	K. Ruta	42,58	PMTB	33,60	K. Pemerintah	13,26
Mahulu	Net Ekspor	40,24	PMTB	23,86	K. Ruta	22,55
Balikpapan	PMTB	41,31	K. Ruta	27,38	Net Ekspor	26,57
Samarinda	K. Ruta	47,68	PMTB	39,01	K. Pemerintah	14,85
Bontang	Net Ekspor	77,74	PMTB	10,74	K. Ruta	9,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, enam kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu dan Bontang. Sedangkan dua kabupaten lainnya didominasi oleh PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dua kabupaten lainnya Balikpapan dan Kutai Barat didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB

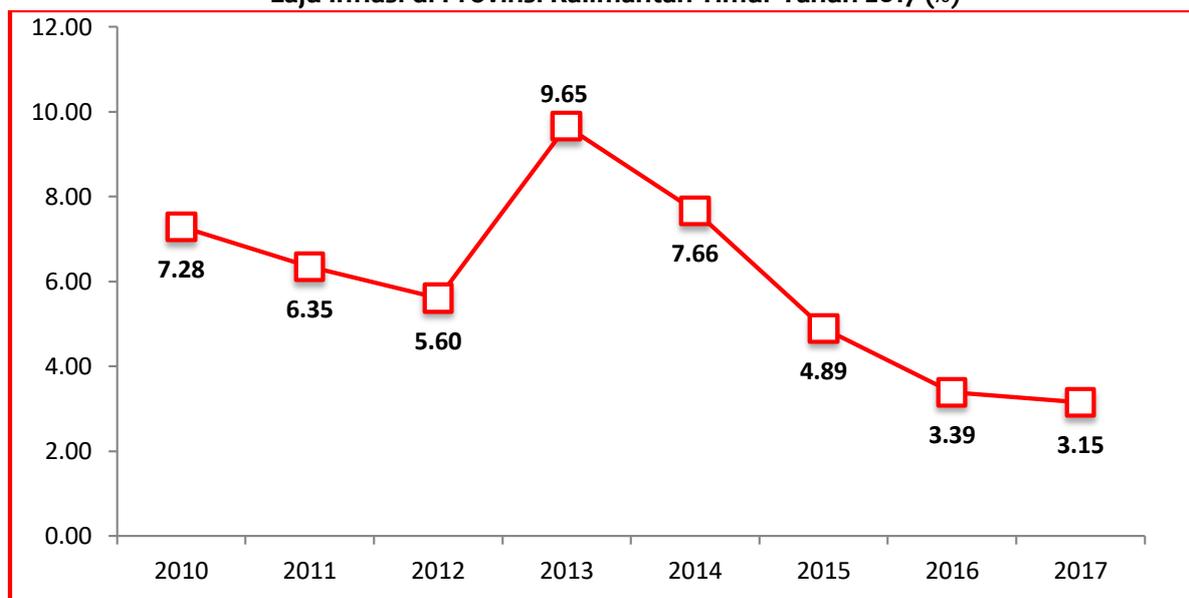
B. Laju Inflasi

Inflasi, dalam ilmu ekonomi, merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Gambar 2.9
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada tahun 2017 kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar negatif 0,24 persen terutama terjadi pada komoditas bumbu-bumbuan dengan deflasi negatif 23 persen, kacang-kacangan negatif 3,99 persen, serta padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya yang juga mengalami penurunan harga hingga negatif 0,05 persen.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.11
Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2017 (persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02
2017	3,69	2,45	3,15	3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Kota Samarinda pada tahun 2017 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,69 persen, dan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Balikpapan sebesar 2,45

persen. Menariknya, jika dirinci berdasarkan komoditas barangnya maka Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur sama – sama mengalami deflasi cukup tinggi pada komoditas bumbu-bumbuan dan kacang-kacangan. Sehingga terdapat fenomena yang serupa pada kelompok ini. Distribusi barang dan jasa memegang peranan penting dalam hal ini, mengingat sebelumnya andil inflasi pada kelompok bahan makanan sangat tinggi pada kenaikan harga-harga komoditas lainnya. Dan tentunya hal ini akan berkaitan dengan pendapatan para petani di Kalimantan Timur jika harga komoditasnya turun maka akan berkurang pula pemasukan bagi mereka, sudah tentu ini akan berimbas pada kesejahteraan mereka.

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 324.800 orang (11,04%), tahun 2008 turun menjadi 286.440 orang (9,51%), pada tahun 2009 berjumlah 239.220 (7,73%) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 220.170 jiwa (6,19%) meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi akan tetapi dari sisi persentase terus mengalami penurunan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2015 – Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 15,7 persen, yaitu dari Rp 473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 548.094,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2017 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, empat komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras dan mie instan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel 2.12
Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19

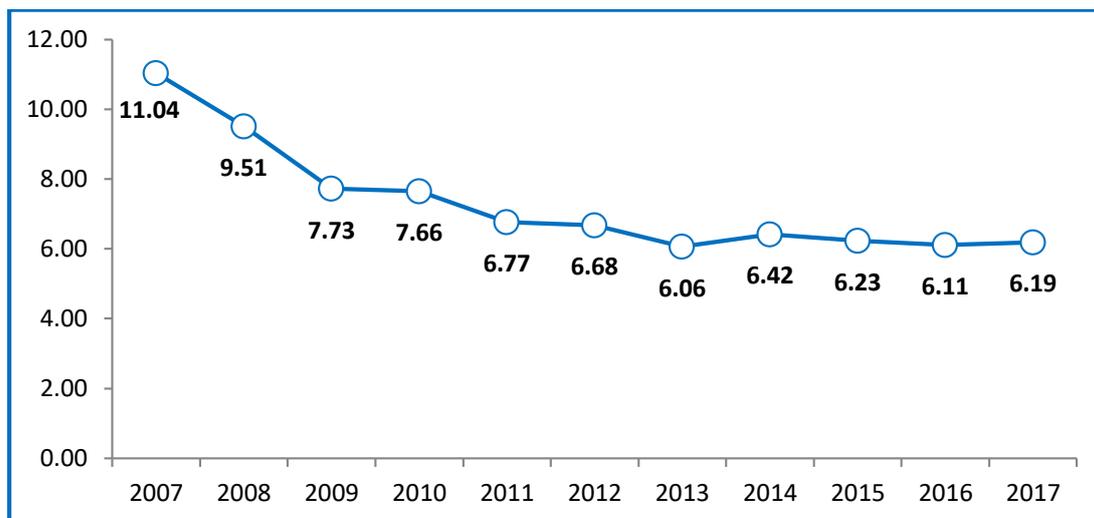
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tabel 2.13
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2017

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	24,98	Beras	26,44
2	Rokok Kretek Filter	17,25	Rokok Kretek Filter	21,74
3	Telur ayam ras	5,79	Telur ayam ras	4,78
4	Daging ayam ras	4,99	Gula Pasir	4,29
5	Mie Instan	4,54	Daging ayam ras	4,03
6	Gula Pasir	3,68	Mie Instan	4,00
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,07	Cabe rawit	3,04
8	Kue basah	2,98	Kue Basah	2,84
9	Cabe Rawit	2,89	Bawang merah	2,72
10	Bawang merah	2,56	Tongkol/Tuna/Cakalang	1,88
11	Tempe	2,40	Tempe	1,82
12	Tahu	2,07	Roti	1,80
13	Bandeng	1,97	Bandeng	1,57
14	Susu Kental Manis	1,92	Tahu	1,51
15	Susu Bubuk	1,69	Kopi Bubuk & kopi instan (sachet)	1,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Gambar 2.10
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017 (persen)



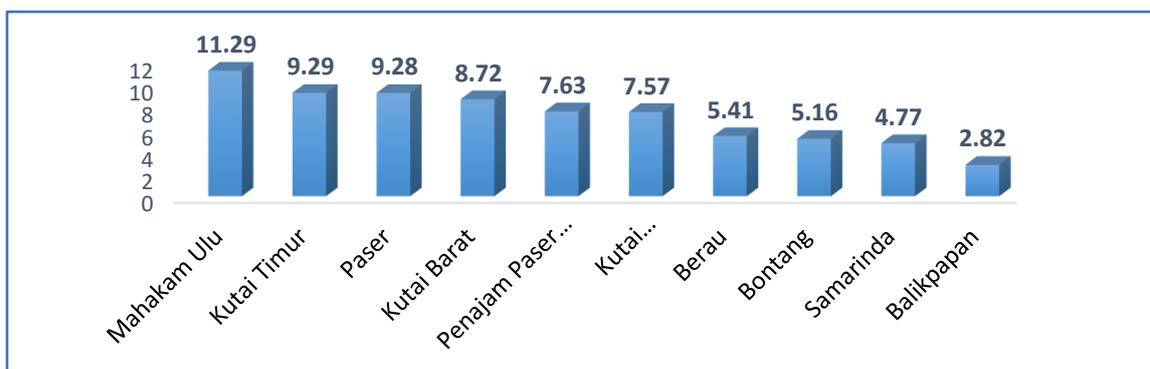
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Paser	9,48	7,91	7,64	7,94	7,87	8,64	8,68	9,28
2	Kutai Barat	9,9	8,25	8,28	7,7	7,53	8,13	8,65	8,72
3	Kutai Kartanegara	8,68	7,21	6,94	7,52	7,43	7,58	7,63	7,57
4	Kutai Timur	11,38	9,43	8,77	9,06	9,1	9,55	9,16	9,29
5	Berau	6,6	5,46	5,24	4,83	4,76	5,11	5,37	5,41
6	Penajam Paser Utara	10,46	8,67	8,57	7,7	7,56	7,62	7,49	7,63
7	Balikpapan	4,07	3,39	3,3	2,48	2,46	2,78	2,81	2,82
8	Samarinda	5,21	4,31	4,18	4,63	4,56	5,25	4,72	4,77
9	Bontang	6,67	5,40	5,2	5,16	5,1	5,74	5,18	5,16
10	Mahakam Ulu						9,9	10,65	11,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (persen)

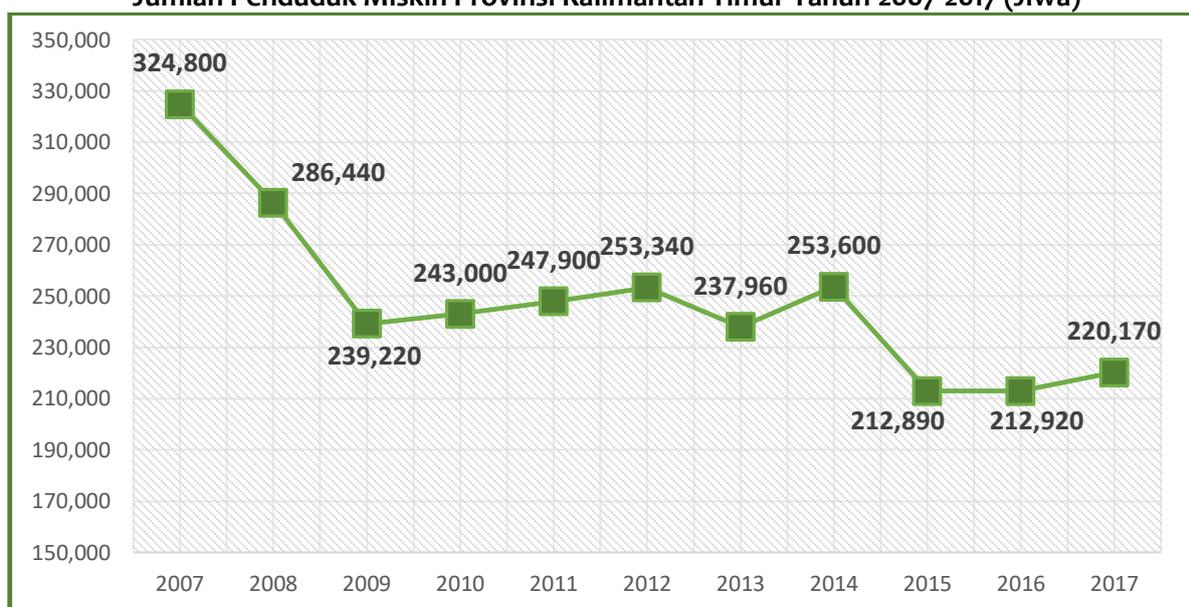


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada grafik dan tabel di atas terlihat bahwa di beberapa kabupaten/kota justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai angka 11,29 persen dan terendah berada di Kota Balikpapan dengan angka 2,82 persen. Walaupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 10,64 persen pada tahun 2017, namun dilihat menurut kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Permasalahan utama yang dihadapi kabupaten terkait kemiskinan adalah masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Secara absolut, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Paser meningkat 9,19 persen dari tahun 2017 dan Kabupaten Mahakam Ulu meningkat 6,60 persen dibanding tahun 2016.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (jiwa)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Paser	21.964	19.100	19.000	20.144	20.340	22.510	23.170	25.300
2	Kutai Barat	16.428	14.300	14.200	13.204	12.920	11.820	12.650	12.800
3	Kutai Kartanegara	54.400	47.300	47.100	52.143	52.530	54.100	55.820	56.570
4	Kutai Timur	28.916	25.300	25.200	27.174	28.300	30.320	30.170	31.950
5	Berau	11.847	10.300	10.300	9.690	9.770	10.760	11.470	11.860
6	Penajam Paser Utara	14.930	13.000	12.900	11.694	11.580	11.700	11.660	12.000
7	Balikpapan	22.746	19.800	19.700	14.918	15.020	17.100	17.550	17.860

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Samarinda	37.847	32.900	32.800	36.605	36.650	42.800	38.950	40.010
9	Bontang	9.396	8.100	8.100	8.153	8.210	9.100	8.600	8.750
10	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	2.670	2.880	3.070

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

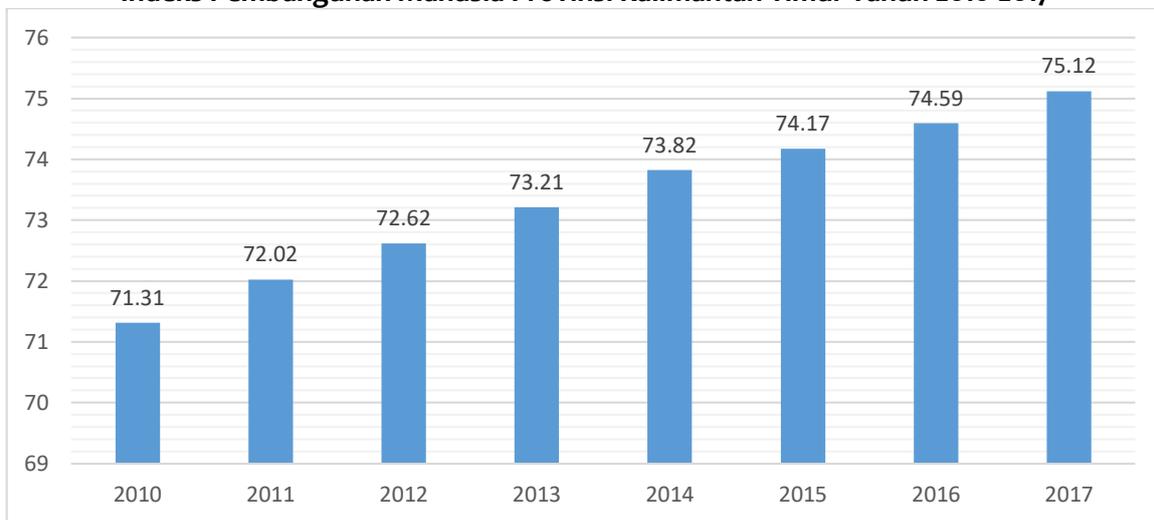
A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 75,12 pada tahun 2017. Selama periode 2010 hingga 2017 IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Walaupun pembangunan manusia di tahun 2017 berhasil mengalami percepatan, jika diamati sepanjang periode 2011-2015, terdapat kecenderungan perlambatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional.

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan dengan IPM tertinggi adalah di Kota Bontang yang mencapai 79,47, diikuti oleh Kota Samarinda dengan IPM 79,46, dan Kota Balikpapan ditempat ketiga (79,01). Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 73,56 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 66,09.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM*)
1	Paser	72,02	12,96	8,19	10.171	71,16
2	Kutai Barat	72,28	12,75	8,03	9.492	70,18
3	Kutai Kartanegara	71,64	13,26	8,71	10.593	72,75
4	Kutai Timur	72,45	12,44	8,72	9.960	71,91

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM*)
5	Berau	71,37	13,18	8,78	11.675	73,56
6	Penajam Paser Utara	70,80	12,46	7,60	11.019	70,59
7	Mahakam Ulu	71,19	12,42	7,37	7.281	66,09
8	Balikpapan	73,96	13,59	10,54	13.883	79,01
9	Samarinda	73,68	14,23	10,33	14.010	79,46
10	Bontang	73,71	12,79	10,39	16.157	79,47

Catatan : *) Data tahun 2017 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

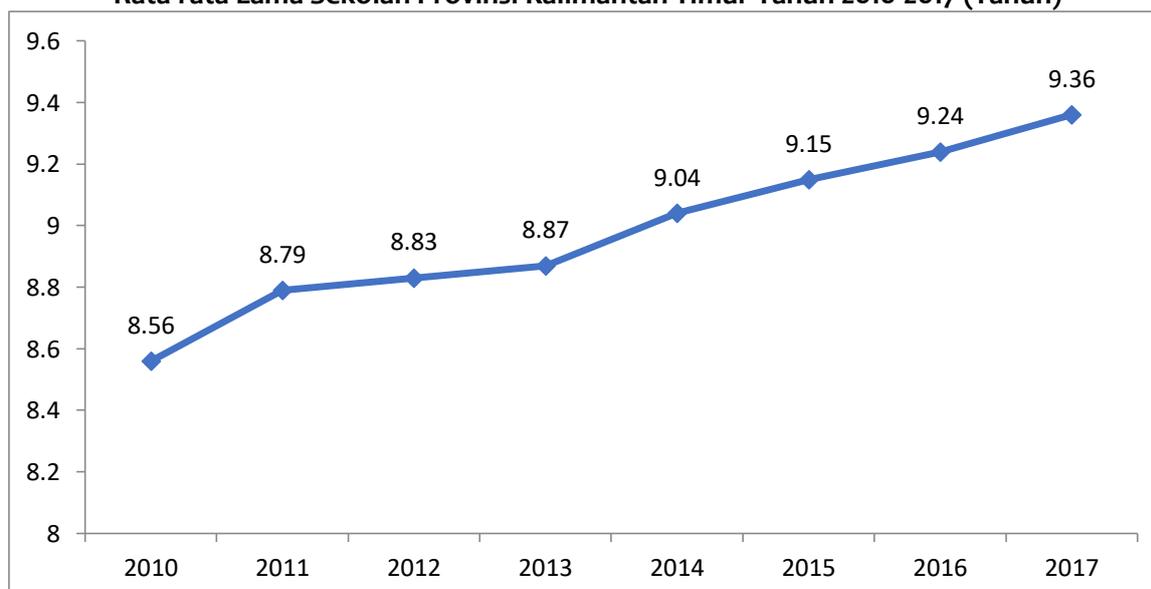
B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir (2017) mencapai 9,36 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

Gambar 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)



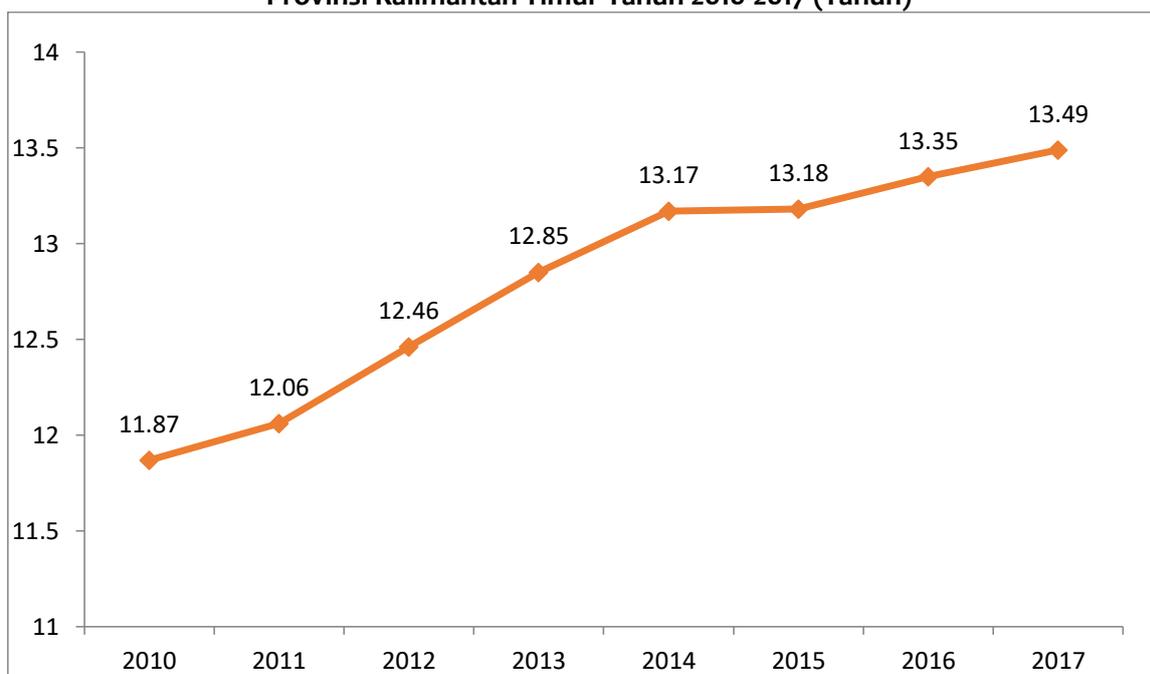
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,49 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Perguruan Tinggi Semester 3. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Gambar 2.15
Harapan Usia Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)

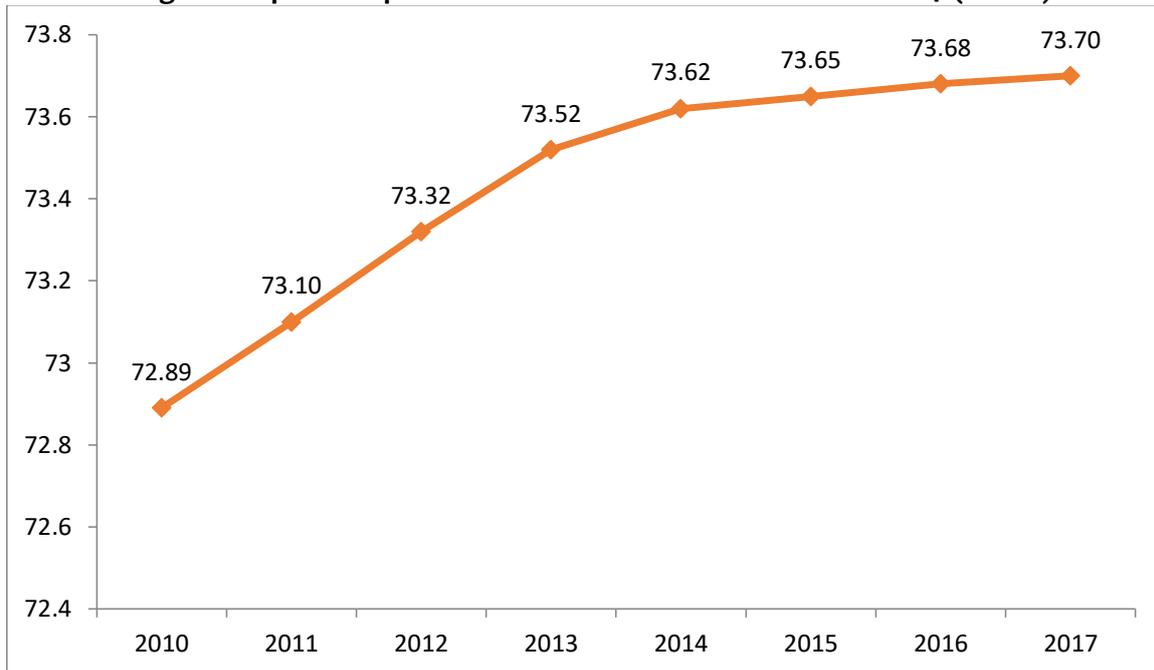


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 mencapai 73,68 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 73,70 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2017 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah						
Usia Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7-12	97,50	97,50	97,60	99,63	99,54	99,67
13-15	89,00	89,00	89,00	97,92	98,18	98,79
16-18	74,00	74,00	74,24	80,68	80,81	81,32
Angka Partisipasi Kasar						
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	107,76	107,57	111,04	112,61	113,76	108,07
SLTP	93,24	91,06	91,49	97,90	97,78	91,46
SLTA	80,08	82,21	85,54	90,31	87,93	99,51
Angka Partisipasi Murni						
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD	94,37	95,91	96,70	97,00	97,13	97,43
SLTP	74,37	76,10	78,73	79,06	79,20	79,58
SLTA	59,75	62,22	67,03	67,78	67,92	68,23

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2017

1) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.18
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	358.727	20.424	17,56	217,02
Swasta	203	53.896	2.910	18,52	265,50
MI ^{*)}	114	22.962	1.443	15,91	201,42
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	426	126.158	7.424	16,99	296,15
Swasta	186	30.208	1.938	15,59	162,41
MTs ^{*)}	145	26.826	2.199	12,20	185,01
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	61.404	3.511	17,49	454,84
Swasta	75	10.880	746	14,58	145,07
MA ^{*)}	68	9.136	989	9,24	134,35
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Negeri	86	43.297	2.905	14,90	503,45
Swasta	130	27.649	1.783	15,51	212,68

Keterangan : *) Data tahun 2016

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Kemenag Wilayah Kaltim

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 perguruan tinggi dan 45 akademi, baik negeri maupun swasta, sebagai bagian dari sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa yang terdaftar di berbagai akademi dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 95.642 mahasiswa.

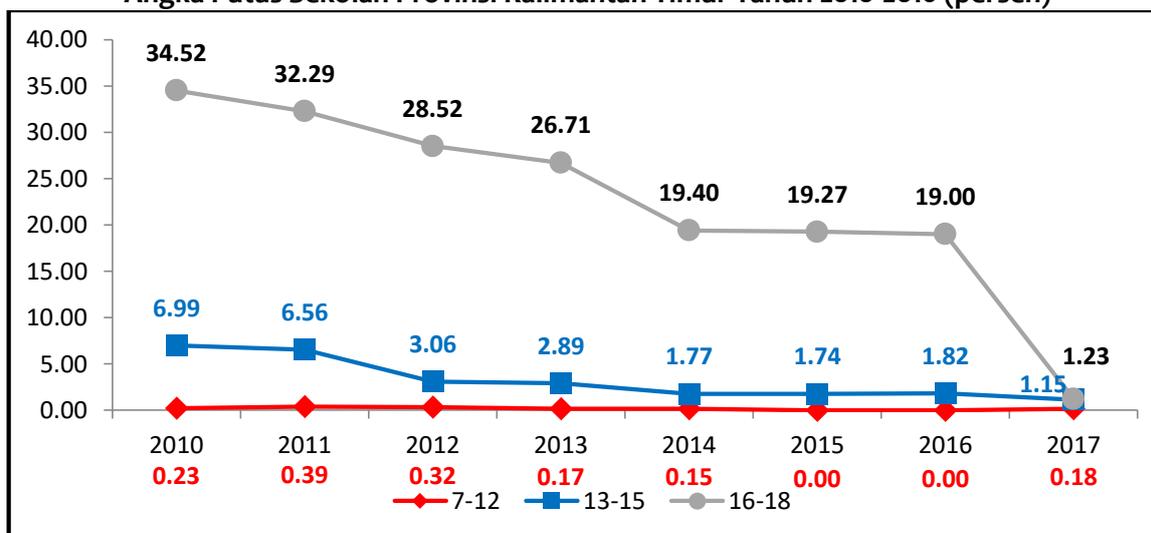
Tabel 2.19
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kategori	Jumlah PT/Akademi	Jumlah Fakultas/Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi			
Negeri	2	22	41.690
Swasta	7	11	24.882
Akademi			
Negeri	5	24	6.117
Swasta	40	0	22.953
Jumlah	54	57	95.642

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2017

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2016, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berhasil mencapai 0,18 persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 1,15 persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) mencapai 1,23 persen.

Gambar 2.17
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.20
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit	48	48	45	46	47	47
2	Tempat Tidur RS	4.538	4.538	4.745	4.873	6.154	
3	Rumah Sakit Swasta	14	16	20	16	16	16

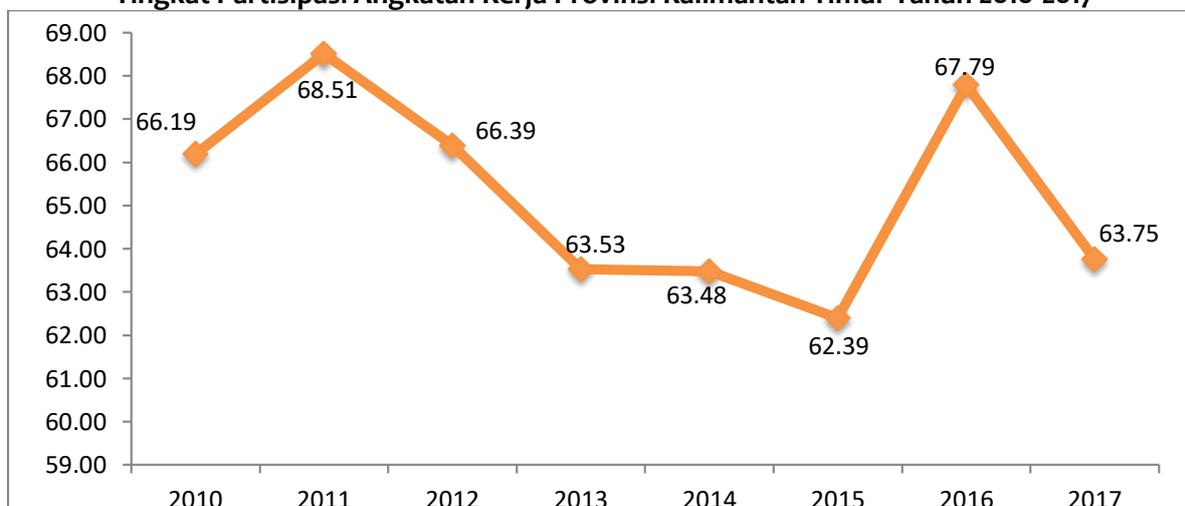
No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	Dokter Umum	794	1.007	908	1.113	1.035	1.114
5	Dokter Gigi	262	290	294	335	323	320
6	Dokter Spesialis	276	569	354	347	583	678
7	Tenaga Medis RS	471	1.341	1.195	1.189	1.186	
8	Perawat RS	1.627	3.791	3.027	6.893	7.178	6.662
9	RS Bersalin	13	14	18	10	10	10
10	Puskesmas	172	186	180	180	180	186
11	Pustu	568	576	661	689	669	714
12	Dokter Puskesmas	513	396	607	607	714	
13	Pedagang Besar Farmasi	41	44	46	44	45	47
14	Apotek	371	398	435	561	524	524
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	79,48	90,86	88,76	91,26	90,12	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

C. Ketenagakerjaan

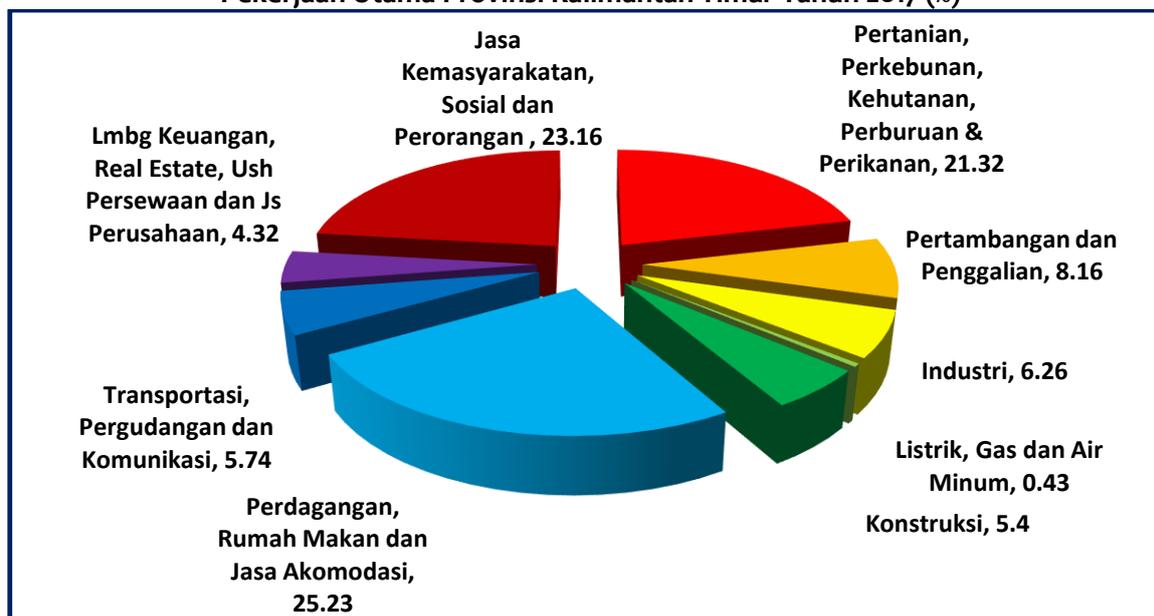
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 63,75 persen pada tahun 2017. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Gambar 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Gambar 2.19
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (%)

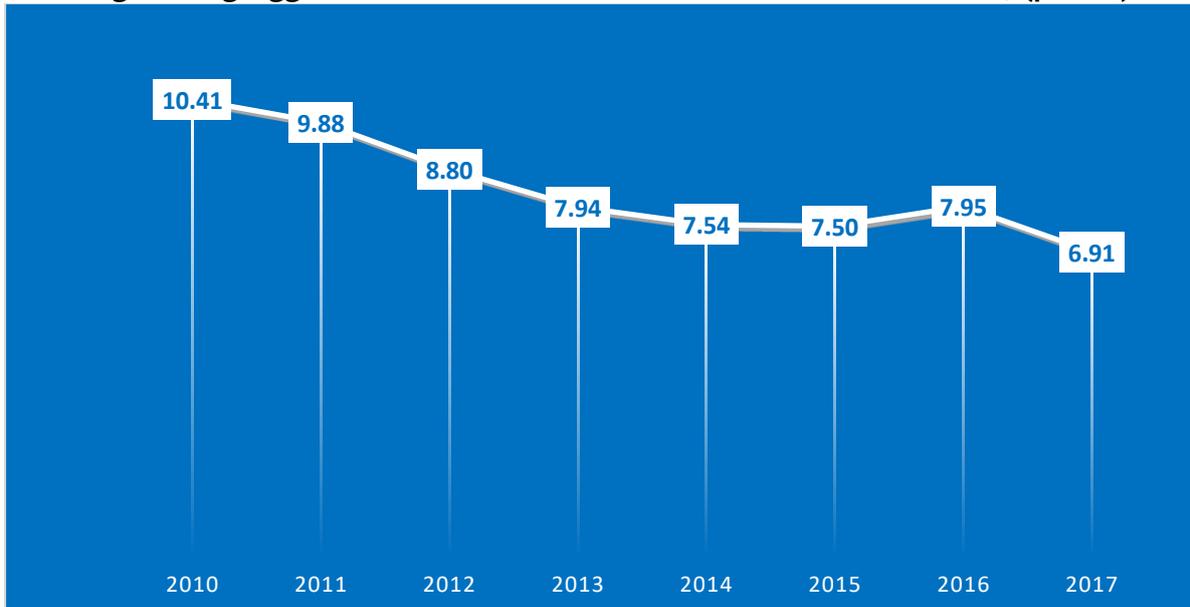


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Pada tahun 2017, hampir semua penduduk angkatan kerja memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 9 (sembilan) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 25,23 persen, diikuti oleh sektor pertanian yang mencapai 21,32 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Minum mencapai 0,43 persen.

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,91 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
1	Paser	6,82	8,41	10,18	9,25	6,69	9,06	5,54
2	Kutai Barat	7,97	9,11	8,23	8,03	6,84	11,7	5,87
3	Kutai Kartanegara	11,53	7,68	7,89	7,37	7,65	10,22	5,72
4	Kutai Timur	12,71	9,41	6,49	6,09	5,65	5,14	4,61
5	Berau	9,33	8,21	5,79	5,85	10,05	5,72	6,45
6	Penajam Paser Utara	9,78	8,44	7,53	7,97	7,52	7,28	4,75
7	Balikpapan	11,76	12,14	8,95	7,95	7,56	5,95	10,39
8	Samarinda	9,22	10,9	9,71	8,57	7,56	5,61	6,19
9	Bontang	12,77	12,44	14,32	11,19	9,38	12,07	12,44
10	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	4,75	9,05

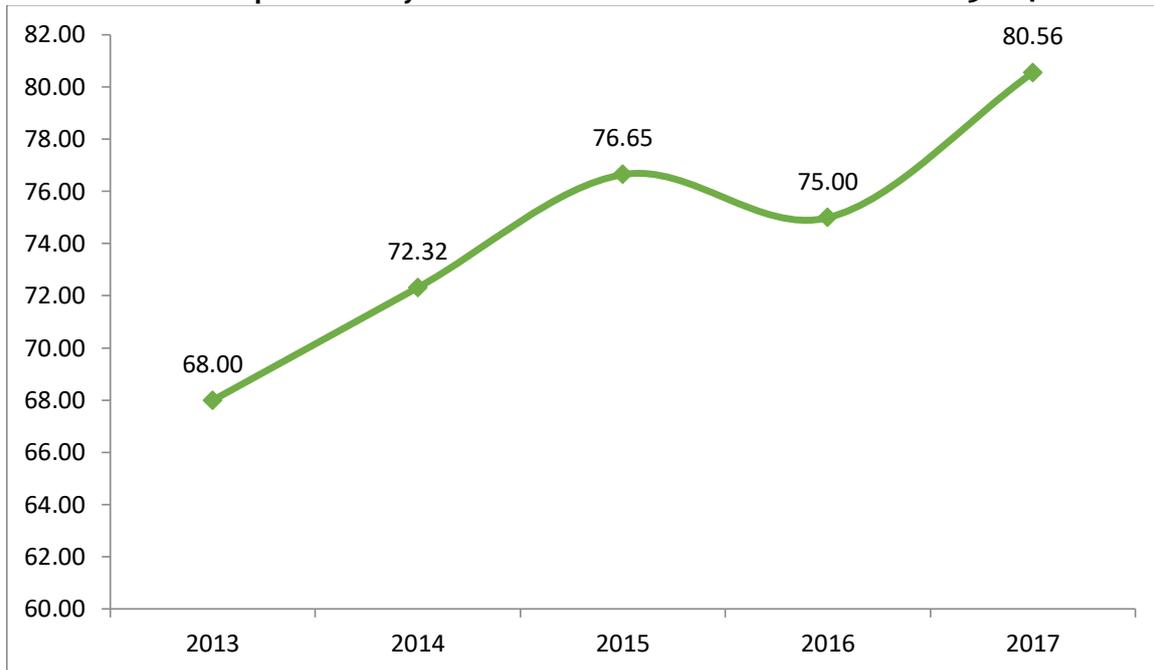
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.21
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

Pada tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 80,56 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (75,00). Meskipun begitu, secara series indeks ini mengalami kenaikan dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu dirumuskan kembali berbagai program dan kegiatan baru terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah di Kalimantan Timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan di berbagai bidang.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan 2016. Sempat terjadinya penurunan status opini BPS ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Produksi padi pada tahun 2017 mengalami kenaikan, baik itu secara luas panen maupun total produksi padi. Pada tahun 2017, total produksi padi mencapai 649.360 ton dengan luas panen 94.150 ha dan produktivitasnya 6,90 ton/ha.

Tabel 2.22
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2017

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2010	110.288	459.477	4,17
2011	100.826	425.505	4,22
2012	101.960	424.670	4,17
2013	102.912	439.439	4,27
2014	100.262	426.567	4,26
2015	99.209	408.782	4,12
2016	80.343	305.337	3,80
2017*)	94.394	400.040	4,24

*) Angka Ramalan I ;Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim, 2017

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,17 juta ha dan memiliki produksi mencapai 5,77 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 58 ribu ton pada tahun 2016. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.23
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017*)

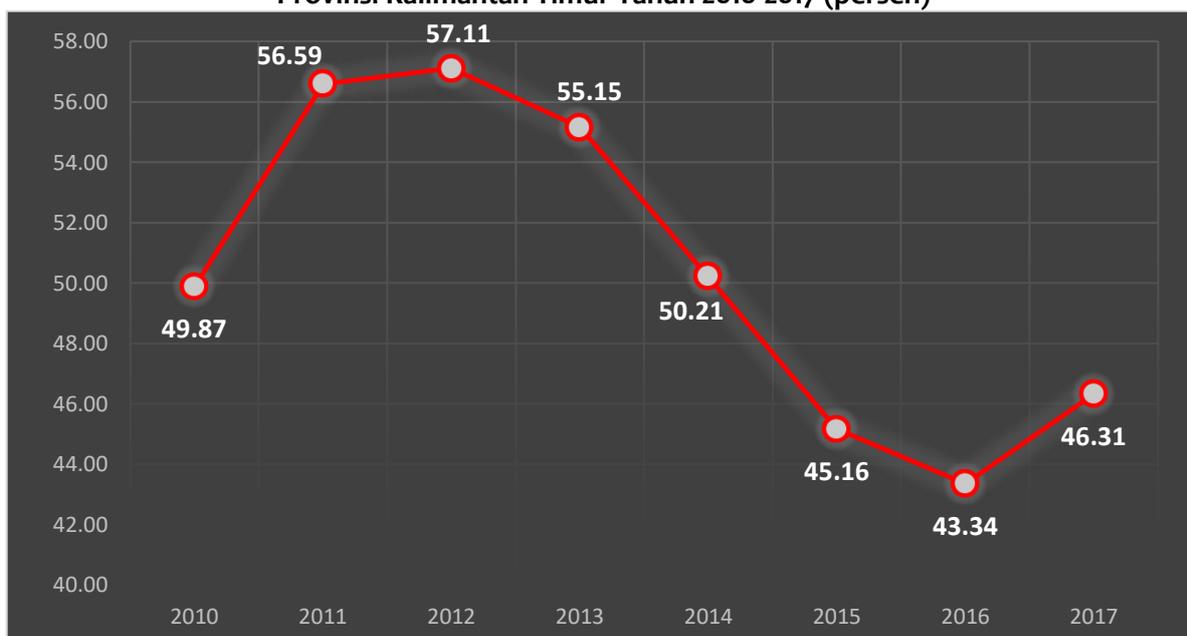
No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	116.542	37.861	0,77
2.	Kelapa	21.739	7.416	0,45
3.	Kopi	2.893	161	0,12
4.	Lada	9.055	1.753	0,27
5.	Kakao	7.902	1.146	0,23
6.	Kelapa Sawit	1.173.944	5.768.954	75,00

*) Angka Sementara; Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Perkebunan, 2017

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

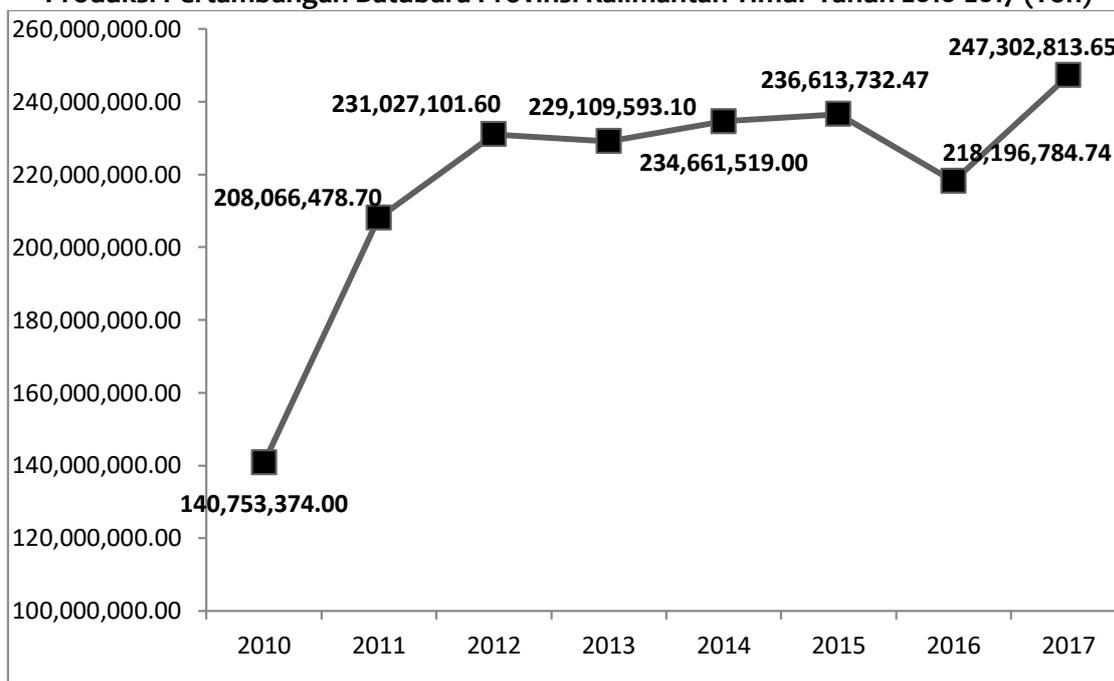
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga tahun 2016 kontribusi menurun hingga mencapai 43,34 persen. Nilai PDRB pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat. Kelesuan ini bisa jadi karena gejolak perekonomian global sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. Kemudian, nilai PDRB pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2017, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali menunjukkan peningkatan mencapai 46,312 persen.

Gambar 2.22
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Gambar 2.23
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Ton)



Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

Tabel 2.24
Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Batubara (Ton)	Amoniak (Ton)	Urea (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2010	178.450.014,11	1.825.106,00	2.887.285,00	56.791,01	1.045.503,66
2011	208.066.478,72	1.745.336,00	2.793.766,00	53.023,68	911.529,96
2012	231.027.101,60	1.905.389,00	3.008.267,00	47.436,40	822.229,47
2013	229.109.593,05	1.939.081,00	3.007.632,00	42.983,64	713.549,85
2014	234.661.519,00	2.433.945,00	1.125.544,00	35.207,46	605.579,00
2015	236.613.732,47	1.087.077,00	3.019.349,00	36.605,80	609.744,52
2016	218.196.784,74			34.323,80	568.588,80
2017*)	247.302.813,65			8.083,25	137.643,43

Ket: *) Angka Sementara; Karena Pelimpahan Data Amoniak dan Urea dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Disperindagkop pada tahun 2016 sehingga data belum tersedia karena pelimpahan tersebut

Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2017

C. Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.25
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	PMDN	PMA	Total
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160
2013	236	313	549
2014	48	54	102
2015	124	36	160
2016	317	43	360
2017	625	62	392

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur, 2017

D. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Internasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi baik dalam negeri maupun investor asing mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

PMDN				
Tahun	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10
2016	317	56.221.706,80	243	6.885.124,60
2017	625	50.052.325,60	357	10.980.216,40
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30
2016	43	7.876.807,30	471	1.181.859,20
2017	62	2.260.536,80	566	1.285.215,20

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur, 2017

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017

PMDN								
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825	29.023	9.236
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143	243	357
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6	119,44	25,87
PMA								
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230	22.204	15.508
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420	471	566
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69	47,14	27,40

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur, 2017

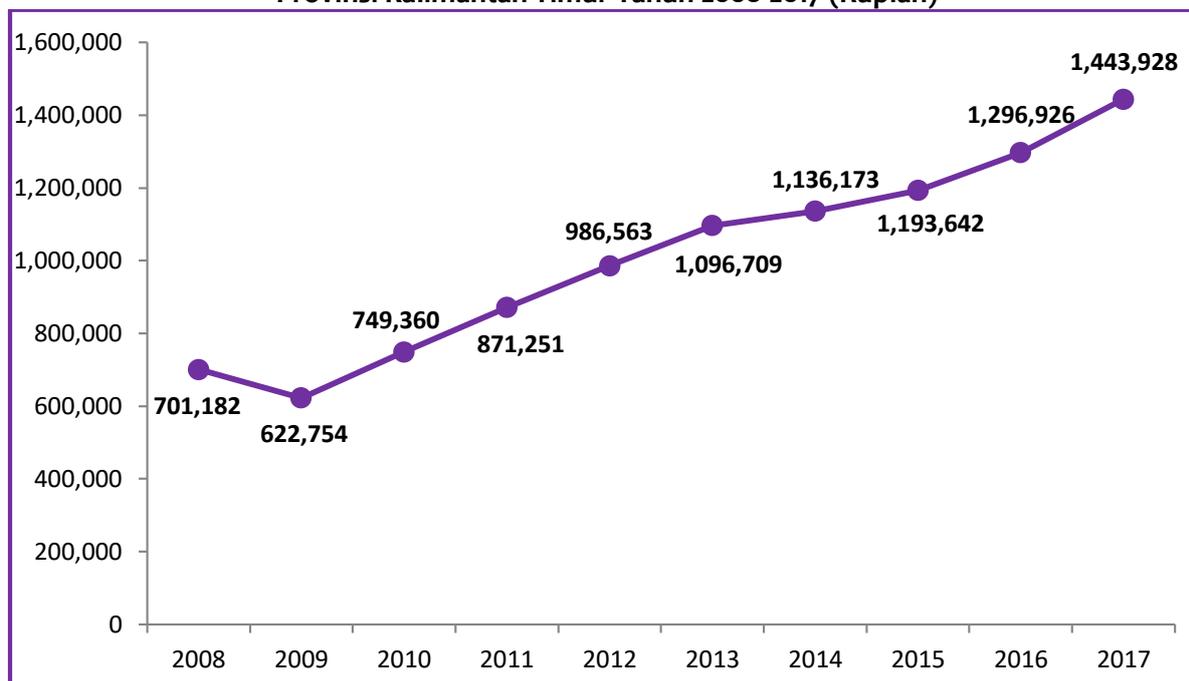
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Gambar 2.24
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2017 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

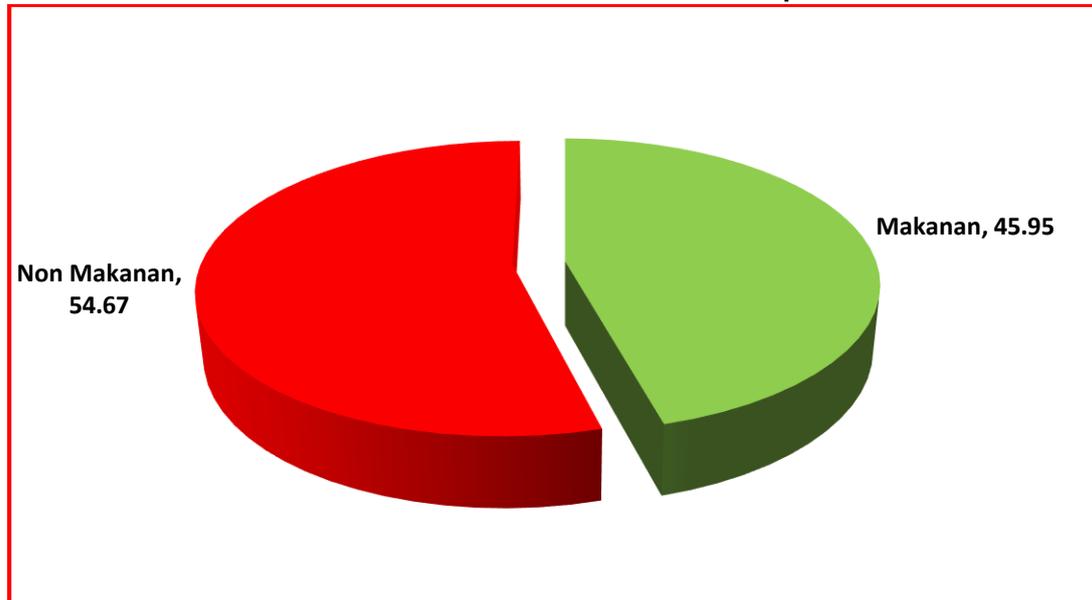
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.28
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Gambar 2.25
 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.29
 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117,00	120,03	121,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66	122,30	125,53
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 103,88 pada tahun 2017 turun jika dibandingkan tahun

sebelumnya (104,78). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,45 dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (92,03).

Tabel 2.30
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2016	2017	
NTP Gabungan		98,14	97,60	-0,55
1.	Tanaman Pangan	96,61	95,18	-1,48
2.	Hortikultura	92,03	92,45	0,46
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	-2,75
4.	Peternakan	104,78	103,88	-0,86
5.	Perikanan	99,89	101,37	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

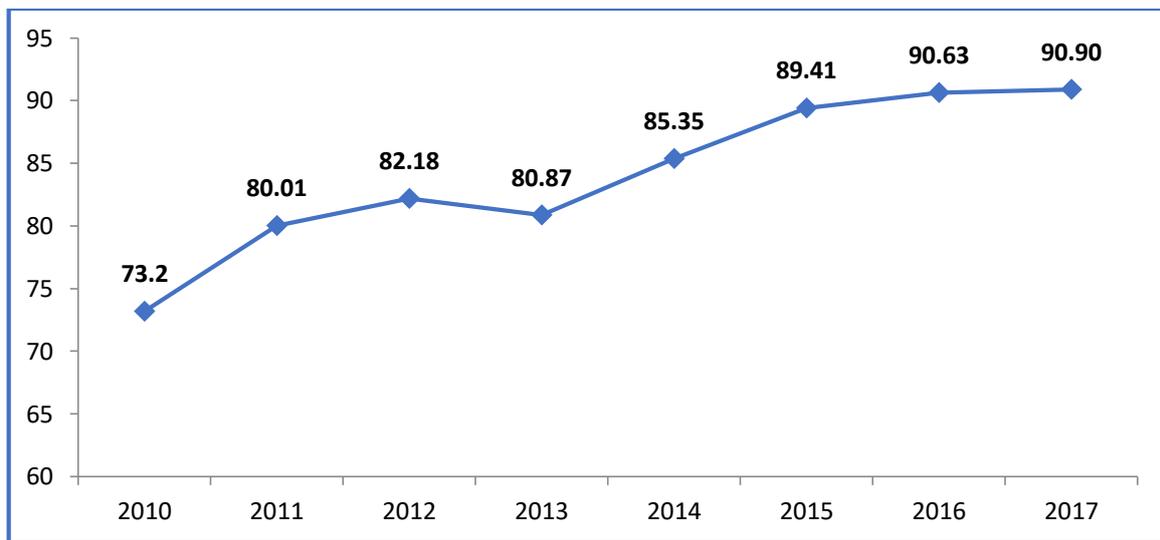
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai 90,90 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

Gambar 2.26
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

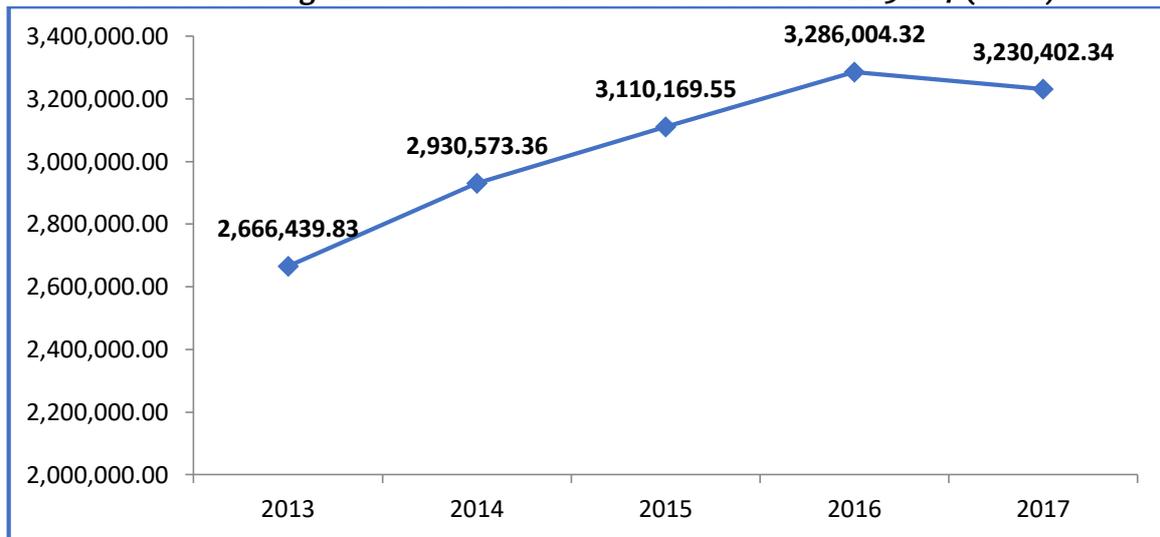
Tabel 2.32
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif (litr/dtk)	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

Gambar 2.27
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Tabel 2.33
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum untuk karakteristik infrastruktur perhubungan yakni jalan, baik yang berstatus Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	STATUS	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.490,49	0,00	4,30	216,11
2	Provinsi	831,03	106,30	52,53	191,59
3	Kabupaten/Kota*)	2.161,93	3.284,47	3.505,80	747,38
TOTAL		4.483,45	3.390,77	3.562,63	1.155,08

Catatan : *) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.35
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	81,59	1.529,65	65,41	34,26
2	Provinsi	521,59	41,90	288,71	246,14
3	Kabupaten/Kota*)	3.875,80	2.004,36	2.054,91	1.805,59
TOTAL		4.478,98	3.575,91	2.409,03	2.085,99

Catatan : *) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.36
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

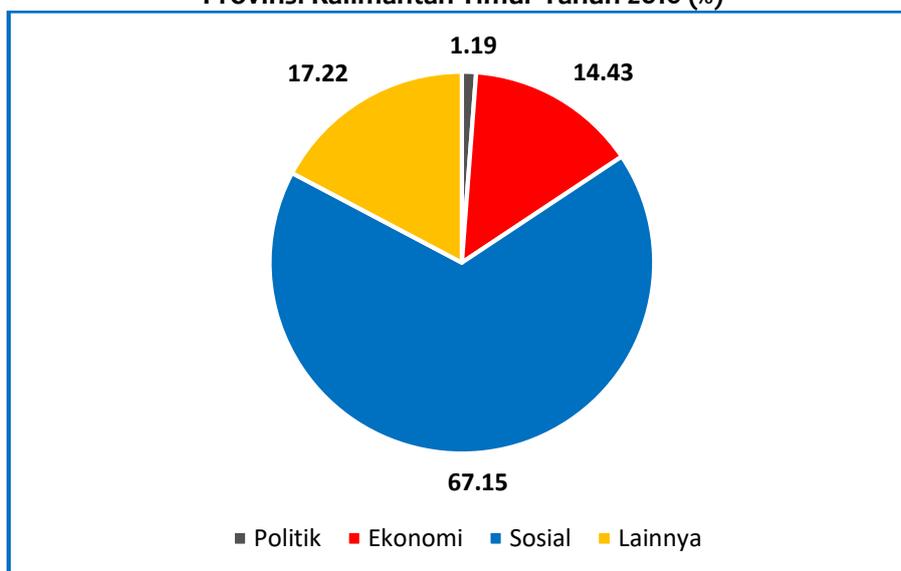
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

Sumber: Polda Kaltim 2017

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

Gambar 2.28
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

Tabel 2.37
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

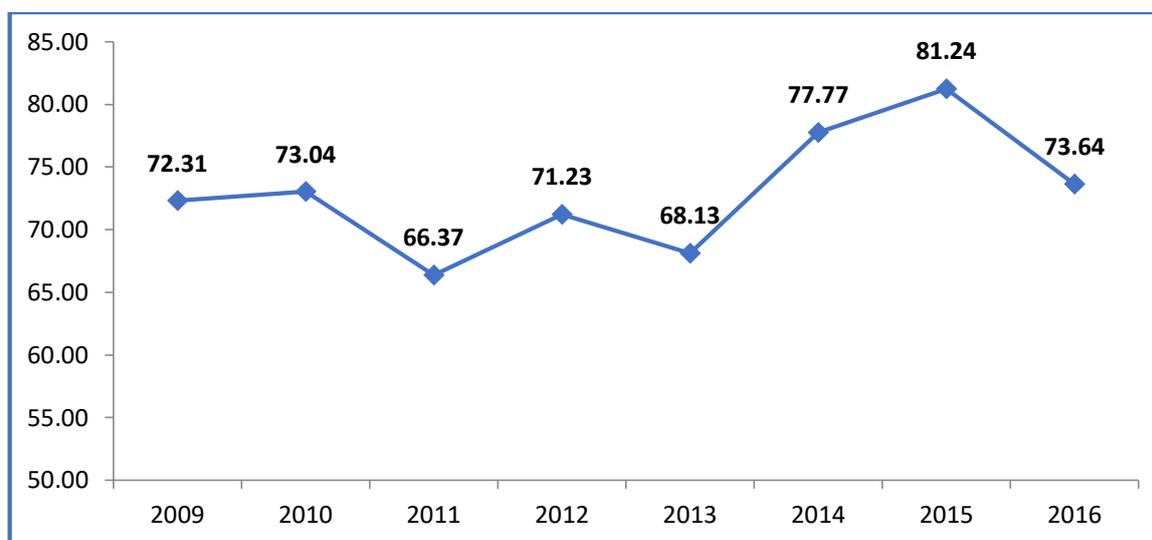
Tahun	Jenis Demo				Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	Lainnya	
2011	3	110	220	333	666
2012	3	149	254	406	812
2013	5	182	136	323	646
2014	19	224	189	432	864
2015	14	141	197	95	352
2016	9	109	507	130	755

Sumber: Polda Kaltim, 2017

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,24 pada tahun 2015. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Gambar 2.29
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

D. Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 238 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 9,96 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.793 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 397 proyek sebesar 0,97 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.335 orang.

Tabel 2.38
Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	238	9.955.629,80	5.793	397	970.414,70	13.335

Sumber: DPMPTSP, 2018

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

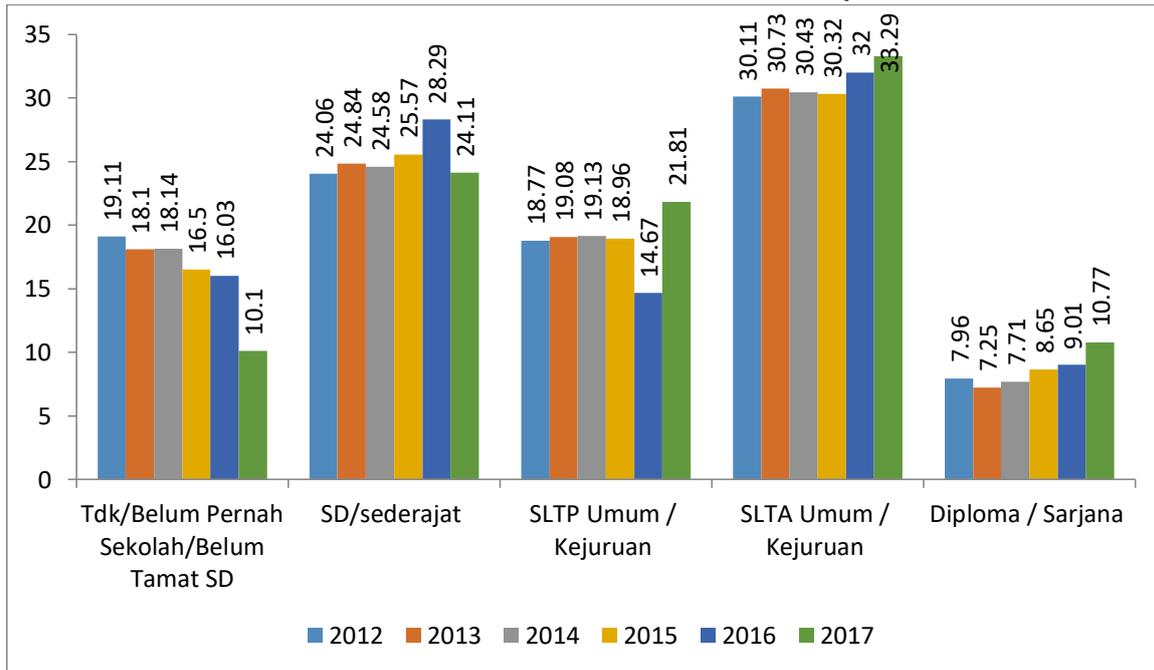
Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan

mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.30
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

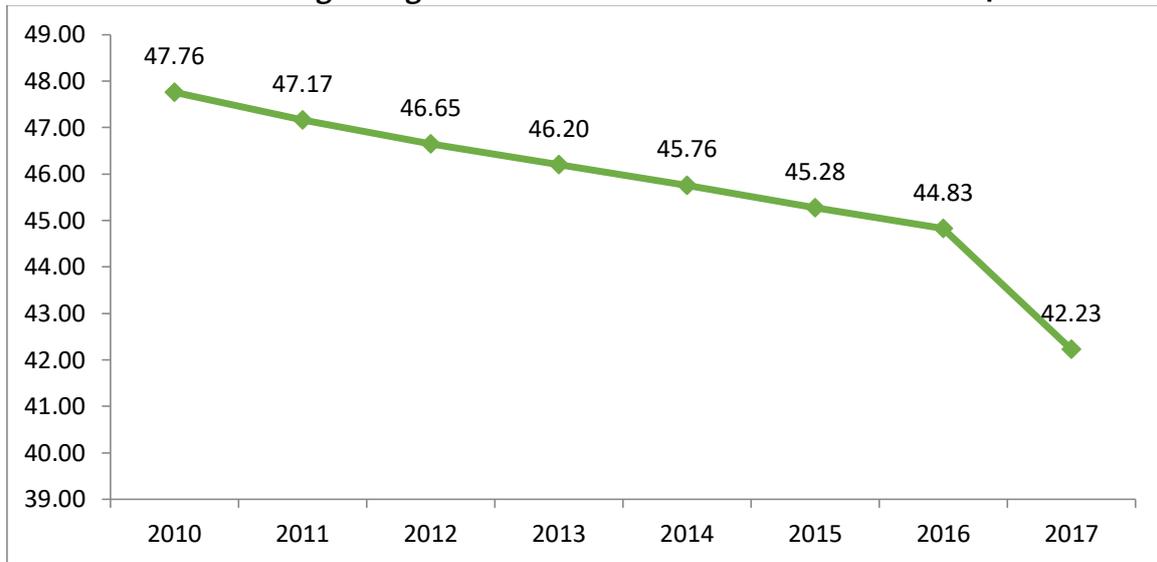


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.31
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.39
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.331.285	3.363.630	3.394.932	3.441.731	3.505.161	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	3,13	
1.3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27		
1.5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,60	41,06		
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,57	0,54	0,54	*		
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,06	6,42	6,23	6,11	6,19	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	6.686	6.722	4.199	9.138	8.622	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pendidikan							
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	98,96	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	9,24	9,36	
1.3	APK SD/MI	%	107,57	111,04	112,61	113,76	108,07	
1.4	APK SMP/MTs	%	91,06	91,49	97,90	97,78	91,46	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	82,21	85,54	90,31	87,93	99,51	
1.6	APM SD/ MI	%	95,91	96,70	97,00	97,13	97,43	
1.7	APM SMP/MTs	%	76,10	78,73	79,06	79,20	79,58	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	62,22	67,03	67,78	67,92	68,23	
2	Kesehatan							
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,70	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		177,21	157,22	177,00	135,00		
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		21,00	20,00	21,00	21,00		
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,90	3,70	3,70	0,10		
3	Ketenagakerjaan							
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,94	7,54	7,50	7,95	6,91	
Fokus Budaya dan Olahraga								
1	Kebudayaan							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	676	735	861	861		
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	17	17	17	17		

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
		uk						
2	Pemuda dan Olahraga							
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	55	97	97	101	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,46	99,33	99,63	99,54	99,67	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah							
	- SD Negeri	%	215,24	220,19	220,43	220,36	217,02	
	- SD Swasta	%	248,83	260,04	256,08	254,08	265,50	
	- MI	%	124,89	165,96	183,24	201,42		
1.1.3	Rasio murid terhadap guru							
	- SD Negeri	%	14	16,48	16,46	16,42	17,56	
	- SD Swasta	%	14	15,95	16,19	16,11	18,52	
	- MI	%	14	12,33	10,96	15,91		
1.2	Pendidikan menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 13-15 tahun	%	96,62	97,99	97,92	98,18	98,79	
	- 16-18 tahun	%	73,10	80,50	80,68	80,81	81,32	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah							
	- SMP Negeri	%	285,97	299,71	303,78	298,05	296,15	
	- SMP Swasta	%	148,51	155,96	157,32	154,89	162,41	
	- MTs	%	153,11	164,54	155,98	185,00		
	- SMA Negeri	%	371,26	370,11	395,19	399,5	454,84	
	- SMA Swasta	%	112,76	111,29	120,87	121,01	145,07	
	- MA	%	120,18	121,60	123,92	134,35		
	- SMK	%	264,04	291,87	332,01	327,75	358,07	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru							
	- SMP Negeri	%	13	15,60	16,51	16,22	16,99	
	- SMP Swasta	%	11	11,23	13,70	13,42	15,59	
	- MTs	%	11	9,63	10,18	12,20		
	- SMA Negeri	%	14	13,95	14,99	15,08	17,49	
	- SMA Swasta	%	8	7,38	10,72	10,71	14,58	

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
	- MA	%	8	6,69	7,27	9,24		
	- SMK	%	12	11,21	16,36	14,22	15,21	
1.3	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,17	0,15	0,00	0,00		
	- SMP/MTs	%	2,89	1,77	1,74	1,82		
	- SMA/SMK/MA	%	26,71	19,40	19,27	19,00		
1.4	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- SMP/MTs	%	99,72	100,00	100,00	99,99		
	- SMA/SMK/MA	%	99,63	99,96	100,00	99,93		
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	*	65,30	65,30	65,00		
2	Kesehatan							
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.38	4.097	4.036	4.124	3.895	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,40		
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,40	3,39		
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12		
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76		
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9		
2.8	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76		
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.584,13	1.181,45	
3.1.1	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	68,24	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	50,20	54,95	55,46	42,43	35,69	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	12.825	15.839,5	9.206	5.477		
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	91,09	76,19	*	*		

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
3.5	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	282	944	1.314	1.405,14	2.571,96	
4	Perumahan							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih	%	80,87	85,35	87,36	90,63	90,90	
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%	*	78,48	78,13	92,25	22,70*)	Tdk termasuk air kemasan/air isi ulang
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	91,09	76,19	61,3	69,9		
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	96,13	96,57	98,73	98,67	99,14	
4.5	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	unit	1000	350	365	150	2.689	APBD= 62 Unit APBN= 2.627 Unit
5	Penataan Ruang							
5.1	Penyelenggaraan tata ruang	Skor	64,83	67,83	69,14	72,14		
6	Perhubungan							
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.094	1.228	867	667		
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7,81	7,09	7,12	6,89		
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3.642.539	3.791.629	3.945.625	4.025.784	4.216.892	

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.593.269	3.955.136	3.693.028	*		
7	Lingkungan Hidup							
7.1	Indeks kualitas air sungai		7,59	3,04	2	3		
7.2	Penegakan hukum lingkungan	%	86,21	86,36	100	100		
7.3	Persentase sampah terangkut per hari	%	64,61	90,33	66,43	87,51		
8	Kependudukan dan Catatan Sipil							
8.1	Kepemilikan KTP	Orang	1.425.905	1.092.011	1.148.718	2.373.545	2.238.884	Semester 1 2017
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.351.261	695.301	1.071.135	3.441.731	1.511.591	Semester 1 2017
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	12,87	13,35	12,93	14,75		
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39,95	42,26	48,93	47,69	42,33	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.978	30.927	30.927	11.51		
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	67,46	70,29	65,51	69,86	70,61	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	70.336	76.76	59.807	70.832	71.027	
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	22,81	24,02	65,35	64,44	60,86	
11	Sosial							
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	
11.2	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7.368	7.296	7.296	7.256	5.469	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
12	Ketenagakerjaan							
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	
12.2	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,70	57,71	62,40	59,35	
13	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah							
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.847	5.546	5.184	Angka sement ara
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	360.733	423.267	445.682	452.309	452.309	Angka Semen tara
14	Penanaman Modal							
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18.441.377,30	12.983.049,70	9.611.313,10	6.885.124,6	10.980.216,4	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	1.181.859,20	1.285.215,2	
15	Kebudayaan							
15.1	Jumlah event budaya	Event	56	55	60	60		
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	161	162	165	165		
15.3	Jumlah museum	Unit	12	12	14	14		
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	1	2	2	2		
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	6	6	12	14		
16	Kepemudaan							
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.322	1.251	1.251	*		
17	Ketahanan Pangan							
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	74,43	68,89	67,62	75		
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
18.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masy. yang aktif	Unit	1.018	1.145	1.146	1.032		
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	826	161	*	*		
19	Statistik							
19.1	Publikasi “Kabupaten/Kota Dalam Angka”	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi “PDRB Kabupaten/Kota”	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
20	Komunikasi dan Informatika							
20.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95,34	96,27	97,12	100		
21	Perpustakaan							
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.743	1.819	1.830	2.014		
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.235	7.163	7.234	6.525	11.566	
22.2	Opini BPK		WTP	WDP	WTP	WTP		
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		68,00	72,32	76,65	75,00		
Fokus Urusan Pilihan								
1	Pertanian							
1.1	Produksi padi	Ton	439.439	426.567	408.782	305.337	649.360	Aram I
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	42,70	42,55	41,20	32,05		
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,62	7,00	7,50	8,06	7,96	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,23	0,24	0,20		
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,55	3,75	3,77	4,26		
2	Kehutanan							
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,13	1,16	1,33	1,34		
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,15	50,21	45,16	43,34	46,31	

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
4	Pariwisata							
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.912.661	3.941.979	4.320.025	5.547.435	7.244.659	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,72	0,84	0,91	0,93	
5	Kelautan dan Perikanan							
5.1	Produksi Perikanan	Ton	214.651,1	430.171	239.959,5	248.005		
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,19	1,30	1,50	1,55		
6	Perdagangan							
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,13	5,55	5,30	
6.2	Nilai ekspor	000 US	31.003.083	25.825.021	17.483.270	13.841.060	17.480.900	
6.3	Nilai impor	000 US	9.512.101	8.471.495	5.506.230	3.713.820	3.230.970	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	21.490.982	17.353.526	11.977.040	10.127.240	14.249.930	
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,96	19,32	20,61	20,51	19,07	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	5,96	6,33	7,34	7,78		
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508.706	508.801	549.351	587.920	663.485	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	143,92	145,86	146,46	144,83		

BAB II- Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27		
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.287	5.004	5.184	
2	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani	%	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan							
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M	7,81	7,09	7,12	6,89		
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
2.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	587	611	678		
2.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	542	349	667	695		
2.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	134	716	153	162		
3	Lingkungan Hidup							
3.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	90,90	
4	Komunikasi dan Informatika							
4.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.666.440	2.930.573	3.110.170	3.286.004	3.230.402	
4.2	Jumlah pelanggan listrik	Titik	663.582	736.594	791.553	842.003	904.937	
Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	30.892.361	37.872.765	39.379.342	1.180.049.251	28.202.100,08	
Fokus Sumber Daya Manusia								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63,12	53,74	55,96	*		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,69	84,75	85,07	*		
1.4	Rasio ketergantungan		46,20	45,76	45,28	44,83	42,23	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah) * : Data Tidak Tersedia

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 ini, evaluasi pembangunan masih menggunakan evaluasi RPJMD tahun ketiga yaitu tahun 2016. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2016 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Misi I, “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan pada evaluasi misi pembangunan ketiga (evaluasi RKPD 2016), dari 18 Program Prioritas dengan 30 indikator capaian kinerja, maka terdapat 5 (lima) indikator yang masih jauh dari harapan target pembangunan serta 3 (tiga) indikator yang mendekati target pembangunan (*on progress*) meskipun belum maksimal. Sementara 22 indikator lainnya telah menunjukkan pencapaian target (bahkan sebagian telah melebihi target yang ditetapkan). Jika ditinjau dari sisi implementasi programnya, dapat dikatakan bahwa 13 dari 18 Program Prioritas (atau 72,22%) telah mencapai target, dan hanya 11,11 persen dikatakan sedang menuju target dan selebihnya di bawah target. Penurunan anggaran (APBN dan APBD) serta kemampuan daerah mengatasi kendala geografis sangat penting untuk dipertimbangkan agar dapat menyempurnakan kinerja pembangunan berikutnya mengingat pada tahun ini masih banyak “pekerjaan rumah” yang belum rampung.

Misi II, “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan”, memiliki tantangan besar dalam pencapaiannya terlebih dengan upaya untuk mengupayakan target terbaru, yaitu sumber daya alam dan energi terbarukan. Misi kedua ini memiliki paling banyak program prioritas, yaitu mencapai 59 Program Prioritas yang harus dijalankan. Hasil evaluasi RKPD 2016 menunjukkan bahwa dari 61 indikator kinerja, ternyata 27 indikator diantaranya (44,26%) sudah menunjukkan pencapaian target, 14 indikator (22,95%) menuju target, dan sisanya 20 indikator (32,79%) belum mencapai target.

Ditinjau dari programnya, dapat disimpulkan bahwa dari 59 Program Prioritas terdapat 25 program telah mencapai target, 14 program menuju target, dan 20 program belum mencapai target. Namun demikian, dari beberapa angka capaian yang belum mencapai target masih bisa berubah mengingat angka capaian definitif untuk triwulan ke-IV yang belum disampaikan. Penekanan pada misi kedua ini adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas atau keterampilan pelaku sektor pertanian (yang memiliki cakupan luas), pengembangan kewirausahaan dan ekonomi alternatif (a.l. melalui penggalian potensi kepariwisataan) layak

dipertimbangkan karena sangat penting untuk meningkatkan kinerja perekonomian pembangunan di masa depan.

Misi III, “Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata”, merupakan misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan capaiannya, mengingat output-nya adalah infrastruktur fisik dan layanan jasa (a.l. transportasi dan komunikasi) yang sangat penting bagi kehidupan keseharian masyarakat.

Evaluasi RKPD 2016 terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja pembangunan untuk 14 Program Prioritas, sebanyak 6 indikator diantaranya (40,00%) mencapai target, 8 indikator (57,14%) di bawah target, dan 1 indikator tidak dianggarkan program kegiatannya. Cukup tingginya angka di bawah target pembangunan dikarenakan dua hal, yaitu:

- a. Persetujuan anggaran yang tidak memadai sehingga hanya sebagian kegiatan saja yang dapat dilaksanakan; dan
- b. Beberapa angka kinerja baru bisa diperoleh jika telah tuntas selama 4 triwulan.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya ditengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka telah direkomendasikan untuk lebih selektif dan realistis dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke kabupaten/kota.

Misi IV, “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik “, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat peran pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah pada berbagai tingkatan dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak optimal.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2016 khususnya misi keempat menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana dari 13 indikator kinerja capaian untuk 12 Program Prioritas, terdapat 11 indikator (84,61%) telah mencapai target sedangkan Program Prioritas yang belum mencapai target adalah program pengembangan data statistik dan spasial serta program peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Misi V, “Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim”, merupakan bagian dari upaya mendukung program global dan membawa Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi pelopor program-program prioritas dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil dari evaluasi capaian kegiatan pembangunan misi

kelima, dari 16 indikator capaian kinerja (16 Program Prioritas) terdapat 13 indikator (81,25%) telah mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja program sedang proses, dan 1 (satu) indikator program belum mencapai target.

Program yang belum menunjukkan kinerja memuaskan adalah penanaman kembali/rehabilitasi mangrove dan program-program konservasi ekosistem bernilai konservasi tinggi. Berbagai program konservasi ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti partisipasi para pihak non-SKPD termasuk dalam hal pasokan data yang masih rendah serta masih tingginya angka konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan/tenurial lahan. Koordinasi lintas sektor juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang sering kali menjadi tupoksi dari lembaga yang berbeda.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memiliki 19 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Sasaran pembangunan daerah tersebut memiliki 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering disebut *impact indicators* yang memiliki fungsi sebagai sebuah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap tahapannya.

Evaluasi sasaran pembangunan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2016 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2016 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang valid dan *up-date* sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016, didapatkan 16 dari 24 indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang sesuai dengan target sasaran sebesar 66,67 persen.

Capaian pembangunan jangka menengah fase ketiga ini memiliki beberapa kendala yang dirasa cukup berdampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam era pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait kondisi perekonomian daerah yang bergejolak dikarenakan imbas dari isu global perekonomian internasional. Selain itu, permasalahan sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus utama. Hal ini terlihat dari masih minimnya capaian pembangunan, berupa: penurunan tingkat kemiskinan yang

menjauh dari target, tingkat pengangguran yang belum optimal penanganannya, serta pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk pertimbangan kebijakan pembangunan kedepannya. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2017	Interpretasi
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	73,21	75.08	75.12	On Track
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	13.70	13.49	On Track
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,87	11.50	9.36	On Track
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	73.85	73.70	Melampaui Target
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6.10	6.19	On Track
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7.18	6.91	On Track
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.600	11.612	On Track
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	4+1	3,15	On Track
		Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	14,14	17,70	16,42	On Track
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,3341	0.320	0,330	On Track
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,25	0,5±1	3,13	On Track
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	1±1	4,04	On Track
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4±1	5,24	On Track
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	9	7,96	On Track
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44	4,87±1	5,70	Off Track
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	75	61,52	On Track

Sasaran		Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2017	Interpretasi
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	2	2,12	On Track
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6.80	7,00	Melampaui Target
15	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5.80	5.56	Melampaui Target
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Melampaui Target
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 ,00 (baik)	83,00	80,56	Melampaui Target
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	BB (78.00)	BB (77.50)	Melampaui Target
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi	Tinggi	Melampaui Target
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	81.99	82,64	Melampaui Target
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO ₂ /PDRB US \$ juta)	1.500	1,800	1,515	On Track

Sumber: Evaluasi RPJMD tahun ketiga, * data belum tersedia

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; (1) Sumatera 21,87 persen, (2) Jawa 58,15 persen, (3) Kalimantan 8,09 persen, (4) Sulawesi 6,15 persen, (5) Bali-Nusa Tenggara 23,22 persen, (6) Maluku 0,52 persen dan (7) Papua 2,01 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1:** Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pengurangan kemiskinan
 - 1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;

- 4) memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
- 1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) mencegah dan pengendalian penyakit
 - 4) mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
- c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- 1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
- 1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak;
 - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman;
 - 4) meningkatkan tata kelola layanan dasar
 - 5) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 6) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
dan
 - 7) mempercepat pencapaian SPM di daerah.
- 2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman**
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan konektivitas.
- 1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika.

- 1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi; dan
- 2) informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa.
 - 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
 - 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi;
 - 2) melaksanakan pembangunan konektivitas untuk pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan; dan
 - 3) Peningkatan produksi perikanan melalui konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
 - b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
 - c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
 - d. mendukung pembangunan optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
 - e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
 - f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
 - g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
 - h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
 - i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
3. **Prioritas Nasional 3:** Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
2. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
3. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
4. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
5. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

1. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 2. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 3. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 4. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
 5. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. **Prioritas Nasional 4:** Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. meningkatkan produksi energi primer;

2. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
3. meningkatkan aksesibilitas air;
4. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
5. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
6. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
7. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
8. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
9. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
10. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
11. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
12. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
13. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional keempat, antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan energi
Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
2. Pemenuhan kebutuhan pangan
Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
3. Pemantapan ketahanan sumber daya air
 - 1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan
 - 2) suplai air minum.
4. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan langkah untuk memingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5. Perencanaan pembangunan rendah karbon

Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber

- 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
- 2) menyelesaikan konflik sosial;
- 3) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
- 5) meningkatkan penanganan terorisme.

b. menjamin kesuksesan pemilu

- 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
- 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih; dan
- 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.

c. memperkuat pertahanan wilayah nasional

- 1) mengamankan wilayah yuridiksi nasional;
- 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan
- 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.

d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi

- 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
- 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
- 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
- 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.

e. memperkuat efektivitas diplomasi.

- 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri; 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
- 2) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan

3) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, dan hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2018, maka isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur ditandai oleh rasio tamat sekolah yang dimiliki oleh warga Kalimantan Timur. Jumlah penduduk yang tamat Perguruan tinggi sebesar 9,01%, yang tamat SLTA 32%, tamat SD 28,29%, dan yang belum tamat SD sebesar 16,03%. Rendahnya daya saing SDM Kalimantan Timur menjadi salah satu indikator kondisi daya saing daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumberdaya Manusia yang tinggi masih didominasi wilayah perkotaan, sedangkan diwilayah kabupaten masih rendah. Ada 3 kabupaten yang masih memiliki IPM di bawah angka 70,0 yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan berapa lama seorang siswa/i mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana pada tahun terakhir (2016) mencapai 9,24 tahun atau telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Mereka masuk dalam kategori lulusan SMP. Sedangkan dari sisi Harapan Lama Sekolah, pada 2016 telah mencapai angka 13,35 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai bekal memasuki dunia usaha.

Masih rendahnya daya serap tenaga kerja masyarakat Kalimantan Timur menjadikan indikasi bahwa belum terjadi sinkronisasi lulusan sekolah dengan pangsa pasar yang dibutuhkan. Dengan kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi oleh sector penggalian, industrialisasi, pertanian dalam areti luas dan sector usaha lainnya, maka sudah sepatutnya Pemerintah provinsi Kalimantan Timur menyiapkan tenaga didik dari vokasi untuk menjembatani kebutuhan pangsa kerja di Kalimantan Timur, sekaligus untuk mengurangi pengangguran terbuka di Kalimantan Timur.

Lulusan yang siap mengisi berbagai kegiatan ekonomi khususnya penciptaan industri kreatif dan berbasis teknologi maupun kerakyatan sangat diharapkan karena Kalimantan Timur

memiliki potensi pengembangan yang tinggi tanpa harus bergantung pada kegiatan ekonomi dasar yang bersifat ekstraktif sumber daya alam. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan situasi daerah dan kreasi di berbagai bidang, termasuk bidang usaha pariwisata, penemuan dan peningkatan produksi energi baru dan terbarukan, konservasi dan pengembangan jasa lingkungan, dapat mendorong pembangunan dan perekonomian daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan dan bidang ekonomi sangat kuat dan perlu kajian pengembangan pendidikan vokasional yang tepat dan berdaya guna

Selain peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pencegahan maupun pengobatan penyakit dan mendorong pola hidup sehat juga menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kaltim. Sebagaimana dijabarkan bahwa jumlah dan sebaran tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum tersedia secara merata dan maksimal di Kalimantan Timur. Untuk itu peningkatan kualitas pelayanan sejak bayi hingga lahir dan berkembang menjadi manusia dewasa sangat diperlukan, juga untuk meningkatkan angka harapan hidup, kesehatan ibu dan anak. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan promosi pemberdayaan masyarakat menuju hidup sehat serta standarisasi kualitas layanan kesehatan merupakan hal yang secara cepat harus dilakukan. Minimnya ketersediaan data di bidang kesehatan menyebabkan sulitnya untuk menentukan kebutuhan spesifik per daerah, termasuk ketersediaan data penyakit yang ditimbulkan akibat terjadinya gangguan lingkungan.

2. Transformasi Ekonomi Belum Sepenuhnya Berjalan Dengan Baik.

Komposisi PDRB Kaltim tahun 2016 di sektor tambang sebesar 43,34%, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 20,51%. Untuk Kabupaten/Kota kontribusi sektor tambang terbesar berada di kabupaten Kutai Timur sebesar 79,23% dan Paser sebesar 71,31%. Sedangkan untuk industri pengolahan terbesar berada di wilayah Bontang 83,96%, dan Balikpapan sebesar 47,62%. Rendahnya nilai industrialisasi dan pengolahan menjadi indikasi belum berprosesnya hilirisasi baik dari sektor tambang maupun dari sector pertanian kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Hilirisasi sebagai bagian dari produk tranformasi ekonomi di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong ekonomi Kalimantan Timur dengan pengendalian tingkat inflasi pada tingkat yang memadai. Pertumbuhan investasi di sector hilirisasi diharapkan mampu memicu hilirisasi ini.

Koperasi dan UMKM merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang terbukti memiliki ketahanan yang lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi. Penciptaan model ekonomi kreatif sangat diperlukan, diikuti dengan penyiapan SDM yang tepat. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah dapat ditingkatkan melalui bantuan peningkatan produktivitas, penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung, hilirisasi dan pemasaran pasca produksi. Demikian pula dengan berbagai program peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian guna mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau.

3. Infrastruktur Belum Optimal

Kebutuhan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat perputaran arus barang dan jasa serta perputaran manusia. Panjang jalan di Kalimantan Timur meningkat 62,06% sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dengan kondisi jalan 59% baik, 17,8% rusak sedang, 14,9% rusak, dan 8% rusak berat. Hampir semua jalan beraspal. Penambahan jalan Kabupaten/Kota mencapai prosentase tertinggi yaitu 24,53%, diikuti jalan Negara 14,54%, dan jalan provinsi 2,37%.

Infrastruktur yang optimal terutama untuk mendorong sector-sector yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi diharapkan mampu mendorong arus ekonomi dari desa ke kota dan sebaliknya dan dari dalam Kaltim dan keluar Kaltim. Konektivitas menjadi salah satu bentuk dampak dari keterbukaan keterisolasian dan penghubung system ekonomi dalam rangka upaya pemerataan pendapatan antar kabupaten/kota yang dapat menggerakkan sector lain seperti Pendidikan, kesehatan, dan migrasi.

4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Salah satu isu nasional dan global saat ini adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehingga tidak mampu menyajikan pelayanan prima. Kondisi sedemikian ini pada gilirannya dapat melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat termasuk buruknya kualitas (pengelolaan) kebijakan publik yang selaras dengan prioritas daerah.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tingginya kegiatan pembangunan ekonomi ekstraktif di Kalimantan Timur menyisakan pekerjaan di sector lingkungan hidup yang cukup besar. Pembangunan di kawasan rendah

karbon perlu dikembangkan sehingga emisi karbon dapat dicegah. Hutan sebagai icon Kalimantan Timur perlu dijaga kelestariannya dengan upaya-upaya pengurangan degradasi, deforestasi, dan mencegah illegal logging. Upaya-upaya ditingkat social dengan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan termasuk pemberdayaan perempuan juga dapat dilakukan dalam upaya pelestarian hutan di Kalimantan Timur. Pengendalian didaerah hulu dapat mencegah terjadinya kerusakan dihilir. Salah satu cara dalam mencegah banjir, tanah longsor, penyebaran penyakit, dan pengendalian sumber daya air adalah dengan cara menjaga kelestarian hutan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan sebuah perencanaan pembangunan daerah sebagai masa transisi peralihan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dimana pada periode pembangunan RPJMD saat ini telah berakhir pada tahun 2018. Sebagai tahapan pembangunan tahunan di masa transisi, RKPD 2019 dapat dikatakan sebagai langkah penghubung antara dua perencanaan pembangunan jangka menengah mengingat pelaksanaan RKPD tahun 2019 akan dilaksanakan pada periode pembangunan selanjutnya, namun rumusan perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan pada periode pembangunan 2013-2018.

Kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sehingga setiap penggunaan anggaran pembangunan menjadi penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholders* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (terutama pada pembangunan nasional).

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi *fiscal need*. Meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh dan *massive*. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Meskipun belum ada rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kalimantan Timur periode 2018-2023, namun rumusan perencanaan pembangunan 2019 diharapkan mampu memberikan sumbangsih optimal dalam pencapaian target yang akan ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nantinya. Oleh karena itu, rancangan kerangka ekonomi makro daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2019 untuk mewujudkan target pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*.

Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1.1. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Nasional

Pada perumusan kebijakan perekonomian pembangunan tahunan Kalimantan Timur tahun 2019 ini masih mengacu pada perencanaan pembangunan tahunan nasional tahun 2019 yang memiliki tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pada RKPD 2019, memiliki prioritas nasional dimana terdapat prioritas “Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif” yang fokus pada pembangunan perekonomian nasional. Selain itu, isu strategis yang berkenaan dengan pembangunan perekonomian nasional pada RKP 2019 adalah “Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif” dimana isu ini menjadi beberapa isu penting dalam pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur.

Prioritas nasional ketiga “Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif” memiliki 5 (lima) program prioritas nasional dimana setiap program memiliki kegiatan prioritas nasional. Berikut kelima program prioritas nasional pada pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2019:

- 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian,** dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan,** dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;
 - b. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung;
 - c. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan; dan
 - d. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik.
- 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif,** dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan;
 - b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
 - d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
 - e. Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan.
- 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
 - b. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;
 - c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi; dan
 - d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.
- 5. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas**, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas;
 - b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas;
 - c. Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa); dan
 - d. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier.

Mengingat RKP 2019 belum ditetapkan, untuk arah kebijakan yang lebih spesifik maka didekati dengan RKP 2018. Pendekatan ini dilakukan untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan daerah dengan nasional.

Perekonomian nasional ditargetkan mencapai 5,2-5,6 persen pada tahun 2018. Oleh karena itu, Pembangunan ekonomi pada tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen secara tematik, holistik, dan terintegrasi dengan memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam pembangunan nasional tahun 2018, terdapat 10 (sepuluh) sasaran dalam pembangunan perekonomian nasional yang memiliki arah kebijakan masing-masing. Berikut arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional:

1. Keuangan Negara

Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2018 kebijakan fiskal diarahkan sebagai berikut:

- a. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, antara lain pada: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalian potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan internasional dan pengefektifan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat;
- b. Pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran; (iii) refocusing belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (*Sovereign Wealth Fund*); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif untuk pembangunan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana ekonomi produktif, serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu;
- d. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i) peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam

mendanai kewenangan desentralisasi; (iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrument insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja; serta (v) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; dan

- e. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan pasar SBN domestic dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; dan (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

2. Stabilitas Harga

Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2018 kebijakan stabilitas harga diarahkan pada pengendalian komponen inti (core), harga bergejolak (volatile food), dan harga diatur pemerintah (administered price). Secara umum, arah kebijakan tersebut difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (v) penguatan kerjasama antardaerah; (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (vii) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi untuk dapat berdaya saing di pasar nasional dan global melalui peningkatan kapasitas usaha dan organisasi bagi pelaku UMKM dan koperasi, dan penyediaan produk berkualitas baik yang memadai bagi pasar nasional dan global. Strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil melalui perluasan akses dan jangkauan pemasaran usaha, pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi untuk sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, dan penguatan sistem bisnis bagi koperasi/sentra usaha mikro;
- b. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha melalui peningkatan modal usaha, peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan kredit usaha lainnya, dan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- c. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha KUMKM di daerah dan peningkatan kompetensi SDM KUMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pemagangan;
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi calon wirausaha baru melalui inkubator teknologi;
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan bagi SDM koperasi, peningkatan perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi BUM Desa dan kelompok usaha masyarakat dan peningkatan kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar/investor; dan
- f. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha melalui fasilitasi akta koperasi.

4. Perdagangan Dalam Negeri

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam RPJMN 2015-2019 sehingga perdagangan dalam negeri menjadi lebih efisien dan adil, yang ditempuh melalui: (i) penataan sistem distribusi dan logistik serta tata niaga bahan kebutuhan pokok dan penting; (ii) penumbuhan iklim usaha perdagangan; dan (iii) penguatan perlindungan konsumen.

Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, dengan fokus pada: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan terpadu pasar rakyat sesuai dengan kaidah di dalam SNI Pasar Rakyat; (ii) pembangunan dan pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) terutama bagi gudang yang telah over capacity dan

gudang yang sudah berdiri namun belum mengimplementasikan ataupun menerbitkan SRG, dan mengoptimalkan sinergi antara SRG dan pasar lelang; (iii) penyusunan konsep pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sesuai kebijakan di dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; (iv) pembangunan sarana perdagangan lainnya seperti bantuan sarana usaha bagi pedagang mikro, kecil dan menengah serta untuk mendukung kebijakan prioritas presiden, seperti gerai maritim, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan penting; dan (v) peningkatan partisipasi PEMDA, Swasta, BUMN, BUMD untuk berkontribusi pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Strategi ini juga akan mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan juga Pembangunan Wilayah;

- b. Pengelolaan manajemen informasi harga serta stok, yang akan dilakukan melalui: (i) penerapan sistem pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat yang telah mendapat pemberdayaan, pusat distribusi, dan sarana perdagangan lainnya termasuk Gerai Maritim; (ii) pemanfaatan sistem informasi harga dan stok bahan kebutuhan pokok untuk melakukan pengambilan kebijakan pengendalian harga terutama bagi bahan kebutuhan pokok, serta kebijakan impor pangan; (iii) melanjutkan kebijakan pembenahan tata niaga pangan; dan (iv) pengembangan perdagangan antar wilayah sebagai upaya mengendalikan harga dan pasokan terutama bahan kebutuhan pokok;
- c. Peningkatan upaya perlindungan konsumen, yang akan dititikberatkan pada: (i) penerapan strategi nasional dan aksi nasional perlindungan konsumen; (ii) pembenahan regulasi terkait metrologi legal, dan fasilitasi kelembagaan metrologi legal di daerah; dan (iii) pelaksanaan kebijakan tertib niaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. Pengembangan iklim usaha perdagangan, yang meliputi: (i) penerapan peta jalan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce); (ii) pengembangan kapasitas dan pembinaan PMKM agar dapat bermitra dengan pelaku ritel modern, dan menumbuhkan waralaba serta jumlah pelaku usaha dagang kecil terutama di luar Jawa; serta (iii) penyederhanaan perizinan atau pendaftaran usaha dan bantuan pembinaanguna mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan, baik konvensional, maupun berbasis elektronik.

5. Kerjasama Ekonomi Internasional

Dalam rangka mendorong terciptanya kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih selektif, dan dengan mengutamakan kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pada sektor perdagangan (ekspor), pariwisata, dan investasi, maka pada tahun 2018, kebijakan kerjasama ekonomi internasional difokuskan pada peningkatan: (i) koordinasi antar sektor dalam melakukan negosiasi di bidang kerjasama ekonomi internasional; (ii) peran serta Indonesia di bidang kerjasama ekonomi internasional dalam mendukung perekonomian nasional; serta (iii) fasilitasi pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan:

- a. Penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur;
- b. Pengoordinasian antar sektor dalam rangka menyelesaikan skema perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang masih dalam tahap negosiasi atau perundingan, terutama pada: (a) skema perjanjian kerjasama bilateral, yaitu: (i) *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*; (ii) *Indonesia-Chile Free Trade Agreement*; (iii) *Indonesia-Peru Free Trade Agreement*; serta (iv) *Indonesia-Turki Free Trade Agreement*; dan (b) skema kerjasama regional, yaitu: (i) persiapan implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025; dan (ii) *Master Plan of ASEAN Connectivity 2025*; serta (iii) skema kerjasama multilateral, yaitu: *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*;
- c. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) memperluas peran dan layanan, termasuk menambah jumlah *Free Trade Area Center*, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (ii) membangun database perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (iii) mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional; dan
- d. Analisa dan perumusan antisipasi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh Amerika Serikat, antara lain dengan menjajaki peluang membangun kerjasama perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, termasuk melakukan intensifikasi perdagangan dengan pasar-pasar prospektif lainnya di kawasan Asia dan Eropa.

6. Jasa Keuangan

Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan serta pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Peningkatan akses layanan jasa keuangan yang inklusif, transparan dan efisien melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyaluran bantuan dan transaksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan didukung oleh kerangka regulasi yang proporsional antar risiko, biaya, dan manfaat;
- c. Pengurangan kesenjangan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui:
(i) peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*); (ii) perluasan penggunaan tabungan dengan karakter *Basic Saving Account* (BSA), pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil;
- d. Penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan serta penguatan regulasi terkait dalam kerangka perlindungan konsumen dan pengaturan integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan keuangan; dan
- e. Pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui upaya untuk: (i) mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (ii) melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh KNKS kepada pemangku-pemangku kepentingan di bidang keuangan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha tentang keuangan syariah; (iii) meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program pemerintah dan sistem pembayarannya; (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, dan (v) mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

7. Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, pemasaran dan distribusi, konsumsi, hingga konservasi. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas SDM pelaku kreatif. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan analisis dan berpikir kreatif dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta bimbingan, pelatihan dan pendampingan;
- b. Pengembangan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan kepastian usaha dan kreasi (Hak atas Kekayaan Intelektual/HKI, formalisasi usaha, dan pajak), fasilitas riset, ruang kreatif, inkubator, insentif, akses permodalan, akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta peluang untuk membangun kemitraan dan investasi; dan
- c. Peningkatan akses pasar bagi produk kreatif di dalam dan luar negeri melalui penciptaan dan penguatan brand, fasilitasi untuk membuka pasar baru, dan fasilitasi kebijakan perdagangan juga diperlukan untuk perluasan pasar produk kreatif.

8. Badan Usaha Milik Negara

Arah kebijakan peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing yaitu:

- a. Meningkatkan peran BUMN dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pada sektor-sektor prioritas pembangunan;
- b. Meningkatkan kinerja BUMN (produktivitas, efisiensi biaya, dan profitabilitas); dan
- c. Melanjutkan upaya restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan perusahaan induk (holding).

9. Data dan Informasi Statistik

Kebijakan data statistik pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), serta konsisten (*coherent*); untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2018 akan diprioritaskan pada:

- a. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional, terutama prioritas nasional Ketahanan Pangan (program prioritas: pembangunan sarana dan prasarana pertanian) serta prioritas nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (program prioritas: pengembangan 3 kawasan pariwisata dari 10 destinasi wisata prioritas, perbaikan iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja;

- b. Pelaksanaan survei periodik yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: Pendataan Potensi Desa (Podes), Survei Biaya Hidup (SBH), Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), dan Pilot Survei Sensus Penduduk 2020;
- c. Penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta pengembangan sistem informasi indikator dan data TPB. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia;
- d. Pengembangan satu data nasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada: (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) peningkatan transparansi data; (iii) pembenahan layanan publik; (iv) pengembangan inovasi teknologi informasi; dan (v) peningkatan efisiensi, dengan mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data;
- e. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data; dan
- f. Peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

10. Ketenagakerjaan

Dalam upaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan pelayanan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan penyusunan grand design atau peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran;
- b. Menyelesaikan revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menekankan pada aspek perlindungan dan menyusun aturan turunannya;

- c. Menyempurnakan sistem informasi pekerja migran dengan menyelesaikan integrasi sistem informasi yang mencatat dinamika pekerja migran yang dimiliki oleh BNP2TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, dan pemerintah desa. Nomor Identitas Kependudukan (NIK) menjadi dasar integrasi sistem informasi pekerja migran ini;
- d. meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan bagi pekerja migran untuk meminimalisasi biaya transaksi, sehingga pelayanan menjadi mudah, murah, dan responsive; dan
- e. meningkatkan cakupan layanan informasi pasar kerja di daerah dengan pasar kerja luar negeri.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

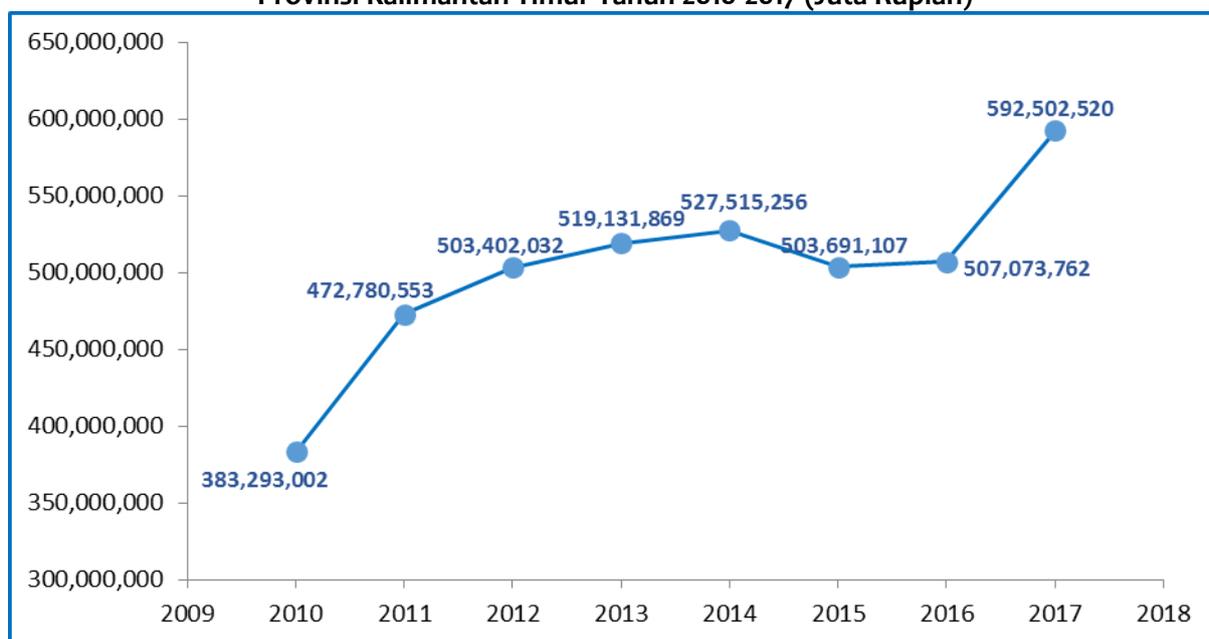
Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 9 (Sembilan) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi
- l. *Real Estate*
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503,69 trilyun. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan gambaran bahwa struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan

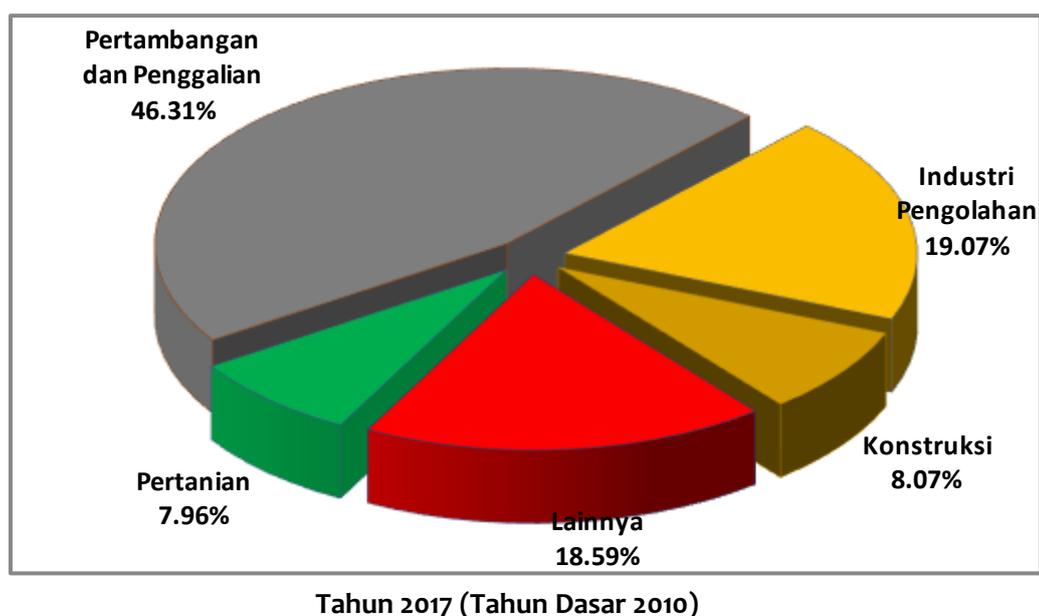
Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara. Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Seiring membaiknya harga minerba di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 507,07 trilyun dan Rp 592,50 trilyun.

B. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2017 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 46,31 persen dan industri pengolahan sebesar 19,07 persen. Peranan Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pada tahun ini mengingat selama tiga tahun sebelumnya mengalami penurunan secara berkala.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2017 memiliki kontribusi perekonomian wilayah sebesar 7,96 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbarui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)



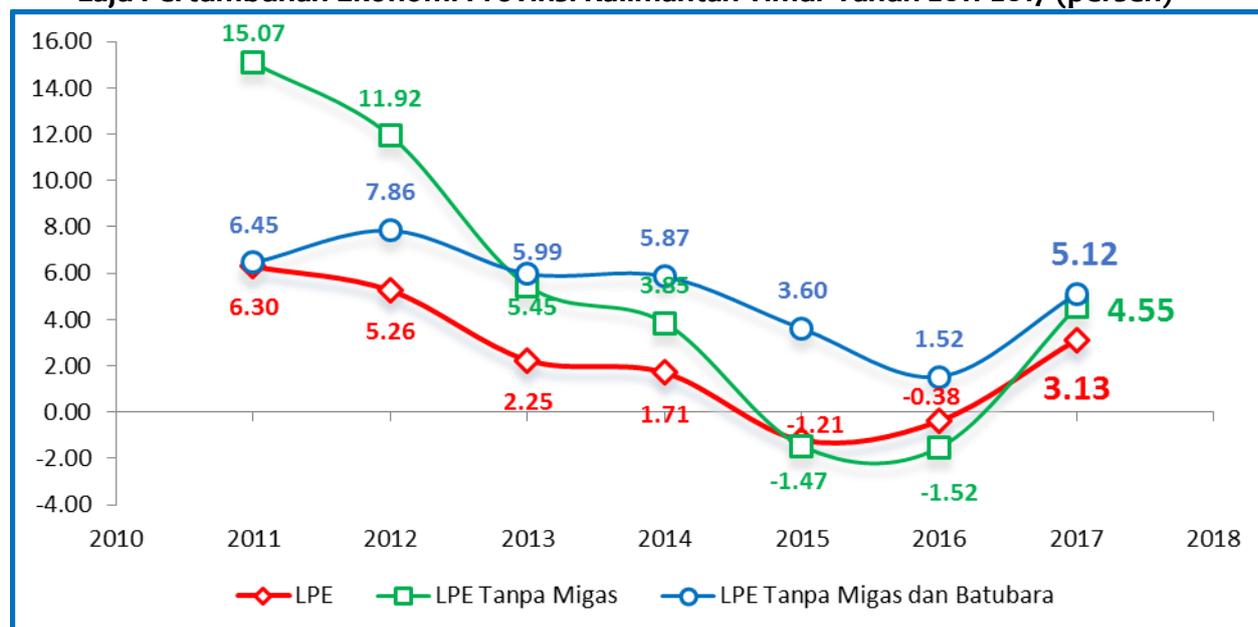
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Indikator tersebut digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah secara valid. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahan produksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2015 terus mengalami perlambatan di setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen, akibat menurunnya harga migas dan batubara dunia. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,47 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,60 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen. Hal ini tidak lepas dari tingginya share Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada struktur PDRB Kalimantan Timur terutama pada sektor migas dan batubara.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2017 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan.

D. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan

keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” pada hasil opini audit BPK. Opini BPK ini cukup memberikan perspektif keberhasilan dalam pelaksanaan administrasi terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pada tahun yang sama terdapat 9 (Sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan hanya kabupaten Berau dan Mahakam Ulu yang mendapatkan “Wajar Dengan Pengecualian”. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/kota sehingga capaian predikat terbaik pada opini BPK dapat diwujudkan.

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan -5,31. Ini menunjukkan turunnya pendapatan daerah sebagai akumulasi dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah. Kondisi menegaskan bahwa perekonomian Kalimantan Timur belum pulih dari keterpurukan ekonomi yang dialami sejak tahun 2015, meskipun ada sedikit peningkatan PDRB namun masih berjalan lambat.

Tabel 3.1
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata – Rata Pertumbuhan
I	Pendapatan Daerah	8.999.519.970.923	7.987.877.780.773	8.154.749.005.918	-5,31
1.	Pendapatan Asli Daerah	4.484.753.878.953	4.031.514.706.408	4.588.752.896.230	0,45
1.1	Pajak Daerah	3.753.718.935.815	3.127.250.928.433	3.505.578.072.170	-4,62
1.2	Retribusi Daerah	14.722.788.428	19,435,790,560	16.659.010.036	3,79
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	230.816.057.794	167.385.377.651	208.807.497.552	-9,03
1.4	Lain-lain PAD yang sah	485.496.096.914	717.442.609.764	857.708.316.470	24,34
2	Dana Perimbangan	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365	3.533.009.585.813	-6,83
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-50,03

BAB III- Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata – Rata Pertumbuhan
2.2	DAU	-	80.402.179.000	714.906.576.000	-
2.3	DAK	218.651.350.000	1.016.403.394.952	1.107.407.922.992	43,35
2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
3	Lain-Lain PAD yang sah	490.741.036.560	14.736.113.000	32.986.523.875	-1.587
3.1	Pendapatan Hibah	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-5,21
3.2	Dana Penyesuaian	479.336.143.560	5.000.000.000	7.500.000.000	-4.726
		-	-	15.048.587.875	-

Sumber: Data diolah

3.2.1.2. Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.2
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

NO	URAIAN	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.734.343.715.948	4,031,278,537,206	5.186.380.718.311	-9,99
5.1.1	Belanja Pegawai	942.463.194.421	874,380,273,544	1.453.137.226.055	16,02
5.1.4	Belanja Hibah	966.801.166.000	844,687,442,500	947.492.734.000	-1,80
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.410.500.000	3,459,990,000	4.187.500.000	-5,05
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.440.676.447.219	1,446,352,403,000	2.072.374.423.000	-19,27
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.376.558.162.630	861,148,428,162	709.171.909.856	-40,64
5.1.8	Belanja Tidak	3.434.245.678	1,250,000,000	16.925.400	-3.730

NO	URAIAN	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	Terduga				
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.964.706.259.506	3,569,963,801,653	3.053.286.350.781	-13,99
5.2.1	Belanja Pegawai	281.455.610.472	454,630,639,016	221.171.866.620	-33,73
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.776.168.500	1,543,518,535,349	1.893.779.099.403	4,45
5.2.3	Belanja Modal	1.994.474.480.532	1,571,814,627,287	938.335.384.758	-47,20
	Jumlah Belanja	10,205,342,292,212	7,601,242,338,859	8.239.667.069.093	-13,26
	Porsi Belanja Tidak Langsung (%)	56,19%	53,03%	62,94%	
	Porsi Belanja Langsung (%)	38,85	46,97	37,06	

Sumber : Data Diolah

Perkembangan penggunaan anggaran belanja daerah provinsi Kalimantan Timur untuk belanja tidak langsung dari tahun 2015-2017 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -9,99. Begitu pula untuk belanja langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -13,99. Belanja daerah menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang menurun sejak tahun 2015, namun diharapkan akan sedikit membaik di tahun 2018 mengingat pertumbuhan PDRB Kaltim di kuartal ke-4 tahun 2017 tumbuh positif.

Tabel 3.3
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1.	2013	1.696.672	12.900.000	13,15%
2.	2014	1.587.234	12.217.683	12,99%
3.	2015	1.223.918	9.699.058	12,19%
4.	2016	1.329.010	7.601.242	17,48%
5.	2017	858.931	6,068,623	14,15%

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,36 persen hingga 17,48 persen pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan menjadi 14,15 persen pada tahun 2017. Selain disebabkan total penerimaan daerah yang terus menurun, yang disebabkan karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan

pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti: honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
A.	Belanja Tidak Langsung	3.063.571	3.617.431	3.289.765	2.252.577	1.365.438	-26,42
1	Gaji dan Tunjangan	465.048	467.878	414.013	414.233	858.931	9,86
2	Tambahan Penghasilan PNS	323.347	354.834	421.576	380.197	491.815	9,13
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	13.621	15.268	13.482	11.795	14.692	0,74
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	2.261.555	2.779.451	2.440.676	1.446.352	2.072.374	-8,54
B.	Belanja Langsung	48.227	48.227	194.396	212.990	380.500	-163,71
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	-	-	-	-	58.823	-
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	28.695	37.765	18.040	17.735	13.807	-477,00

BAB III- Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan
7	Belanja Jasa Kantor	19.532	23.914	57.891	90.979	250.569	44,27
	- Belanja Air	4.645	4.914	4.230	4.366	6.698	-232,78
	- Belanja Listrik	5.302	6.281	32.730	33.199	27.376	-1,86
	- Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.485	4.336	2.891	33.199	701	-1143,75
	- Belanja Kawat /Faksimili/ Internet	6.100	14.105	6.626	8.316	6.665	15,14
	- Belanja Sewa Gedung	-	-	11.414	11.899	10.486	-
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	10.574	13.297	5.375	-
C.	Pembiayaan pengeluaran	-	-	50.000	-	-	-
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2.521.950	2.847.842	3.131.330	3.665.658	1,745,938	-18,72

Sumber : Data Diolah

Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2013-2017 dapat dijelaskan antara lain:

1. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2013-2017 adalah sebesar 1,80 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
2. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung menurun sebesar 26,42 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan penurunan ini disebabkan karena kecenderungan penurunan semua unsur belanja tidak langsung pada tahun 2016, terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan, baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
3. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung turun sebesar 163,71 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung ditahun 2016 cenderung menurun.

3.2.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
1.	Pendapatan	11.631.697	11.287.300	8.999.519	7.987.877	8.154.749	-9,77
Dikurangi Realisasi							
2.	Belanja Daerah	13.780.244	11.274.631	9.699.049	7,601,242	8.239.667	-14,58
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000	50.000	-	-	
Defisit Riil (Realisasi)		(2.148.547)	(12.330)	(749.530)	386,635	(84,918)	-43,345

Sumber : Data Diolah

Defisit riil anggaran tahun 2013-2017 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -43,345 dan SiLPA memiliki rata-rata pertumbuhan dari tahun 2013-2017 sebesar -56,53, yang artinya SiLPA semakin berkurang dari tahun ke tahun. Adanya sisa anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di tahun berikutnya sehingga dapat mengurangi defisit riil untuk anggaran.

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.050.356	1.038.125	287.098	613.319	526.248	-56,53
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	
3.	Pelampauan penerimaan lain-	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
	lain pendapatan daerah yang sah						
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	1.050.356	1.038.125	287.098	613.319	526.248	-56,53
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-				

Sumber : Data Diolah

SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. SILPA juga mengindikasikan jumlah anggaran yang tidak terserap pada anggaran tahun sebelumnya. Artinya bahwa SILPA juga mengindikasikan *unefisiensi* anggaran pada tahun sebelumnya. Besarnya SILPA pada tahun 2017 sejumlah Rp. 526.248.000.000 menunjukkan bahwa terjadi tidak terserapnya sejumlah anggaran tersebut, ditengah-tengah tuntutan peningkatan pembangunan yang membutuhkan banyak dana. *Unefisiensi* ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan dari anggaran yang akan didapat oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya. Oleh karenanya efisiensi anggaran ditahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2019 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2013-2017), dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode pembangunan tahun 2019.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.

3.2.1.4. Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Tahun 2018-2019 Provinsi Kalimantan Timur

URAIAN	APBD	Rencana
	Tahun 2018	Tahun 2019
PENDAPATAN	8.366.250.000.000	7.602.000.000.000
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.281.264.186.000	4.684.546.971.000
I. Pajak Daerah	3.320.000.000.000	3.629.350000.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor	788.000.000.000	802,000,000,000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	575.000.000.000	610.000,000,000
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan	1.750.000.000.000	2.000,000,000,000

URAIAN	APBD	Rencana
	Tahun 2018	Tahun 2019
Bermotor		
d. Pajak Air Permukaan	7.000.000.000	7,350,000,000
e. Pajak Rokok	200.000.000.000	210,000,000,000
II. Retribusi Daerah	25.838.100.000	19,713,590,000
a. Retribusi Jasa Umum	11.580.000.000	8,832,790,000
b. Retribusi Jasa Usaha	13.267.100.000	10,295,800,000
c. Retribusi Perizinan Tertentu	991.000.000	585,000,000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	217.297.204.481	244,861,640,000
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	718.128.881.519	790,621,741,000
B. DANA PERIMBANGAN	4.048.252.814.000	2.908.010.000.000
I. Bagi Hasil Pajak	680.000.000.000	693.560.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	325.000.000.000	302.060.000.000
b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29	355.000.000.000	391.500.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.482.779.786.000	1.454.450.000.000
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.400.000.000	12.500.000.000
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH)	-	-
c. Landrent	19.500.000.000	23.750.000.000
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti)	693.754.084.000	1.018.500.000.000
e. Minyak Bumi	150.000.000.000	146.200.000.000
f. Gas Bumi	440.000.000.000	172.300.000.000
g. Dana Reboisasi	167.125.702.000	81.200.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya	1.339.620.357.000	760.000.000.000
a. Dana Alokasi Umum	767.682.423.000	760.000.000.000
b. Dana Alokasi Khusus	1.117.790.605.000	-
c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	865.320.605.000	-
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.733.000.000.00	9.443.029.000
I. Pendapatan Hibah	11.982.312.125	9.443.029.000
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	-	-

Sumber : Data Diolah

3.2.1.5. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penetapan APBD 2018 dan proyeksi 2019 Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	Penetapan APBD 2018	Proyeksi 2019
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,193,673,675,886	4.016.895.301.456
5.1.1	Belanja Pegawai	1,672,792,329,286	1.771.179.951.456
5.1.4	Belanja Hibah	1,055,451,599,600	117.714.200.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,500,000,000	5.500.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (dengan Kurang salur 2018)	1,890,570,835,000	2.090.046.750.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	551,858,912,000	7.454.400.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	17,500,000,000	25.000.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,372,576,324,114	3,585,104,698,544
5.2.1	Belanja Pegawai	215,026,293,328	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,629,786,519,852	-
5.2.3	Belanja Modal	1,527,763,510,934	-
Jumlah Belanja		8,566,250,000,000	7.602.000.000.000
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		60,63	52,84
Proporsi Belanja Langsung (%)		39,37	47,16

Sumber : Data Diolah

3.2.1.6. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Penetapan dan proyeksi belanja wajib dan mengikat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2018-2019

No	Uraian	Target 2018	Target 2019
A.	Belanja Tidak Langsung	5,193,673,675,886	4.016.895.301.456
1	Gaji dan Tunjangan	1,672,792,329,286	1.771.179.951.456
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.upaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,890,570,835,000	2.090.046.750.000
3	Belanja Hibah dan Bansos wajib	1,060,951,599,600	123,214,200,000
4	Belanja bantuan parpol	551,858,912,000	7.454.400.000
5	Belanja Tidak Terduga	17,500,000,000	25.000.000.000
14	Pilkada	286.000.000.000	-
B.	Belanja Langsung	2,337,839,770,930	1,532,256,010,534
1	Belanja MYC	1.570.015.241.030	-
	a) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	727.946.410.516	-
	b) Pembangunan Bandara Samarinda Baru	109.029.690.850	-

No	Uraian	Target 2018	Target 2019
	c) Pembangunan Jembatan Mahakam 4	125.391.838.460	-
	d) Pembangunan Jalan mendekati Perekat Jembatan	393.466.415.730	-
	e) Pembangunan SPAM Maloy	120.163.363.000	-
	f) Pembangunan Pipa transmisi Sekerat Maloy	95.210.622.474	-
2	Belanja BLUD	602.000.000.000	685.600.000.000
	a) RSUD AWS Samarinda	378.000.000.000	454.000.000.000
	b) RSUD Kanujoso Djatiwibowo	204.000.000.000	208.000.000.000
	c) UPTD Lab.Kes Dinkes	4.000.000.000	5.500.000.000
	d) RSJD Atma Husada	16.000.000.000	18.000.000.000
3	Dana Reboisasi dan Pendampingan, dana operasional Retribusi/Perangkat Daerah	165.824.529.900	498,313,076,659
4	Belanja Wajib Tenaga Pendidik & Kependidikan, Beasiswa	-	210,921,200,000
5	Kesehatan & Penegakan Hukum dari Pajak rokok	-	30.555.000.000
6	BL BOSDA	-	106.866.733.875
C.	Pembiayaan pengeluaran		
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaran Pokok Utang		
3	Kewajiban Pinjaman Daerah		
	Total	7,531,513,446,816	5.549.151.311.990

3.2.1.7. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2019 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian daerah dan Nasional, regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor

potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2018-2019 seperti tabel berikut:

Tabel 3.10
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2018-2019

No	Uraian	Target	
		Penetapan Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019
1.	Pendapatan	8.366.250.000.000	7.602.000.000.000
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-
	Total Penerimaan	8.366.250.000.000	7.602.000.000.000
	Dikurangi		
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	7,531,513,446,816	5.549.151.311.990
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	834,736,553,184	2,052,848,688,010

Sumber : data diolah

3.2.1.8. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.11
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2018-2019

No	Uraian	Jumlah	
		Penetapan Tahun 2018	Rencana RPJMD Tahun 2019
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000	-
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	200.000.000.000	-
2.	Pencairan dana cadangan		
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman		
6.	Penerimaan Piutang Daerah		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-

BAB III- Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

1.	Pencairan Dana Cadangan		
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah		
3.	Pembayaran pokok utang		
4.	Pemberian pinjaman daerah		
	PEMBIAYAAN NETTO	200.000.000.000	-

Sumber: Data diolah

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2019 merupakan tahapan transisi periodisasi RPJMD IV Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2018-2023) di mana dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 didasarkan pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2014-2019.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur sebagaimana tercantum pada RPJMD dari tahun ke tahun maka disusunlah sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Meskipun prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya.

Mengingat RKPD 2019 disusun dalam masa peralihan, maka prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana akan diamanatkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai

perkembangan pembangunan saat ini. Adapun, kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 dan menjadi dasar atau acuan dalam mencapai visi dan misi Gubernur terpilih untuk periode 2018-2023 melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2019;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2019; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahapan terpenting dalam penyusunan RKPD adalah tahap penetapan tujuan dan sasaran karena akan menentukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. *Tujuan* ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

a. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pemerintahan Republik Indonesia periode 2015-2019 mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan modal dasar bagi pemerintah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, Trisakti dijabarkan kedalam tiga bidang yaitu:

1. *Berdaulat dalam bidang politik* antara lain dalam hal: memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah; memberdayakan Desa; melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat; Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan; dan berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2. *Berdikari dalam bidang ekonomi* yang antara lain guna mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia; penguasaan sumber daya alam guna membangun kedaulatan pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan dan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional; membangun pemberdayaan buruh; membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional termasuk penguatan investasi sumber domestik dan kapasitas fiskal negara; penguatan infrastruktur; pembangunan ekonomi maritim; penguatan sektor kehutanan beserta tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan melalui perimbangan pembangunan kawasan; membangun karakter dan potensi pariwisata; mengembangkan kapasitas perdagangan nasional; dan pengembangan industri manufaktur.
1. *Berkepribadian dalam bidang kebudayaan* melalui perwujudan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa; memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial; serta membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Ketiga amanat Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah demi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa serta terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan agenda-agenda prioritas guna memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019:

VISI:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

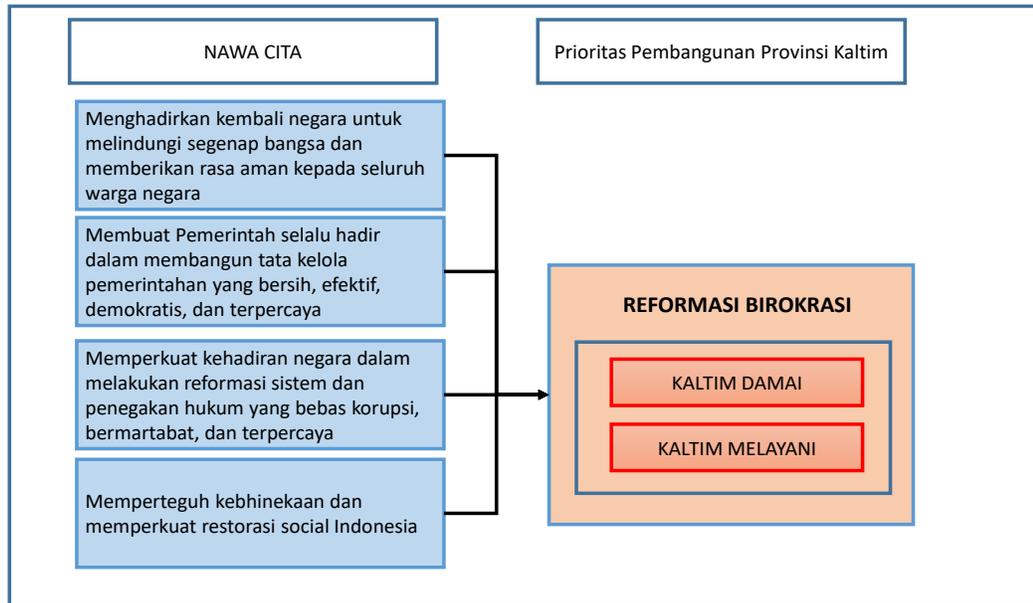
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

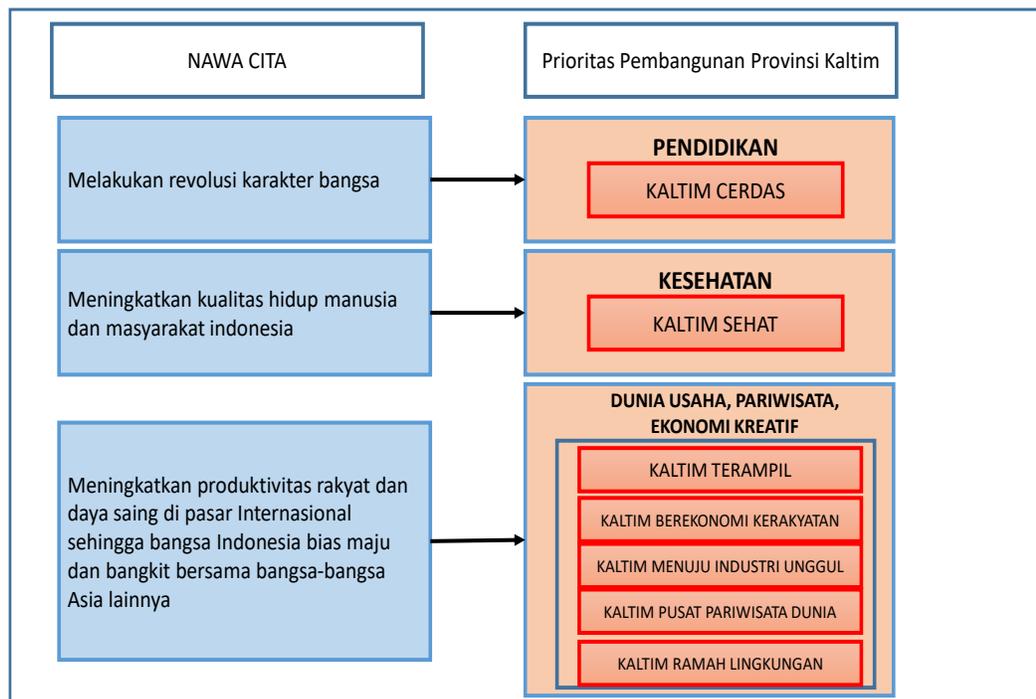
Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2019 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pula dari arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

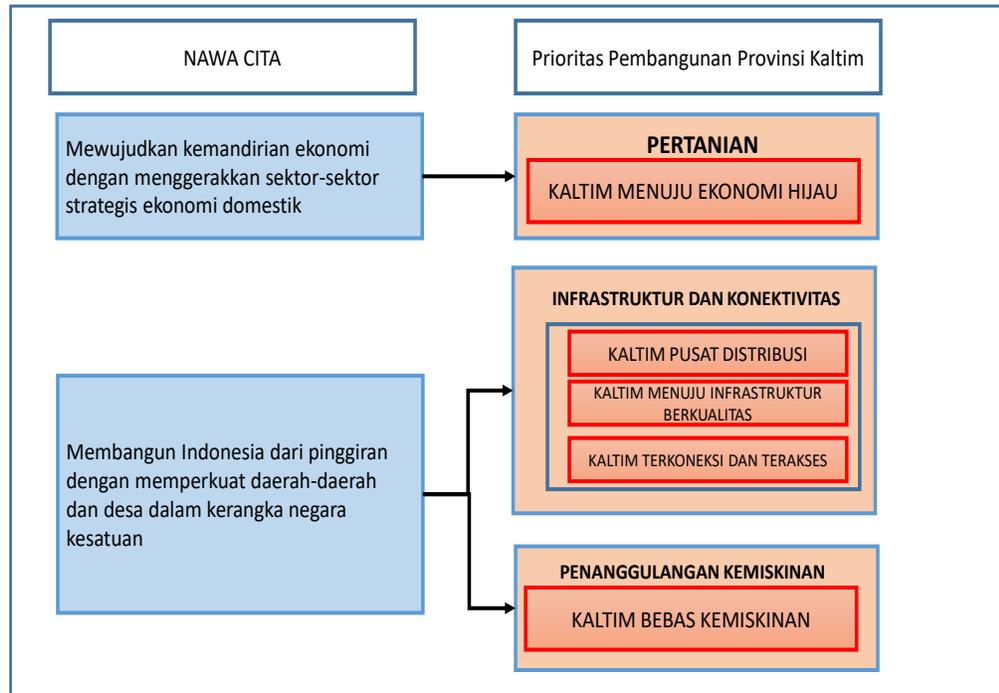
Gambar 4.1.A
Keterkaitan Nawa Cita (Agenda Nasional) dan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Gambar 4.1.B
Keterkaitan Nawa Cita (Agenda Nasional) dan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Gambar 4.1.C
Keterkaitan Nawa Cita (Agenda Nasional) dan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



b. Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019

Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam merumuskan perencanaan daerah Kalimantan Timur adalah memerhatikan Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 dengan tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan”. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi.

3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
- (b) penyediaan infrastruktur wilayah,
- (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun inti dari sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan,
2. mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kalimantan yang dilakukan dengan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan melalui: (a) peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) penurunan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.
3. mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan,
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri, serta meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

5. mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
6. meningkatkan proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45 persen untuk propinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP); meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan; meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70 persen; terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran termasuk Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki fungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat yang dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Wilayah Pulau Kalimantan.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan di atas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki maka besaran target pembangunan Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Target Kalimantan Timur dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019

No	Sasaran Nasional	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,5	5,6	5,6	6,4	7,0
2	Tingkat Kemiskinan	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5
3	Tingkat Pengangguran	8,4	8,0	7,6	7,2	6,9

Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara, baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Adapun sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran	Target Tahun 2019	
		Nasional	Provinsi Kalimantan Timur
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,0	2,5 ± 1
2	Tingkat Kemiskinan	3,5	6,12
3	Tingkat Pengangguran	6,9	6,51

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2019. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. Tema RKP 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang menitikberatkan pada penguatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spatial (THIS).

“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2019, dijabarkan dengan prioritas Nasional dan Program Prioritas pembangunan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Program Prioritas:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak
- e. Peningkatan tata kelola layanan dasar

2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.

Program Prioritas:

- a. Peningkatan konektivitas dan TIK
- b. Peningkatan sistem logistik
- c. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
- d. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat
- e. Penanggulangan bencana

3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.

Program Prioritas:

- a. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
- b. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
- c. Peningkatan nilai tambah jasa produktif
- d. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
- e. Pengembangan iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas

4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.

Program Prioritas:

- a. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
- b. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan
- c. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sumber daya air
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Program Prioritas:

- a. Kamtibmas dan keamanan siber
- b. Kesuksesan pemilu
- c. Pertahanan wilayah nasional
- d. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
- e. Efektivitas diplomasi

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Teknokratik 2018-2023. Prioritas dan sasaran dirumuskan sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan memerhatikan kebijakan nasional. Keselarasan antara

kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dalam kerangka permasalahan dan isu strategis daerah dan dalam kerangka terwujudnya visi RPJMD Teknokratik, yaitu **Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif.**

Sebagaimana telah dijelaskan, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Teknokratik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Dengan demikian, sasaran RPJMD Teknokratik untuk target pencapaian tahun 2019 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2019, sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kualitas SDM yang mandiri dan berdaya saing.

SDM yang unggul/berkualitas merupakan modal penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDM yang unggul perlu pengembangan pendidikan dan kesehatan yang merata di Provinsi Kaltim. Perhatian khusus diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemampuan bersaing dengan tenaga kerja, baik regional maupun nasional, bahkan untuk mengantisipasi dimulainya keterbukaan ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi Asia, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing untuk mengisi pasar tenaga kerja Asia. Selain pendidikan formal umum, maka pendidikan formal kejuruan maupun vokasi kejuruan juga dapat didorong untuk mempercepat penyiapan SDM yang tepat sasaran. Namun, untuk mewujudkan itu semua penting dibangun komitmen bersama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai kondisi pemungkin diselenggarakannya pembangunan. Misi pertama ini memiliki tujuan:

- 1) **Meningkatkan kondusivitas sosial budaya**, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) **Meningkatkan kualitas SDM**, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya kualitas Pendidikan.
 - (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - (3) Meningkatnya daya saing tenaga kerja.

2. Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan

Hilirisasi industri dan penguatan transformasi ekonomi menjadi kata kunci perbaikan ekonomi Kalimantan Timur ke depan. Hal ini didukung dengan pertumbuhan positif sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sarana informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, di mana kesemuanya sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan perekonomian Kalimantan Timur tanpa sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumber daya alam yang tidak terbarukan khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, pembangunan yang dilakukan masih belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan mutlak diperlukan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dapat dilakukan melalui pengembangan kebun rakyat yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Langkah ini akan meningkatkan nilai tambah bruto sektor perkebunan, meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan cadangan karbon. Misi kedua ini memiliki tujuan:

- 1) **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**, dengan sasaran:
 - (1) Menurunnya tingkat kemiskinan.
 - (2) Menurunnya tingkat pengangguran.
- 2) **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan**, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya usaha mikro dan menengah pada sektor pertanian dalam arti luas.
 - (2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian.
 - (3) Meningkatnya kontribusi sektor industri.
 - (4) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa.
 - (5) Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata.

3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ke depan. Misi ketiga ini memiliki tujuan:

- 1) **Mewujudkan infrastruktur daerah yang handal untuk menunjang kemandirian ekonomi daerah**, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar.
 - (2) Meningkatnya arus barang dan jasa.
 - (3) Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik

Salah satu isu nasional dan global saat ini adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehingga tidak mampu menyajikan pelayanan prima. Kondisi sedemikian ini pada gilirannya dapat melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat termasuk buruknya kualitas (pengelolaan) kebijakan publik yang selaras dengan prioritas daerah. Misi keempat ini memiliki tujuan:

- 1) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani**, dengan sasaran:
 - (1) Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN.
 - (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

5. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan yang memiliki kekayaan alam melimpah, Provinsi Kaltim harus memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Setiap pengembangan wilayah perlu memerhatikan keberlanjutan kawasan demi terjaganya keberlanjutan lingkungan. Selain

itu, produksi kayu tebangan maupun kayu olahan juga tetap berlangsung di Kalimantan Timur yang diproduksi dari IUPHHK-Hutan Alam, IUPHHK-Hutan Tanaman dan IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat. Ketentuan pengelolaan hutan lestari dan keberlanjutan sumberdaya hutan, diantaranya melalui perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan pembalakan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging/RIL*) harus menjadi prioritas setiap program pemerintah agar target pemerintah untuk mengembalikan kelesatrian lingkungan dan penurunan emisi dapat tercapai. Pemanfaatan potensi sumberhutan berbasis kayu harus diarahkan pada penciptaan nilai ekonomi konservasi dan jasa lingkungan, termasuk dalam hal ini menjadi salah satu alternative supply energi baru/terbatukan.

Kegiatan pertambangan batubara pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Kaltim dengan menggunakan metode “Penambangan Terbuka” (*Open Pit*) berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti: perubahan/kerusakan bentang alam, peningkatan partikel debu, peningkatan laju erosi, sedimentasi dan limpasan air permukaan, serta pendangkalan dan pencemaran sungai, penurunan kualitas udara, air dan tanah/lahan, terganggunya habitat flora fauna, serta biota perairan, dan terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan ditengarai juga dapat menopang terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, penertiban dan penerapan *good mining practices* sangat mendesak dilakukan. Misi kelima ini memiliki tujuan:

- 1) **Melestarikan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan,** dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Hidup.
 - (2) Meningkatnya indeks tutupan hutan.
 - (3) Menurunnya tingkat emisi GRK.
 - (4) Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan.

Keselarasan antara Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan dalam RPKD 2019 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Visi dan Misi Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023

VISI: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target 2019
Misi I: Menyiapkan SDM yang Unggul dan Siap Pakai				
1	Meningkatkan kondusivitas sosial budaya	Angka Kriminalitas		
	1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Kasus Kriminal		
2	Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2 Meningkatkan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)		
		Rata-rata lama sekolah (tahun)		
	3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)		
4 Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja			
Misi II : Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan				
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (juta Rp/Jiwa)		
	5 Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)		
	6 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (persen)		
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan	Laju pertumbuhan PDRB		
	7 Meningkatkan usaha mikro dan menengah pada sektor pertanian dalam arti luas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)		

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

	8	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persen)		
	9	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)		
	10	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (persen)		
	11	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)		
Misi III : Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah					
5		Mewujudkan infrastruktur daerah yang handal untuk menunjang kemandirian ekonomi daerah	Persentase Desa/kelurahan yang sudah terakses infrastruktur dasar (jalan, listrik dan air bersih)		
	12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen) Tingkat elektrifikasi (persen)		
	13	Meningkatnya arus barang dan jasa	Indeks Gini		
	14	Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika	Jumlah kawasan/daerah yang terakses/terkoneksi		
Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik					
6		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		
	15	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN	Opini Badan Pemeriksa Keuangan		
	16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM Provinsi Kalimantan Timur		
	17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Provinsi		
Misi V : Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup					
7		Melestarikan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	IKLH		

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

18	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Hidup	Status pencemaran air		
		Status pencemaran udara		
19	Meningkatnya indeks tutupan hutan	Indeks tutupan lahan		
20	Menurunnya tingkat emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari tingkat BAU (ton CO ₂ eq)		
21	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	% Bauran Energi Baru Terbarukan		

Secara ringkas keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023 dengan Prioritas Pembangunan RKPD 2019 adalah sebagai berikut:

Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023	Prioritas Pembangunan RKPD 2019
VISI: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Adil, Aman, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif	
Misi 1: Menyiapkan SDM yang Unggul dan Siap Pakai	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja
Misi 2: Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan	Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri, dan Outlet
Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Misi 5: Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan

Atas sandingan tersebut dan berdasarkan penajaman atas kinerja pembangunan periode sebelumnya, maka tema yang diangkat dalam RKPD 2019 adalah **“Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”**.

Tabel 4.4
Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2019

TEMA: MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPEREPAT HILIRISASI INDUSTRI				
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target 2019
Tujuan 1: Meningkatkan Daya Saing SDM				
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)		
		Harapan lama sekolah (tahun)		
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)		
Tujuan 2: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah				
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)		
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB		
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa pada PDRB		
Tujuan 3: Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur daerah masyarakat dan daya saing investasi				

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

3	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Panjang jalan dilalui roda 4 (provinsi)		
		Rasio elektrifikasi		
		Persentase rumah tangga menurut sumber air bersih dan sumber air layak minum		
		Cakupan layanan telekomunikasi		
Tujuan 4: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik				
4	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Terwujudnya stabilitas dan penerapan SPM sesuai dengan mutu dan jenisnya	Predikat Akuntabilitas Kinerja		
		Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan bersih	Indeks Persepsi Korupsi			
Tujuan 5: Melestarikan Lingkungan Hidup				
5	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Hidup.			
	Meningkatnya indeks tutupan hutan.			
	Menurunnya tingkat emisi GRK			
	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan.			

Keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan RKPD 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5
Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan Pembangunan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T
			Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di daerah 3T
			Pengembangan dan peningkatan pendidikan kejuruan dan vokasi sesuai dengan kebutuhan
			Peningkatan sarana dan prasarana SMK
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Penanganan keluarga/anak miskin
			Peningkatan status sosial kehidupan keluarga miskin
			Pembentukan kelompok usaha masyarakat miskin
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja
			Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga penelitian

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

			Perluasan kerja padat karya
			Pengembangan dan pelatihan kewirausahaan yang kompetitif
			Peningkatan produktivitas dan keterampilan pencari kerja
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penanganan keluarga/anak miskin
			Peningkatan status sosial dan kehidupan keluarga miskin
			Pembantuan kelompok usaha masyarakat miskin
5	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa	Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengembangan sarana dan prasana pada KEK Maloy
			Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut dan SDP
			Penguatan kerangka regulasi dan perijinan lahan
			Pengembangan Sumber Penyediaan Air Baku di Kawasan Industri
6	Meningkatnya kontribusi sektor		Pengembangan kebun induk sebagai sumber benih

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi perkebunan
		Penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola hasil hutan dan Insentif bagi usaha hilirisasi sektor kehutanan
		pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap ikan ramah lingkungan
		Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang unggulan
		Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
		Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan
		Peningkatan varietas benih padi lokal unggulan
		Optimalisasi sentra produksi padi di lahan yang tidak produktif
		Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi
		Peningkatan ketahanan pangan
		Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

7	Meningkatnya kemandirian pangan		Peningkatan varietas benih padi lokal unggulan
			Optimalisasi sentra produksi padi di lahan yang tidak produktif
			Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi
8	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Peningkatan nilai tambah dan rantai nilai industri unggulan	Operasionalisasi kawasan industri secara maksimal
			Pengembangan industri pertanian
			Perbaikan iklim dan kemudahan perijinan investasi
			Pengembangan industri turunan perkebunan (sawit)
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa		Pengembangan industri olahan skala mikro kecil (rumah tangga)
			Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Klaster
10	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata	Peningkatan pengelolaan pariwisata	Mewujudkan destinasi Kaltim bertaraf internasional
			Peningkatan pemasaran pariwisata yang intensif, inovatif dan interaktif
11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi Kawasan Industri dan Outlet	Pengembangan pelayanan listrik di daerah 3T
			Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mendukung hilirisasi di kawasan strategis

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

			Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah 3T Revitalisasi Terminal Penumpang tipe B Pengadaan fasilitas untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas jalan provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat Pemenuhan kebutuhan air minum tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir
		Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika	Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika. Peningkatan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan teknologi informatika
12	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi	Pembinaan, penataan, dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah
13	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN		Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja aparatur

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

	Terwujudnya akuntabilitas dan penerapan SPM sesuai dengan Mutu dan Jenisnya		Peningkatan kualitas dan penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
			Pencegahan pengurangan hutan (deforestasi)
14	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang Kaltim	Optimalisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
15	Meningkatnya indeks tutupan hutan		Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara (emisi karbon)
16	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan		Pengembangan energi baru dan terbarukan
			Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
			Peningkatan kualitas penataan ruang.

Strategi dan arah kebijakan pada tabel diatas merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Dan Program Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

		Strategi		Arah Kebijakan	Program Prioritas	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kaltim Damai	Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
					Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pertahanan dan keamanan	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
					Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2	Meningkatnya kualitas Pendidikan	2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Kaltim Cerdas	Perluasan akses wajib belajar 12 tahun	Program pendidikan dasar dan menengah
					Peningkatan keberlanjutan anak putus sekolah	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
					Pengembangan sekolah berkebutuhan khusus	Program pendidikan luar biasa
					Penataan kelembagaan pendidikan menengah (SMA, SMK, SLB)	Program manajemen pendidikan

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

					Pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan sekolah	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
					Pengembangan prodi di Poltek sesuai bidang (D-I dan D-IV)	Program peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat
					Sertifikasi bagi lulusan SMK, Diploma Poltek dan S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pengembangan pendidikan keterampilan/vokasi yang sesuai dengan potensi industry	Program pendidikan non formal
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Kaltim Sehat	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
						Program standarisasi pelayanan kesehatan
						Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

					Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
						Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	4	Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Kaltim Terampil	Sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
					Peningkatan kemampuan berkomunikasi bagi pengelola BLK	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
					Peningkatan kualitas instruktur pelatihan sesuai kebutuhan	Program peningkatan pembinaan & pengawasan ketenagakerjaan
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	5	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kaltim Bebas Kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

						Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
6	Menurunnya tingkat pengangguran				Pemberian subsidi yang tepat guna	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
						Program beras untuk keluarga miskin (Raskin)
7	Meningkatnya usaha mikro dan menengah pada sektor pertanian dalam arti luas	6	Peningkatan ekonomi kreatif berbasis digital (TIK) dan kerakyatan	Kaltim Berekonomi Kerakyatan	Pengembangan iklim usaha dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah
						Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif
8	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	7	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian	Kaltim menuju Ekonomi Hijau	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Program pengelolaan perikanan budidaya
						Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
						Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
						Program pengelolaan perikanan tangkap

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

						Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
					Peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan
						Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
						Program Peningkatan Produksi Peternakan
					Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
						Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
9	Meningkatnya kontribusi sektor industri	8	Peningkatan nilai tambah dan rantai nilai industri unggulan	Kaltim menuju Industri Unggul	Operasionalisasi kawasan industri secara maksimal	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
						Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

					Pengembangan industri pertanian	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
					Perbaikan iklim dan kemudahan perijinan investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
					Pengembangan industri turunan perkebunan (sawit)	Program perluasan kebun sawit
						Program Penataan Struktur Industri
10	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa				Pengembangan industri olahan skala mikro kecil (rumah tangga)	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
					Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Klaster	Program pengembangan perdagangan dalam negeri
						Program pengembangan kawasan industri
11	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata	9	Peningkatan pengelolaan pariwisata	Kaltim Pusat Pariwisata Dunia	Mewujudkan destinasi Kaltim bertaraf internasional	Program pengembangan kemitraan
					Peningkatan pemasaran pariwisata yang intensif, inovatif dan interaktif	Program pengembangan pemasaran pariwisata
12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	10	Penyediaan infrastruktur dasar	Kaltim menuju Infrastruktur Berkualitas	Penyediaan hunian yang layak	Program penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana dasar permukiman

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

	pelayanan infrastruktur dasar				Pemantapan infrastuktur penyedia air bersih dan air baku	Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
					Perbaiki jaringan distribusi Listrik, pengadaan akses untuk daerah-daerah remote	Program pengelolaan ketenagalistrikan
					Melistriki daerah-daerah terpencil antara lain Mahakam Ulu, Paser, Kubar, Kukar, Kutim, PPU	program peningkatan layanan ketenagalistrikan
					Menurunkan luas wilayah yang belum terlayani telekomunikasi	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media mass
13	Meningkatnya arus barang dan jasa	11	Peningkatan konektivitas intra dan inter Kaltim	Kaltim Pusat Distribusi	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat
14	Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika			Kaltim Terkoneksi dan Terakses	Membuka konektivitas ke Mahulu	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut
					Mempercepat akses ke KEK Maloy	program penyelenggaraan jalan
						program peningkatan kualitas jalan

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

					Penyediaan infrastruktur penunjang 8 kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Program pembangunan infrastruktur dan perhubungan
					Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika.	Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan teknologi informatika	program penyelenggaraan pos dan informatika
15	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN	12	Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kaltim Melayani	Pembinaan, penataan, dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program pengembangan zona integritas
						Program pencegahan dan pemberantasan KKN
						Program pendidikan politik masyarakat
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik				Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
						Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja				Peningkatan kualitas dan penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik
					Pencegahan pengurangan hutan (deforestasi)	Program pengelolaan dan pengembangan KPH
18	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Hidup				Meningkatkan luas penghutanan kembali (reforestasi, aforestasi, reboisasi, rehabilitasi, reklamasi)	Program rehabilitasi hutan dan lahan
						Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
19	Meningkatnya indeks tutupan hutan	13	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Kaltim Ramah Lingkungan	Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara (emisi karbon)	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
						Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program konservasi lahan dan air
						Program mitigasi emisi gas rumah kaca
						Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

					Program Pengelolaan DAS dan RHL
20	Menurunnya tingkat emisi GRK			Pengembangan energi baru dan terbarukan	Program Diversifikasi Energi
					Program Pengembangan Ketenagalistrikan
21	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan			Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Program pengendalian bencana
				Peningkatan kualitas penataan ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB IV- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka pengembangan kabupaten/kota akan ditujukan pada peningkatan daya saing investasi untuk memacu percepatan hilirisasi komoditi pada tiap kabupaten/kota. Peningkatan daya saing investasi pada tiap kabupaten/kota diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2019 melalui peningkatan produktivitas/kontribusi sektor yang menjadi potensi/keunggulan masing-masing kabupaten/kota. Peningkatan produktivitas/kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi *main prime mover* (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan/Jasa, Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Dari sisi hilirisasi industri, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat investasi sektor pengolahan/industrialisasi melalui peningkatan infrastruktur pendukung dan kemudahan berusaha. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK dan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung serta mempercepat beroperasinya proyek-proyek strategis Nasional di Balikpapan dan Bontang. Pengembangan kewilayahan didasarkan pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sasaran pembangunan kabupaten/kota tahun 2019 ditujukan pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peran sektor/lapangan usaha potensial pada masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 5.1.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Usaha Potensial
pada Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	SHARE PDRB	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2019 (%)	LAPANGAN USAHA POTENSIAL
1	Kutai Kartanegara	19,85	2.15	Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan Perdagangan
2	Kutai Timur	18,45	4.19	Pertanian dan Perdagangan
3	Balikpapan	19,03	4±1	Industri Pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan
4	Bontang	10,17	2±1	Industri Pengolahan, Perdagangan, Sektor Perikanan
5	Samarinda	11,87	3±1	Perdagangan dan Jasa serta Industri Pengolahan
6	Paser	7,38	0±1	Pertanian, Perikanan, Pengolahan dan Perdagangan
7	Berau	6,86	4.83	Pertanian, Perikanan, Transportasi dan Perdagangan serta Pariwisata
8	Kutai Barat	4,25	4.45	Perdagangan dan Industri Pengolahan
9	Penajam Paser Utara	1,62	3.01	Pertanian dan Industri Pengolahan
10	Mahulu	0,51	5.89	Pertanian pada sektor perkebunan, Perdagangan didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang baik

5.1.2 Arah Pengembangan Kota Samarinda

Peran Kota Samarinda pada tahun 2019 terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat. Pada tahun 2019, Kota Samarinda diharapkan dapat berkontribusi sebesar 11,87% dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 3%. Pembangunan Kota Samarinda diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya penanggulangan permasalahan banjir yang menghambat optimalisasi peluang sektor Perdagangan dan Jasa serta Industri Pengolahan dengan menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan terutama pada daerah aliran sungai Karang Mumus serta kawasan-kawasan yang rawan tergenang banjir. Kota Samarinda mempunyai potensi besar pada sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Pengembangan sentra perdagangan dan jasa dilakukan dengan konsep pengembangan sentra perdagangan dan jasa baru dengan memperhatikan keterkaitan

terhadap daerah sekitar serta memperhatikan factor daya dukung dan dampak lingkungan terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, Kota Samarinda juga diarahkan untuk sebagai salah satu daerah untuk pengembangan sektor industri pengolahan, antara lain industri kimia dasar, industri pangan dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di Kota Samarinda didukung oleh pengembangan kawasan Samarinda Utara sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa baru. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antar pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan keterkaitan antar wilayah serta efisiensi ekonomi.

5.1.3 Arah Pengembangan Kota Balikpapan

Peran Kota Balikpapan terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan daerah pada potensi dan keunggulan Kota Balikpapan. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya pengembangan Kawasan Industri Kariangau, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas dari dan menuju Kawasan Industri Kariangau. Pada tahun 2019, Kota Balikpapan diharapkan dapat berkontribusi sebesar 19,03% terhadap PDRB Kalimantan Timur dengan pertumbuhan sebesar 4%. Kinerja beberapa Lapangan Usaha yang mendominasi di Kota Balikpapan antarlain Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan cukup baik. Melihat kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan difokuskan kepada peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung industri pengolahan, Transportasi & Pergudangan, serta Perdagangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di sisi sektor industri pengolahan, Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak melalui rencana pembangunan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan dan diharapkan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 30.000 tenaga kerja baru. Disamping itu, pengembangan kawasan Industri Kariangau diharapkan dan memberikan peran terhadap perekonomian Kalimantan Timur didorong melalui percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung. Pada sektor transportasi dan pergudangan, arah pembangunan difokuskan pada optimalisasi Pelabuhan Kariangau sebagai outlet maupun inlet pemasaran produk-produk perdagangan dari dan menuju Kalimantan Timur.

5.1.4 Arah Pengembangan Kota Bontang

Pada tahun 2019, peran Kota Bontang terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi daerah lain seperti Kota Balikpapan dan Samarinda, namun perekonomian Kota Bontang tetap tumbuh

positif diperkirakan sebesar 2%. Pengembangan Kota Bontang diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan Kota Bontang. Arah pembangunan Kota Bontang dalam RKPD 2019 diarahkan pada percepatan Pembangunan Kilang Refinery pada Kawasan Industri PT. Badak dan Pembangunan NPK Cluster pada Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim.

Sebagai penggerak ekonomi Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan salah satu pusat dari kegiatan industri pengolahan berbasis minyak dan gas bumi. Meski demikian Kota Bontang tidak hanya fokus pada pengembangan industri pengolahan namun juga pada sektor lainnya yang memerlukan perhatian khusus seperti perdagangan dan perikanan. Strategi pengembangan Kota Bontang pada sektor perdagangan, diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan untuk mendukung perdagangan antar daerah yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Sedangkan pengembangan sektor perikanan, diarahkan pada peningkatan produksi dan membangun jaringan *supply* produksi perikanan terutama untuk meningkatkan daya saing investasi hilirisasi produk perikanan dan kelautan yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.

5.1.5 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Peran Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan menurun seiring dengan meningkatnya peran kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2019, kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan sebesar 19,85% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,15%. Pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar terutama pada wilayah Hulu dan Pesisir terkait konektivitas dan penyediaan energi dan air bersih. Salah satu proyek strategis yang menjadi focus pada RKPD 2019 adalah percepatan pembangunan Bendungan Marangkayu yang diharapkan untuk menambah penyediaan air baku, pengendalian banjir dan irigasi pertanian.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi besar pada sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pengembangan sektor pertanian untuk komoditi Jagung, Karet, Sawit dan Lada diarahkan pada peningkatan produksi melalui pengembangan areal tanam. Disamping itu juga didorong kemudahan berinvestasi pada untuk meningkatkan produksi pengembangan industri pengolahan komoditi yang memiliki prospek guna meningkatkan nilai tambahnya.

Pada sektor perikanan yang berlokasi di Kota Bangun, Muara Badak, Anggana, dan Muara Jawa diarahkan untuk pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan tempat

pelelangan ikan (Kota Bangun dan Samboja), pembangunan cold storage, pembangunan industri rumput laut serta pembangunan SMK Perikanan di Muara Jawa. Disamping itu, pembangunan aksesibilitas di daerah Samboja juga diharapkan guna meningkatkan arus barang dan jasa.

5.1.6 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Kutai Timur terhadap perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan menurun akibat peningkatan kontribusi pada kabupaten/kota lainnya. Dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam RKPD 2019 diarahkan pada percepatan beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pusat Outlet produksi CPO yang bersumber dari PKS di sekitar KEK MBTK. Percepatan beroperasinya KEK MBTK ditopang dengan membangun jaringan transportasi dari lokasi PKS menuju KEK MBTK serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada lokasi KEK MBTK seperti pembangunan Tangki Timbun CPO dan prasarana pelabuhan. Pembangunan jaringan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan terutama di Muara Wahau dan Sangkulirang. Disamping itu juga perlu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk mengisi pada aktivitas ekonomi pada KEK MBTK.

Pada tahun 2019, dengan beroperasinya Pelabuhan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri pengolahan yang selama ini memiliki kontribusi kecil di Kutai Timur, dimana KEK MBTK merupakan sentra hilirisasi industri, berbasis kelapa sawit (*oleokimia*). Dengan demikian Kutai Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 18,45% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan rata pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,19% di tahun 2019.

5.1.7 Arah Pengembangan Kabupaten Kutai Barat

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Kutai Barat terhadap perekonomian Kalimantan Timur tergolong stabil dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kutai Barat. Pada tahun 2019, Kabupaten Kuta Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 4,25% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,45% persen di tahun 2019. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada pengembangan pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Hal ini dalam rangka meningkatkan peran sektor lain di luar pertambangan dan penggalian.

Peningkatan peran sector pertanian diarahkan pada peningkatan produksi perkebunan terutama karet dan kakao melalui revitalisasi perkebunan yang sudah tidak produktif dan pemberian benih karet yang berkualitas kepada petani. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi juga dilakukan peningkatan akses transportasi darat dari dan menuju pusat-pusat produksi pertanian. Disamping itu, didorong untuk adanya pengolahan produk pertanian melalui peningkatan daya saing investasi dengan melalui penguatan rantai produksi dari kulu ke hilir.

5.1.8 Arah Pengembangan Kabupaten Paser

Pada tahun 2019, peran Kabupaten Paser terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada pengembangan pertanian *food estate* sebagai upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan padi (swasembada pangan) di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019, wilayah Kabupate Paser diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 7,38% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi 1% pada tahun 2019. Mengingat cukup dominannya peran sektor pertambangan dan penggalian di Paser, mengakibatkan ekonomi Kabupaten Paser lemah akan guncangan ekonomi global. Maka berdasarkan pengembangan potensi kewilayahan, Kabupaten Paser diarahkan untuk melakukan pengembangan pada sektor pertanian tanaman pangan (padi dan jagung), perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada), peternakan (sapi dan kambing), perikanan, industri pengolahan dan perdagangan.

5.1.9 Arah Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Peran wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pembangunan jembatan tol PPU-Balikpapan, serta peningkatan akses pada kawasan industri dan pelabuhan.

Pada tahun 2019, Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,62% terhadap perekonomian Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,01%. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan. Industri Pengolahan di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Kawasan Industri Buluminung serta Industri Migas pada Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan

Penajam. Tentunya perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan energi, dan air bersih.

Pada pengembangan Lapangan Usaha Pertanian berkaitan dengan pengembangan food estate yang menjadi proyek strategis nasional terutama dalam pemenuhan kebutuhan padi. Bukan hanya itu, perlu juga diarahkan untuk pengembangan pada subsektor perikanan (tangkap dan budidaya) dan peternakan. Hal ini tentunya akan membantu mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Paser.

5.1.10 Arah Pengembangan Kabupaten Berau

Peran Kabupaten Berau terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat di tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan.

Pada tahun 2019, Kabupaten Berau diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 6,86% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,83%. Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata. Dengan beroperasinya Bandara Maratua diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas pariwisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Untuk memaksimalkan potensi wilayah, maka arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Berau diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, Transportasi dan Perdagangan serta Pariwisata. Pada Lapangan Usaha Pertanian, untuk sektor tanaman pangan pada komoditas padi, sektor perkebunan pada komoditas kelapa sawit, kakao dan lada. Tentunya ini dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Berau. Pariwisata masih perlu dioptimalkan untuk benar-benar berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan destinasi wisata yang ada di tempat lain seperti Gili dan Raja Ampat.

5.1.11 Arah Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu

Pada tahun 2019, peran wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap perekonomian Kalimantan Timur diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2019 diarahkan pada upaya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah yang masih sulit dijangkau, terutama daerah yang tidak dapat diakses melalui jalan darat. Penyediaan sumberdaya energi listrik dan air bersih.

Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 0,51% terhadap perekonomian Kalimantan Timur dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,89%. Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi daerah yang masih belum dimaksimalkan, sehingga jika ditilik lebih jauh Mahakam Ulu masih memiliki modal alam yang masih asri untuk dijadikan modal pembangunan dan diupayakan kelestariannya.

Maka, arah kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan pada Lapangan Usaha Pertanian pada sektor perkebunan (komoditas karet dan kakao), serta Lapangan Usaha Perdagangan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang baik.

Kedepan, dengan akan terbangunnya Jalan Pararel Perbatasan (Batas Kalbar – Tiong Ohang – Long Pahangai – Long Boh) 243 Km dan Jalan Akses menuju Paralel Perbatasan (Tering – Long Bagun – Long Pahangai) 250 Km akan membuka akses wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Pahangai dan Long Apari dari keterisolasian.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2019 adalah **“Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”** Melalui penetapan fokus/tema pembangunan 2019 yang berorientasi kepada peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri agar mampu mendukung hilirisasi industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas. Sejalan dengan fokus/tema tersebut, dalam pengimplementasian program dan kegiatan prioritas pembangunan, berbagai aspek prioritas lain tetap menjadi unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini harus melibatkan *stakeholder* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Lebih lanjut, agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2019, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/OPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Perioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan OPD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 terlampir pada lampiran 5.1

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2,298,908,699,375
1.01	Pendidikan				399,666,075,875
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				399,666,075,875
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				399,666,075,875
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan		181,395,842,000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	kk, smd	181,395,842,000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	200 Unit		510,000,000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	4 Unit Kerja	smd	100,000,000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kerja internal SKPD dan Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit Kerja	smd	410,000,000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95 Orang		2,750,000,000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	50 Kali	smd	1,750,000,000
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Orang	smd	1,000,000,000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Tahunan	12 Laporan		500,000,000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	250,000,000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian	Jumlah laporan capaian kinerja yang	12 Laporan	smd	250,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	disusun			
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa	95 Orang		2,204,744,875
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	10 Kab/kota	smd	1,304,744,875
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB	200 Orang	smd	900,000,000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 Bulan		11,400,000,000
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	500 Orang	smd	3,000,000,000
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas tenaga pendidik kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	250 Orang	smd	900,000,000
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	1500 Orang	smd	7,500,000,000
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	12 Bulan		3,295,000,000
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	40 Laporan	bru, ktm, kkr, smd, kbr, mah	2,225,000,000
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	3 Kegiatan	smd	220,000,000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 Laporan	smd	350,000,000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	10 Kab/kota	smd	500,000,000
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	98 Orang		23,234,000,000
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	40000 Orang	smd	23,234,000,000
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah	95 Orang		3,000,000,000
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	415 Orang	smd	1,500,000,000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang	smd	1,500,000,000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	85%		75,123,092,000
1.01.39.02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU	100 Orang	smd	264,000,000
1.01.39.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	10 Kab/kota	smd	110,000,000
1.01.39.05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	10 Kab / Kota	smd	17,100,000,000
1.01.39.06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	10 Kab / Kota	smd	880,000,000
1.01.39.08	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	10 Kab/kota	smd	119,900,000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	10 Kab/Kota		56,649,192,000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	95%		95,263,397,000
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	600,600,000
1.01.40.02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	9,000,000,000
1.01.40.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	100 Paket	smd	30,000,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.01.40.04	Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	30 Ruang	smd	6,750,000,000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	10 Kab/Kota		48,912,797,000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	125 Orang		990,000,000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10 Kab/Kota		550,000,000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	10 Kab / Kota		220,000,000
2.16.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	10 Kab/Kota		220,000,000
1.02	Kesehatan				757,016,971,000
1.02.01	Dinas Kesehatan				44,545,271,000
1.02.01.01	Dinas Kesehatan				39,045,271,000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		5,602,300,000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	5,602,300,000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		4,848,779,000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	4 unit	smd	2,744,806,132
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5 unit	smd	2,103,972,868
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2,414,884,200
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	27 Kali	smd	2,056,884,200
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	34 Kali		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12 Bulan		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	25 Orang	ktm, bpn, smd, kbr	358,000,000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan & anggaran yang sesuai dengan standar	100%		547,750,000
		Persentase laporan akuntabilitas yang dilaporkan	100%		
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	smd	489,750,000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Lakip	1 Dokumen	smd	58,000,000
		LPPD	1 Dokumen		
		Evaluasi Renja	4 Laporan		
		Tepra	12 Dokumen		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	95%		2,851,838,868
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	95%	smd	2,851,838,868
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	82%		2,851,021,000
		Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	19.50%		
		Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	30%		
		Persentase puskesmas santun lansia	35%		
1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang melakukan	10 kab/kota	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		surveilans gizi			883,580,000
1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase instalasi farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	82%	btg, bpn, smd	357,871,000
		Persentase instalasi farmasi provinsi dan kab/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan BMHP	70%		
		Jumlah produk alkes dan PKRT yang disampling	39 produk		
		Jumlah sarana produksi alkes dan PKRT dan sarana penyalur alkes yang dilakukan inspeksi	29 Sarana		
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan inspeksi sarana surveillance produk dan pengendalian perizinan sarana	30 orang		
1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	86%	smd	1,118,170,000
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kunjungan Neonatal pertama (KN1)	87%		
		Jumlah kab/kota mendapatkan pembinaan pelayanan penjangkaran kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	10 kab/kota		
		Kab/kota yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjut usia	10 kab/kota		
		persentase puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan rumah tangga	40%		
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pasar sehat yang diawasi	7 pasar	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	491,400,000
		Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	1818 unit		
		Jumlah sarana air minum yang diawasi	347 unit		
		Jumlah desa/kel yang melaksanakan STBM	89 desa/kel		
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terakses pelayanan kesehatan	100%		5,000,000,000
1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	persentase penduduk miskin yang mempunyai akses layanan kesehatan	100%	smd	5,000,000,000
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang mensosialisasikan kampanye gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat	100%		1,053,650,000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kab/ kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye Germas hidup sehat	10 kab/kota	smd	1,053,650,000
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	89%		1,344,663,000
		Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kejadian luar biasa KLB untuk mencegah terjadinya KLB	82%		
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Succes Rate (SR)	100%	bru, btg, ktm, bpn, kkr, psr	233,785,000
		Case Notification Rate (CNR)	70%		
		Persentase orang yang minum obat filariasis	85%		
		Persentase kab/kota yang eliminasi kusta	100%		
1.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase kab/kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap min 90%	89%	bru, ktm, kkr, smd, kbr, psr	1,110,878,000
		Penemuan kasus APF non polio (0/00)	2 per milles		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	80%		
		Penemuan kasus discarded campak	2 per seratus		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		(2/100) penduduk			
		Persentase Pelayanan kesehatan bagi daerah terdampak atau pada kondisi KLB/wabah/krisis kesehatan/bencana	82%		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal 1 (satu) per kecamatan	100%		7,645,480,932
		Persentase RSUD terakreditasi versi SNARS edisi I	17%		
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, terluar dan terdepan	2 kab/kota	bpn, smd, kbr	692,770,000
		Jumlah puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alkes sesuai standar	150 puskesmas		
		Jumlah puskesmas akreditasi sesuai road map	99 puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan PIS-PK	47 puskesmas		
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RS pemerintah yang terakreditasi	9 kab/kota	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	6,776,230,932
		Jumlah RSUD yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) edisi I	3 RSUD		
1.02.23.11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan/membina kesehatan tradisional	140 puskesmas	smd	176,480,000
		Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	10 RSUD		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	90%		1,891,720,000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	29 unit	smd	1,889,320,000
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/Balai yang diadakan	2 unit	smd	2,400,000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	90%		679,750,000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana prasarana dan alkes yang dipelihara (maintenance)	10 unit	smd	679,750,000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	80%		1,937,654,000
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang mendapat sertifikasi pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi	60%	smd	1,937,654,000
		Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	80%		
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM	30%		375,780,000
1.02.59.01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase kab/kota yang min 50% desa /kel melaksanakan Posbindu	40%	smd	375,780,000
		Persentase kab/kota yang min 50% sekolahnya sudah implementasi KTR	30%		
		Persentase IPWL aktif di wilayah Kaltim	10%		
		Persentase kab/kota yang 20% puskesmasnya melaksanakan pelayanan kes jiwa dan Nafza	40%		
1.02.01.02	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5,500,000,000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu				

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Pelayanan Kesehatan BLUD				5,500,000,000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya tenaga teknis BLUD	12 Bulan	smd	5,500,000,000
		Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan		
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				464,000,000,000
1.02.02.01	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				10,000,000,000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%		652,000,000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah	3 laporan	smd	652,000,000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	100%		9,348,000,000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara	3 Paket	smd	9,348,000,000
1.02.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)				454,000,000,000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan dasar masyarakat	100%		454,000,000,000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	smd	454,000,000,000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				218,100,000,000
1.02.03.01	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				10,000,000,000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				10,000,000,000
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Tersedianya Gedung Isolasi	1 Gedung	bpn	10,000,000,000
1.02.03.02	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				208,100,000,000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				208,100,000,000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan				208,100,000,000
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				30,371,700,000
1.02.04.01	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				12,371,700,000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Adminstrasi Perkantoran	100%		7,639,292,600
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	7,639,292,600
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	80%		221,706,400
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	smd	119,451,400
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit	smd	102,255,000
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan dan Perizinan	16 Unit		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	95%		105,200,000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Narkoba bagi Masyarakat	20 Kali	smd	105,200,000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-	Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana/prasarana penunjang sesuai standart	100%		4,236,801,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	paru/ rumah sakit mata				
		Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	4 Jenis		
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	4 Jenis	smd	259,201,000
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Pasien yang diadakan	273750 Porsi/Tahun	smd	3,977,600,000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	3 Jenis		168,700,000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang layak pakai dan berfungsi baik	3 Jenis	smd	168,700,000
1.02.04.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				18,000,000,000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	95%		18,000,000,000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	10 Jenis	smd	18,000,000,000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,110,418,000,000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1,110,418,000,000
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1,110,418,000,000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal OPD Terlayani Administrasi	4 Unit Kerja		9,059,355,000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, ktm, bpn, smd	9,059,355,000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal OPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana	4 Unit Kerja		9,260,057,000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	13 Unit	bru, ktm, smd	2,982,970,000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, ktm, smd	6,277,087,000
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	400 m2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		4,308,000,000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				3,833,000,000
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				475,000,000
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKJLP)	75%		982,000,000
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	616,500,000
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	365,500,000
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Yang Dibangun	0 Km		580,000,000,000
		Jumlah Pembangunan Jembatan Baru dan Perbaikan Struktur Jembatan	0 Unit		
1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	smd	30,000,000,000
1.03.15.02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun Rigid Pavement dan Aspal	71 Km	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, mah	400,000,000,000
1.03.15.03	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terbangun dan	5 Unit	ktm, kkr, mah	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Bangunan Perlengkap			150,000,000,000
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				221,510,451,000
1.03.16.01	Pengendalian Daya Rusak Air, Penyediaan Air Baku dan Pengamanan Pantai	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	1700 meter	btg, bpn, ppu, smd	195,315,051,000
		Jumlah prasarana pengendali banjir yang terbangun	1 buah		
		Panjang sungai yang dinormalisasi (Samarinda)	1000 meter		
		Luas lahan yang dibebaskan (banjir)	14 Ha		
		Panjang prasarana pengaman pantai yang terbangun (PPU)	500 meter		
		Luas lahan yang dibebaskan (air baku)	84 Ha		
		Panjang prasarana pengaman pantai yang terbangun (Balikpapan)	500 meter		
		Panjang sungai yang dinormalisasi (Bontang)	3000 meter		
1.03.16.02	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Panjang jaringan irigasi yang terbangun	20500 meter	bru, kkr	9,225,000,000
		Jumlah bendung/bendungan irigasi yang terbangun	1 buah		
1.03.16.03	Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen perencanaan SDA	14 dokumen	bru, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	16,970,400,000
		Jumlah sarana & prasarana pendukung penyediaan data & informasi SDA	8 unit		
		Jumlah pos yang dikelola dan dimutakhirkan untuk data & informasi SDA	53 buah		
		Jumlah komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	1 halaman website		
		Jumlah event pendukung pengelolaan SDA	5 kegiatan		
		Jumlah aparatur pengelola Sumber Daya Air yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang		
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air	150 orang		
		Jumlah dokumen pengawasan SDA	13 dokumen		
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Jumlah Bangunan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Yang Terbangun	0 unit		98,100,000,000
1.03.17.01	Pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang terbangun dan yang terehabilitasi	3 unit	smd, luarPrv	79,485,000,000
1.03.17.02	Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Layak	Panjang jaringan pipa air bersih/air minum yang terpasang	3000 meter	bpn, smd	12,350,000,000
1.03.17.03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	jumlah dokumen perencanaan / studi / identifikasi / audit building	6 dokumen	bru, ktm, smd, luarPrv	6,265,000,000
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Tertib Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	10 Laporan		2,300,000,000
1.03.18.01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Penyebarnya Pedoman dan Peraturan Jasa Konstruksi	1 Laporan	smd	1,300,000,000
1.03.18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti bimbingan teknis	1 Laporan	smd	500,000,000
1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan & Pembinaan Jasa Konstruksi	3 Laporan	smd	500,000,000
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah I	0%		46,855,467,000
1.03.19.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional	100 KM	bpn	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Jembatan Wilayah I	Jalan			36,855,467,000
1.03.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I	Daerah irigasi yang terpelihara	10 Ha		10,000,000,000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Terpeliharanya sarana dan prasarana daerah irigasi, jalan dan jembatan serta terjaganya umur teknis dan ekonomis daerah irigasi, jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD PIPU Wilayah II	100%		49,075,064,000
1.03.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara efektif	10 Km	kk, smd, kbr, mah	39,075,064,000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	5 Buah		
1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Terpeliharanya saluran pembawa, saluran pembuang, saluran primer, saluran sekunder dan bangunan bagi/sadap serta rumah jaga	100%	smd	10,000,000,000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah III	0%		48,777,606,000
1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III	405 KM	ktm	38,777,606,000
1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Terpelihara Daerah Irigasi UPTD Wilayah III	16450 Ha	bru, ktm	10,000,000,000
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	0 Skor		16,050,000,000
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Teknis Pengaturan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Laporan Pelaksanaan pembinaan perencanaan penataan ruang	7 Dokumen	smd	6,650,000,000
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Dokumen Program Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dan Laporan Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan ruang provinsi	6 Dokumen	smd	4,550,000,000
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6 Dokumen	smd	4,850,000,000
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kawasan Permukiman Yang Layak	100%		24,140,000,000
1.04.15.01	Pembangunan rumah layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah Unit Bantuan	202 Unit	btg, smd, ppu, kkr, bpn	8,040,000,000
		Panjang Jalan Yang Terbangun	781.42 M'		
1.04.15.02	Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi	3.12 Ha	bpn, smd	15,000,000,000
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan DED/Identifikasi/Perencanaan dan Pengawasan	4 Dokumen	bpn, smd, ppu, kkr	1,100,000,000
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				15,707,652,500
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				7,875,852,500
1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				7,875,852,500
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,504,662,200
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	3,504,662,200
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				720,808,500
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	302,108,500
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	60 unit	smd	418,700,000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				409,965,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 kegiatan	smd, luarPrv	298,825,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	28 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian dinas	3 stel	smd, luarPrv	111,140,000
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	22 orang		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				142,747,500
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 dokumen	smd	4,500,000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 dokumen	bpn, smd	138,247,500
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah				1,095,204,000
1.05.60.02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada	5 dokumen	smd	580,692,500
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada	5 dokumen		
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada	10 dokumen		
1.05.60.04	Penyelenggaran Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim	5 dokumen	smd	514,511,500
		Rapat Koordinasi teknis PPNS	2 dokumen		
		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim	10 dokumen		
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim	10 dokumen		
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat				622,326,800
1.05.63.01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Melakukan Patroli	150 dokumen	smd	138,426,800
		Melakukan pengendalian massa	18 dokumen		
		Pelaksanaan Pengamanan tindakan Non Yustisi dan Yustisi	15 dokumen		
1.05.63.02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokoler	Melakukan Pengawasan dan Pengamanan Protokoler	20 dokumen	smd	483,900,000
		Pengamanan Aset Pemprov. Kaltim	20 dokumen		
		Melakukan Pengamanan Khusus	365 dokumen		
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan				753,975,500
1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim	10 dokumen	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd	392,070,000
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim	2 dokumen		
		FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen		
1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen	smd	361,905,500
		Monitoring Operasional Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak	10 dokumen		
		Apel Siaga Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak	1 dokumen		
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan				

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	dan pencegahan bahaya kebakaran				626,163,000
1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim	10 dokumen	smd	429,710,000
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran	24 dokumen		
		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim	10 dokumen		
1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim	2 dokumen	smd	196,453,000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim	4 dokumen		
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4,586,400,000
1.05.02.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4,586,400,000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				573,186,000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	573,186,000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				88,214,000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				88,214,000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				680,000,000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				680,000,000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				45,000,000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran				22,500,000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan				22,500,000
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan				800,000,000
1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Rakor dan Peserta Rakor FKDM	300 Orang	smd	386,440,000
		Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah	20 Orang		
1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Revitalisasi	70 Orang		188,160,000
1.05.15.26	Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan	Jumlah raker dan Peserta Raker Timdu PKS	150 Orang		225,400,000
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				600,000,000
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	285 Orang	smd	300,000,000
		Tersedianya data informasi perkembangan FPK di Daerah	1 Dokumen		
		Terlatihnya peserta yang mengikuti Kegiatan Pembauran Kebangsaan	100 Orang		
1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2000 Orang	smd	300,000,000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat				1,100,000,000
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pileg/Pilpres 2019	78%		667,740,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	100 Orang		219,355,000
1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik	Terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya data parpol	80 Orang		212,905,000
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas				700,000,000
1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang		156,150,000
1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS	100%	smd	193,850,000
		Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas	1 Tim		
1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bahan Pokok ke 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota		350,000,000
		Terwujudnya ASN yang bebas narkoba	100%		
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3,245,400,000
1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3,245,400,000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,688,350,000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1,688,350,000
		Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini	84 O/B		
		Jumlah satuan tenaga penanggulangan bencana	14 O/B		
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				207,252,400
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	90 Bulan	smd	207,252,400
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				477,277,600
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	24 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	477,277,600
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	71 Kegiatan		
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek	3 orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	160 Orang		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				117,500,000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	53,500,000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	64,000,000
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian	10		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
			Kabupaten/Kota		
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	85 Kali		355,020,000
1.05.49.12	Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana				355,020,000
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6 Desa/Kelurahan		225,000,000
		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dilakukan pembinaan lanjutan	2 Desa/Kelurahan		
		Persentase Pendataan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kaltim	20 Persen		
		Jumlah kab/kota yang terpasang alat peringatan dini (ESW)	1 Kab/Kota		
1.05.51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	30 Orang	smd, kbr, luarPrv	112,500,000
		Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana	30 Orang		
1.05.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	8 Kabupaten/Kota	bru, psr, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	112,500,000
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	5 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	100 Orang		
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5 Persen		175,000,000
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	10 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	175,000,000
1.06	Sosial				16,100,000,000
1.06.01	Dinas Sosial				16,100,000,000
1.06.01.01	Dinas Sosial				16,100,000,000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	12 12 bulan		4,779,987,500
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 12 Bulan	smd	4,779,987,500
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 12 Bulan		781,704,000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	1000 1000 Unit	smd	60,000,000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor	12 12 Bulan	smd	721,704,000
1.06.09	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 12 bulan		1,880,873,500
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 12 Bulan	smd	1,880,873,500
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 12 Bulan		
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	35 35 Dokumen		261,100,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
1.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	7 7 Dokumen	bpn, smd	236,600,000
1.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	4 4 Laporan	bpn, smd	24,500,000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 ? Orang		353,300,000
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	0 ? Orang	smd	353,300,000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 ? Orang		877,050,000
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberi pelatihan keterampilan	0 ? Orang	smd	756,300,000
1.06.17.03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Cacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	0 ? Orang	smd	120,750,000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	0 ? Orang		247,900,000
1.06.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan bantuan pelayanan	0 ? Orang	bpn, smd	247,900,000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	25 25 Panti		4,850,250,000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	5 5 Panti	smd	4,763,750,000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 5 Panti	smd	86,500,000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0 ? Orang		170,025,000
1.06.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	0 ? Orang	bpn, smd	170,025,000
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	0 ? Lembaga		926,860,000
1.06.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	0 ? Lembaga	smd	427,910,000
1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	0 ? Kegiatan	smd	150,450,000
1.06.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	0 ? Kegiatan	smd	348,500,000
1.06.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin dan PMKS yang telah meningkat status sosial dan kehidupannya	0 ? Orang		281,700,000
1.06.22.01	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	0 ? KPM	smd	52,250,000
1.06.22.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	0 ? Orang	smd, kbr	229,450,000
		Jumlah warga KAT yang diberi bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha	0 ? KK		
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan usaha	0 ? KUBE		689,250,000
1.06.23.01	pelatihan keterampilan berusaha bagi	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	0 ? KUBE	bru, btg, bpn,	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	keluarga miskin dan PMKS lainnya			smd, mah	689,250,000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				323,772,858,000
2.01	Tenaga Kerja				22,390,000,000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				22,390,000,000
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				22,390,000,000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		4,125,900,000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				4,125,900,000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		574,750,000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg, bpn, smd	574,750,000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				640,500,000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kegiatan	btg, bpn, smd	610,500,000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 Orang	smd	30,000,000
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				35,900,000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	10,000,000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	25,900,000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja				11,071,100,000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	500 Orang	smd	5,000,000,000
2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	smd	5,000,000,000
2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih	50 Orang	smd	1,000,000,000
2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi	1 LSP	smd	71,100,000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				128,900,000
2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja	2 Dokumen	smd	64,750,000
2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan	1 Dokumen	smd	8,350,000
2.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan	1 Dokumen	smd	46,300,000
2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara	93 Orang	smd	9,500,000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				272,710,000
2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	150 Perusahaan	smd	43,100,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur Tentang UMP	3 Dokumen	smd	229,610,000
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif				223,790,000
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berwirausaha	120 Orang	smd	223,790,000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan				1,087,740,000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	60 Perusahaan	smd	1,002,490,000
2.01.27.07	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	40 Perusahaan	smd	85,250,000
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas				162,710,000
2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80 Orang	smd	162,710,000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja				2,253,500,000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	3 Jurusan	bpn	1,000,000,000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	528 Orang	btg, bpn	1,253,500,000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi				1,812,500,000
3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain	3 Dokumen	smd	50,000,000
3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans	smd	157,500,000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans	bru, smd, mah, psr	1,605,000,000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4,326,050,000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4,326,050,000
2.02.01.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4,326,050,000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	target kinerja	12 kinerja		1,226,100,000
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	smd	1,226,100,000
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya fungsi sarana dan prasarana	100%		357,002,500
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana dan prasarana kantor	47 Unit	smd	357,002,500
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas aparatur	100%		518,500,000
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	presentase capaian target kinerja	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	450,000,000
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	diklat yang diikuti pegawai	4 diklat	smd, luarPrv	68,500,000
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen	Meningkatnya capaian kinerja	100%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				105,000,000
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan capaian kinerja	5 dokumen	bpn, smd, luarPrv	105,000,000
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%		294,900,000
2.02.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik	1 kebijakan	smd	46,000,000
2.02.15.05	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	jumlah rakor bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak	1 kali	ppu, smd	248,900,000
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	100%		197,500,000
2.02.16.02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	85%	smd	197,500,000
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pengecahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	90%		124,000,000
2.02.17.05	Advokasi kebijakan perlindungan perempuan	meningkatnya jumlah lembaga pelayanan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak	2 jumlah	kk, ppu, smd, luarPrv	124,000,000
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	100%		452,255,000
2.02.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	jumlah kajian pembangunan berbasis gender	1 kajian	bpn, smd	119,525,000
2.02.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	12 kelompok	smd	70,030,000
2.02.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	220 orang	bpn, luarPrv	262,700,000
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif	100%		158,900,000
2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	70 orang	smd, luarPrv	158,900,000
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	pemenuhan kebutuhan hak anak	1 dokumen		354,392,500
2.02.21.01	Advokasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	jumlah kab/kota menuju kota layak anak	1 kab/kota	smd, luarPrv	200,392,500
2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	pemetaan hak anak di bidang pendidikan	1 dokumen	kk, smd, luarPrv	154,000,000
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				47,500,000
2.02.22.04	Penyuluhan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi	pembinaan Desa PRIMA(Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	10 kelompok	smd	47,500,000
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				60,900,000
2.02.23.02	Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Indikator nilai-nilai terkait pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur	1 rekomendasi	kk	60,900,000
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak				110,900,000
2.02.26.01	Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak	presentase data pilah yang ada	50%	ktm, bpn, smd, luarPrv	110,900,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	100 orang		240,800,000
		terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	100%		
2.08.15.06	Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	seminar peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka hari ibu	110 orang	smd	240,800,000
		pelayanan KIE dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	110 orang		
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				77,400,000
2.08.20.02	Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, edukasi)	100 orang	smd	77,400,000
2.03	Pangan				38,182,677,000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				38,182,677,000
2.03.01.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				38,182,677,000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7,654,356,600
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	kk, smd	7,654,356,600
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,973,000,000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah ISO 9001:2015 yang diaudit eksternal	5 Kegiatan	kk, smd	261,500,000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kk, smd	1,711,500,000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				1,432,500,000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 Kegiatan	kk, smd	1,335,000,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	7 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	8 Orang	kk, smd	97,500,000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				937,000,000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	kk, smd	448,000,000
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	489,000,000
2.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				4,250,000,000
2.03.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penyuluh, petani dan pelaku agribisnis yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	1000 Orang	bru	4,250,000,000
2.03.24	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan				500,000,000
2.03.24.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah kaji terap yang dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian	20 Demplot	smd	205,800,000
2.03.24.03	Pengembangan SDM Penyuluh	Jumlah dokumen evaluasi data	1 Dokumen	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		ketenagaan dan kelembagaan			294,200,000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				1,476,650,000
2.03.25.01	Penanganan daerah rawan pangan	Data analisis SKPG dan Peta Kerawanan Pangan	1 Laporan	smd	129,750,000
2.03.25.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Data Ketersediaan Pangan Provinsi	1 Laporan	smd	146,450,000
2.03.25.04	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan beras provinsi	200 Ton	smd	991,050,000
2.03.25.07	Pengembangan sistem informasi pasar	Data harga dan kebutuhan pangan menjelang HBKN	1 Laporan	mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, psr	209,400,000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan				500,000,000
2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi	1 Laporan	smd	95,000,000
2.03.27.02	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Pengembangan Pangan Lokal	10 Kab/Kota	smd	150,250,000
2.03.27.03	Pengembangan Pangan Lokal	Promosi Pangan Lokal	2 Promosi	smd	254,750,000
2.03.28	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar				600,000,000
2.03.28.01	Pengembangan Pangan Organik	Jumlah Desa yang dibina	5 Desa	btg, kkr, ppu, smd, psr	200,000,000
2.03.28.02	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah kab/kota yang diawasi mutu pangan segarnya	10 Kab/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	400,000,000
3.03.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA				4,500,000,000
3.03.28.07	Peningkatan Mutu Siswa	Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu SDM di bidang pertanian	356 Siswa	smd	4,500,000,000
3.03.40	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan				522,000,000
3.03.40.01	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan evaluasi alsintan pasca dan prapanen	2 kegiatan	smd	332,000,000
3.03.40.02	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Unggulan Daerah	Jumlah promosi produk pertanian tanaman pangan	2 Kali	smd	190,000,000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura				1,548,900,000
3.03.41.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Hortikultura	Luas kawasan hortikultura	500 Ha	kk, smd	1,127,700,000
3.03.41.02	Pengembangan Hortikultura diperkotaan	Jumlah bibit hortikultura	36000 Polybag	smd	246,200,000
3.03.41.03	Pengelolaan Data Statistik Hortikultura	Laporan data statistik pertanian hortikultura	1 Dokumen	smd	175,000,000
3.03.42	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Hortikultura				590,000,000
3.03.42.01	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	Luas lahan pisang yang produksinya tertampung di STA	1000 Ha	kk, smd	350,000,000
3.03.42.02	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Hortikultura Unggulan Daerah	Jumlah promosi produk pertanian hortikultura	2 Kali	smd	240,000,000
3.03.43	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Hortikultura				750,000,000
3.03.43.01	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Hortikultura tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana pertanian hortikultura	2 Jenis	kk, ppu, psr	750,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.03.44	Program Peningkatan Produksi Benih Hortikultura				596,790,000
3.03.44.01	Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Hortikultura	Perbanyak benih unggul tanaman hortikultura	60000 pohon	kkp	596,790,000
3.03.45	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Benih Hortikultura				89,900,000
3.03.45.01	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam	Jumlah penangkar dan petugas yang dilatih untuk perbanyak benih hortikultura	50 Orang	kkp	89,900,000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan				889,000,400
3.03.46.01	Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Padi dan Palawija	Jumlah varietas benih padi lokal yang dilakukan pemurnian dan pemendekan umur tanam	2 Varietas	kkp	889,000,400
3.03.48	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura				270,000,000
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah gerakan pengendalian OPT	10 Kali	smd	270,000,000
3.03.49	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				99,000,000
3.03.49.01	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Jumlah benih unggul yang bersertifikat	5000 Label	smd	99,000,000
3.03.50	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				151,000,000
3.03.50.02	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	40 Rekomendasi	smd	151,000,000
3.03.51	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan				8,387,980,000
3.03.51.03	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan	Luas pengembangan produksi padi lahan kering	24000 Ha	kkp, smd	8,000,000,000
3.03.51.04	Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan	Laporan Statistik pertanian tanaman pangan	1 Dokumen	smd	387,980,000
3.03.52	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan				464,600,000
3.03.52.01	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	2 Jenis	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	464,600,000
2.05	Lingkungan Hidup				16,000,000,000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				16,000,000,000
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup				16,000,000,000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran	100 Persentase		3,285,210,000
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3,285,210,000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persentase		849,640,000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	849,640,000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100 Persentase		1,210,000,000
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	925,000,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan	35 Kali		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		konsultasi ke dalam daerah			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih	15 orang	bpn, smd, luarPrv	285,000,000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	90 Persentase		1,205,000,000
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup	7 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	740,500,000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM	4 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	464,500,000
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	65 Persentase		826,400,000
2.05.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Penanganan Sampah	75 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	137,700,000
2.05.15.14	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kebijakan dan Strategi Provinsi kaltim dalam pengelolaan Sampah	1 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	99,200,000
2.05.15.15	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	9 Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	193,500,000
2.05.15.16	Pelaksanaan Seksi Limbah B3	Inventarisasi data dan pembinaan Perusahaan Pengelola Limbah B3	75 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	396,000,000
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75 Indeks		1,805,100,000
2.05.26.02	Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	Penurunan Beban Pencemar	5 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	246,400,000
2.05.26.03	Pemantauan Lingkungan Air Sungai , Air Laut, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air	75 Indeks	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1,259,700,000
		Indeks Kualitas Udara	80 Indeks		
		Indeks Kualitas Tanah	70 Indeks		
2.05.26.04	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Terlaksananya Upaya Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	10 Kab/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	299,000,000
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	7 Dokumen		1,470,000,000
2.05.27.01	Penyusunan Evaluasi dan Verifikasi Dokumen RPPLH, Penyusunan DDDTLH dan KLHS Prov. Kaltim	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan kajian LH	3 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	997,000,000
2.05.27.02	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH)	Pelayanan Informasi LH & Instrumen Ekonomi LH	100 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	225,000,000
2.05.27.03	Penyusunan Dokumen Status	Penyusunan dokumen DIKPLH/SLHD dan	2 Dokumen	bru, psr, mah,	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Informasi Lingkungan Hidup (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dokumen IKLH		kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	248,000,000
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	100 Persentase		870,000,000
2.05.28.01	Pembinaan Pelaksanaan Manajemen Komisi Penilai Amdal dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL/UPL pada DLH	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan komisi penilai Amdal se-Kaltim (Kab/Kota) & Provinsi	11 Komisi Penilai Amdal	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	455,000,000
2.05.28.02	Kajian Dampak Lingkungan (Monitoring dan Evaluasi Perubahan Izin Lingkungan oleh DLH Kab, Kota, Perusahaan yang Merupakan Kewenangan Pemprov. Kaltim)	Pelaksanaan pelayanan izin lingkungan/perubahan izin lingkungan & Penilaian/Pemeriksaan Dokumen LH	100 Persentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	415,000,000
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225 225		936,000,000
2.05.29.01	Pemantauan kualitas udara ambien	Jumlah Perusahaan yang dinilai mendapatkan peringkat hijau	25 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	936,000,000
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100%		446,250,000
2.05.31.01	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Presentase Kasus yang diselesaikan	100 Presentase	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	446,250,000
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	20 Perusahaan		295,000,000
2.05.32.01	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan dan menerapkan sanksi serta penegakan hukum	15 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	295,000,000
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	4 Penghargaan		1,094,400,000
2.05.53.02	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Orang/Masyarakat yang dilakukan pembinaan dalam pengelolaan LH	100 Orang	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	348,500,000
2.05.53.03	Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Pendampingan Penilaian/ Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	50 Sekolah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	350,000,000
		Pendampingan Penilaian/ Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	2 Tokoh Kalpataru		
		Pendampingan Penilaian/ Penilaian Apersiasi Pengelolaan LH yang diberikan	4 Kab/Kota Adipura		
2.05.53.04	Identifikasi, verifikasi dan validasi serta Penetapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	Terverifikasi, teridentifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat	2 Wilayah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	238,000,000
2.05.53.06	Inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat di Kaltim	Terverifikasinya jumlah kampung iklim	5 Wilayah/Desa	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	157,900,000
		Tertindaknya pendampingan penilaian kampung iklim	5 Wilayah/Desa		
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	10 Juta Ton CO2eq		1,072,000,000
2.05.56.04	Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV)	Tertindaknya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	462,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	RAD – GRK	(MRV) RAD-GRK		kk, bpn, ktm, btg, luarPrv	
2.05.56.05	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Laporan PEP MRV RAD GRK	1 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	610,000,000
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	200 Ribu Hektare		635,000,000
2.05.57.01	Identifikasi dan pemantauan kawasan hutan yang dilindungi dan kawasan non hutan yang bernilai penting bagi konservasi	Data HCV di Sektor Pertambangan, HPH-HTI, & Perkebunan	1 Data Kuantitatif	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	350,000,000
2.05.57.02	Perlindungan kawasan KARST	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang - Mangkalihat	1 Dokumen	bru, ktm, smd, luarPrv	285,000,000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				5,869,000,000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				5,869,000,000
2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				5,869,000,000
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,762,500,000
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1,762,500,000
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	98%		331,000,000
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	331,000,000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	80%		946,800,000
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	bru, smd	946,800,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		100,000,000
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	psr	60,000,000
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	40,000,000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Desa Mandiri	40 Desa		350,000,000
2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	100,000,000
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	70%	smd	50,000,000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina	150 Orang	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	76,000,000
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	5 MHA	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	124,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah Posyandu yang dibina	6 Posyandu		
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Unit		92,850,000
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdesa yang Terbentuk	15 unit	smd	92,850,000
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program/ Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	80%		83,254,000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev	80%	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	83,254,000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	80%		270,030,000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1 Kali	bru, bpn, smd	270,030,000
		Jumlah kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota		
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna				208,000,000
2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Memiliki Daya Saing Pasar	18 Posyantek	ktm	172,100,000
2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Air Bersih	10 Unit	smd	35,900,000
		Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Sanitasi	10 Unit		
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya				1,100,000,000
2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	130 Orang	mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, psr	875,000,000
2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih	150 Orang	smd	85,000,000
2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	160 Orang	smd	75,000,000
2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	300 Orang	smd	65,000,000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Posyantek Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG	10 Posyantek		24,566,000
2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina	10 Posyantek	ktm	24,566,000
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	80%		300,000,000
2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data aparat Desa/kelurahan dan badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	41,800,000
2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa	7 Kabupaten	bru, ktm, kkr, ppu, kbr, mah, psr	41,800,000
2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti	10 Kabupaten/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr,	216,400,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019		bpn, ktm, btg, psr	
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan				300,000,000
2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina	5 Kabupaten	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	100,000,000
		Pendamping Desa yang dibina	50 Orang		
2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	1 Laporan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	100,000,000
2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	1 kali	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	100,000,000
2.09	Perhubungan				89,582,000,000
2.09.01	Dinas Perhubungan				89,582,000,000
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				89,582,000,000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,102,250,000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm, bpn, smd	4,102,250,000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif	100%		3,489,200,000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Komputer, Notebook, Server, Printer, UPS, Rak Server & Arsip, Lampu PJU dan Mobil Operasional	55 Unit	smd	1,930,000,000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Videotron, PABX, Perbaikan Ruang Arsip dan Pantry	5 Paket	smd	1,559,200,000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100%		2,672,850,000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	12 Bulan	smd	2,209,850,000
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan	40%	smd	463,000,000
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	100%		908,700,000
2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA	5 Dokumen	smd	616,700,000
2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	4 Dokumen	smd	292,000,000
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan				27,337,400,000
2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ terpasang di ruas jalan provinsi di Kaltim	7 jenis	smd, luarPrv	21,869,900,000
		Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Prov. Kaltim	2 dokumen		
		Alat Timbang Kendaraan Portabel sarana pendukung Wasdal Angkutan Barang	1 unit		
2.09.15.02	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Terbentuknya kawasan tertib lalu lintas di wilayah kab/kota di Kaltim	6 lokasi	smd, luarPrv	4,517,500,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Terpilihnya usutan tingkat provinsi untuk dikirim pada tingkat nasional	3 orang		
		Terlaksananya Pelayanan Anagkutan Bus Perintis	1 paket		
		Tersedianya Dokumen Study Jaringan Induk Transportasi Jalan	1 dokumen		
2.09.15.03	Peningkatan Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Tersosialisasinya kegiatan keselamatan berlalu lintas di jalan	3 paket	bpn, smd, luarPrv	950,000,000
2.09.16	Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Meningkatnya Aksesibilitas Prasarana Transportasi Laut dan SDP Dalam Mendorong Konektivitas Antar Wilayah	65%		40,017,100,000
2.09.16.01	Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut	Terbangunnya Jalan Akses dari Trestle ke Jalan Kawasan KEK Maloy	1500 meter	ktm	33,894,750,000
2.09.16.02	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDP	Terbangunnya Plengsengan, Perbaikan Jalan Akses, Rehab Rumah Dinas & Fasilitas Umum, Pemasangan Bollard, Pemasangan Lampu PJU Solar Cell, Study FS & DED Pelabuhan Penyeberangan Tj. Keramat	6 Jenis	ktm, bpn	5,938,450,000
2.09.16.03	Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran	Tersosialisasinya kebijakan pemerintah kepada badan usaha angkutan pelayaran	1 Dokumen	smd	183,900,000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu di Prov. Kaltim	30%		3,354,150,000
2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian	1 Dokumen	smd	307,800,000
2.09.17.02	Perencanaan Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) Terminal Tipe B	6 Dokumen	smd	1,176,050,000
2.09.17.03	Pengembangan Pelayanan Angkutan Antar Moda				1,870,300,000
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Meningkatnya Prosentase Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Terminal	50%		7,700,350,000
2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Terminal Type B Wilayah I di Kalimantan Timur	Tersedianya Dokumen Studi Rencana Induk Terminal Sei Kunjang & Lempake dan Peningkatan Bangunan Terminal Sungai Kunjang & Lempake	4 Jenis	bru, btg, smd	5,545,800,000
2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Terminal Type B Wilayah II di Kalimantan Timur	Tersedianya Dokumen Studi Rencana Induk Terminal Timbau & Paser dan Peningkatan Bangunan Terminal Timbau & Paser	4 Jenis	kk, ppu, smd, kbr, psr	2,154,550,000
2.1	Komunikasi dan Informatika				7,763,200,000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				7,763,200,000
2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				7,763,200,000
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	12 Bulan		3,778,730,000
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3,778,730,000
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		735,900,000
2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	51 Unit	smd	235,800,000
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	500,100,000
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah	12 Bulan		1,767,520,000
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Paket	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	1,767,520,000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan	1 Paket		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Konsultasi Ke Dalam Daerah			
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100 Persen		1,481,050,000
2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Penggunaan Cloud Computing	58 OPD	smd	1,481,050,000
		Jumlah Penggunaan Aplikasi MOD	58 OPD		
		Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	58 OPD		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				98,867,946,000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				98,867,946,000
2.11.01.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				98,867,946,000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%		5,202,900,000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	5,202,900,000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		33,520,050,000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	50 unit	smd	31,647,900,000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	1,872,150,000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	100%		2,556,596,000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	198 kegiatan	smd	1,690,846,000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 orang	smd	865,750,000
		Jumlah Seragam Pegawai	189 orang		
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	79%		939,900,000
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd, kbr	718,600,000
2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	221,300,000
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	100 UKM		750,000,000
2.11.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi kebijakan pengembangan UKM	200 UKM	smd	750,000,000
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	100 Wirausaha Baru		750,000,000
2.11.16.09	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri yang mendapatkan fasilitasi produksi pemasaran dan pembiayaan	100 WUB	smd	750,000,000
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	100 Koperasi		650,000,000
2.11.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	1000 Koperasi	smd	300,000,000
2.11.18.03	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	100 Koperasi	smd	350,000,000
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	5 pelatihan		800,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	1 dokumen	smd	524,220,000
2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	5 pelatihan	smd	275,780,000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%		1,500,000,000
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang Beredar Yang Wajib Diawasi	10 Produk	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1,500,000,000
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio Ketersediaan Stok Barang pokok dan barang penting	150%		895,100,000
3.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar murah/bazar yang dilaksanakan	0 kali	smd	292,600,000
3.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi harga harian Komoditi Barang pokok dan barang penting	0 informasi harga	btg, ppu, smd	602,500,000
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	11 Pelaku usaha/nilai transaksi		1,171,300,000
3.06.32.01	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan	Jumlah UKM yang melakukan Promosi	0 UKM	bru, btg, bpn, smd	1,171,300,000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	15%		1,050,000,000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standararisasi Jaminan Mutu Barang	Ruang lingkup Akreditasi Laboratorium yang dipelihara dan dipertahankan	2 ruang	smd	528,000,000
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	jumlah Presentase Penerimaan Retribusi	15%	smd	522,000,000
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri	0%		1,000,000,000
3.07.32.02	Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir	Jumlah dokumen rencana pengembangan industri daerah	1 Dokumen	smd	500,000,000
3.07.32.03	Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah	Persentase ketersediaan layanan data dan informasi yang di upload	100%	smd	500,000,000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	0%		1,025,000,000
3.07.33.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	Jumlah Koordinasi Penumbuhan Industri	10 Kali	smd	725,000,000
3.07.33.02	Peningkatan Pelayanan Ijin usaha industri	Jumlah hari terbitnya ijin rekomendasi usaha industri	12 Hari	smd	300,000,000
3.07.34	Program Pembangunan Sarana Prasarana KEK Maloy	Jumlah sarana dan prasarana di KEK Maloy	4 unit		47,057,100,000
3.07.34.01	Pembangunan Tangki Timbun KEK Maloy	Jumlah Tangki Timbun yang dibangun	4 unit	ktm	47,057,100,000
2.12	Penanaman Modal				7,834,535,000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7,834,535,000
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7,834,535,000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2,314,535,000
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2,314,535,000
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTSP Prov. Kaltim	100%		2,055,000,000
2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTSP Prov. Kaltim	5 paket	smd	1,750,000,000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	305,000,000
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		300,000,000
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan	12 bulan	bru, ktm, bpn,	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelembagaan Pemerintah Daerah	konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi		kk, ppu, smd, psr	300,000,000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	85 Nilai AKIP		220,000,000
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	180,000,000
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	40,000,000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2800 Izin/ Non Izin		350,000,000
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	1130 Izin/ Non Izin	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	100,000,000
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	1600 Izin/ Non Izin	smd	150,000,000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	70 Izin/ Non Izin	smd	50,000,000
2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang	4 PTSP	smd	50,000,000
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau	7 Perusahaan Industri Baru		1,245,000,000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	100 LKPM	smd	125,000,000
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah laporan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal	4 Laporan	smd	120,000,000
2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah izin-izin perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri di Kariangau yang di evaluasi	7 Perusahaan Industri	bpn, smd	1,000,000,000
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan		295,000,000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	btg, ktm, bpn, smd, kbr	220,000,000
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	1 Dokumen	btg, ktm, bpn, smd, kbr	75,000,000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan (IKM)	82 Indeks		280,000,000
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah media informasi pelayanan perijinan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	3 Media	smd	80,000,000
2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan	persentase pengaduan yang diselesaikan	60%	smd	200,000,000
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU		775,000,000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	4 Event	smd	700,000,000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	2 Pertemuan Bisnis	btg, ktm, bpn, ppu, smd, psr	75,000,000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				29,338,250,000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				29,338,250,000
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				29,338,250,000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perkantoran				8,767,350,000
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	8,767,350,000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		3,505,250,000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	bru, smd, luarPrv	3,505,250,000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2,463,100,000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi	1 Dokumen	bru, smd, luarPrv	2,463,100,000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan Ke Dalam Daerah	70 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				375,000,000
2.13.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	bru, bpn, smd, luarPrv	214,000,000
2.13.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, smd, luarPrv	161,000,000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	50 Orang		453,200,000
2.13.30.08	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah (JPD) tingkat Provinsi	50 Orang	smd, luarPrv	453,200,000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan				1,514,700,000
2.13.31.04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka	450 orang	smd, luarPrv	1,514,700,000
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%		9,582,750,000
2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet yang dibina	440 Orang	smd	9,582,750,000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	5%		2,676,900,000
2.13.33.03	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event	Jumlah atlet yang dibina	80 Orang	luarPrv	994,300,000
2.13.33.12	Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang mendapat penerangan	2 Stadion	smd	1,682,600,000
2.17	Perpustakaan				3,619,200,000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				3,619,200,000
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				3,619,200,000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,765,020,000
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1,765,020,000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				467,800,000
2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	100%	smd	43,000,000
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	424,800,000
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas				

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelembagaan Pemerintah Daerah				750,000,000
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	60 kegiatan	btg, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, luarPrv	750,000,000
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				33,500,000
2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	smd	33,500,000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan				414,600,000
2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka perpust. Konvesnional	340600 pemustaka	smd	414,600,000
		Jumlah Pemustaka perpust. Digital	6295 pemustaka		
		Jumlah Kerjasama Perpustakaan	15 MoU		
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan				60,280,000
2.17.24.02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi lokal yang berhasil dikumpulkan dan di alih mediakan	350 judul	smd	60,280,000
		Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan dan dilestarikan	320 judul		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah	320 judul		
2.17.26	Program Pegembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				50,000,000
2.17.26.01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	20 perpustakaan	smd	50,000,000
		jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	10 perpustakaan		
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mengikuti Diklat	30 orang		
2.18.19	Program pengelolaan Arsip				28,000,000
2.18.19.01	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	2 laporan	smd	28,000,000
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan				50,000,000
2.18.25.01	Pembinaan Internal dan Supervisi	Laporan pembinaan terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	15 laporan	smd	50,000,000
3	Urusan Pilihan				231,066,550,000
3.01	Kelautan dan Perikanan				29,960,850,000
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				29,960,850,000
3.01.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				29,960,850,000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		4,737,450,000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4,737,450,000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1,467,150,000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	20 Unit	smd	301,150,000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan	12 Bulan	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kelengkapan Sarana dan Prasarana			1,166,000,000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2,660,000,000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	60 Kali	smd	2,260,000,000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 Orang	smd	400,000,000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	225 Stel		
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	12 Dokumen		913,825,000
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bpn, smd	500,000,000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	bpn, smd	413,825,000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	157743 Ton		4,450,000,000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	60 KUB	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3,900,000,000
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan	235 Izin	bpn, smd	300,000,000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 Unit	btg, bpn, smd	250,000,000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	271339 Ton		1,250,000,000
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	65500 Ton		
		Nilai Ekspor Perikanan	36 Juta USD		
		Volume Ekspor Perikanan	2700 Ton		
		Tingkat Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita		
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Kawasan Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	2 Kawasan	bru, btg, bpn, kkr, smd	500,000,000
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya & Pengolahan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI)	15 Dokumen	bpn, smd	250,000,000
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	10 UKM	ktm, ppu, smd, psr	350,000,000
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitasi (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	2 Promosi	smd	150,000,000
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Percepatan Penyelesaian Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim	1 Dokumen		2,275,000,000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi	2 Pulau	smd	1,800,000,000
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	5 Pelaku Usaha	btg, bpn, smd	150,000,000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan Konswervasi yang Direhabilitasi	1 Kawasan	btg, kkr, smd	325,000,000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan	46 Pokmaswas		650,000,000
3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	10 Operasi	bru, btg, ktm, bpn, kkr, smd, psr	300,000,000
3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Juml;ah Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	10 Operasi	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr,	250,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perikanan	Perikanan		bpn, ktm, btg, psr	
3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	1 Dokumen	smd	100,000,000
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	125 Sampel		150,000,000
3.01.28.01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	125 Sampel	smd	91,000,000
3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar	125 Sampel	smd	59,000,000
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi	3000000000 Benur		10,986,425,000
3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah ketersediaan benih yang tersertifikasi	1 benih	bpn	223,500,000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Udang	15000000 Ekor	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr	7,762,925,000
3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah UPTD Perbenihan yang Direhabilitasi	2 UPTD	bpn, ppu	3,000,000,000
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihasilkan	65000 Ekor		421,000,000
3.01.30.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Standarisasi Benih Ikan	4 Sertifikat	kkk	146,800,000
3.01.30.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Benih Ikan Air Tawar	65000 Ekor	kkk	274,200,000
3.02	Pariwisata				11,767,000,000
3.02.01	Dinas Pariwisata				11,767,000,000
3.02.01.01	Dinas Pariwisata				11,767,000,000
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2,355,400,000
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2,355,400,000
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		2,804,000,000
3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	50 Item	smd	1,987,200,000
3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	816,800,000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1,457,600,000
3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	50 Kegiatan	smd	1,457,600,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	30 Kegiatan		
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				700,000,000
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	btg, smd	422,619,000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	277,381,000
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	0 Destinasi		1,000,000,000
3.02.15.07	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi destinasi KPP strategis	3 Promosi	smd	1,000,000,000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di	0 Kawasan		1,150,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		fasilitasi pengembangannya			
3.02.16.03	Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem	Jumlah kegiatan di destinasi strategis KPP yang difasilitasi Infrastruktur dan ekosistemnya	0 Kegiatan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	1,150,000,000
		Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	0 Destinasi		
		Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	0 Destinasi		
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya	0 Jenis Usaha		1,000,000,000
3.02.30.01	Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan SDM di KPP strategis	0 Kegiatan	bru, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	1,000,000,000
		Jumlah kegiatan pengembangan dan pengendalian usaha sarana pariwisata	0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pengembangan dan pengendalian usaha jasa pariwisata	0 Kegiatan		
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah Jenis Pelaku Ekraf yang difasilitasi dan ditingkatkan SDM nya	0 Jenis		1,300,000,000
3.02.31.01	Pengembangan Seni Pertunjukan	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf seni pertunjukan	0 Kegiatan	btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, luarPrv	1,300,000,000
		Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya	0 Kegiatan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf karya seni budaya	0 Kegiatan		
3.03	Pertanian				57,528,700,000
3.03.01	Dinas Perkebunan				32,068,850,000
3.03.01.01	Dinas Perkebunan				32,068,850,000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		3,322,300,000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kk, smd	3,322,300,000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2,119,989,800
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	24 Unit	smd	1,095,150,000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1,024,839,800
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		2,862,850,000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	2,100,150,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	smd	762,700,000
		Jumlah pakaian dinas	460 Stel		
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	20%		563,915,000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	228,730,000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	335,185,000
3.03.58	Program Peningkatan Produktivitas	Produktivitas komoditas perkebunan	19 Ton/Ha		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perkebunan	(Kelapa Sawit)			7,092,000,000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.3 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.68 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.77 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.1 Ton/Ha		
3.03.58.01	Intensifikasi komoditi	Luas kebun yang diintensifkan (Karet)	100 Ha	bru, smd	814,850,000
		Luas kebun yang diintensifkan (Kelapa)	20 Ha		
		Luas kebun yang diintensifkan (Kakao)	100 Ha		
		Luas kebun yang diintensifkan (Lada)	100 Ha		
3.03.58.02	Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi	160 Ha	smd	4,648,400,000
3.03.58.03	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Karet)	100 Ha	smd	1,628,750,000
		Luas kebun yang diremajakan (Kakao)	50 Ha		
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20%		141,375,000
3.03.60.04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20%	smd	141,375,000
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	30%		741,425,000
3.03.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina	50 Kelompok Tani	smd	534,175,000
3.03.61.04	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi	2 Produk	smd	207,250,000
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi		196,000,000
3.03.62.04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	2 Jenis	smd	86,000,000
3.03.62.05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan	11 Produk	btg, kkr, ppu, smd, psr	110,000,000
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan				552,300,000
3.03.65.05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi	50 Transaksi	smd	366,300,000
3.03.65.06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data informasi produk dan pasar	2 Informasi	smd	186,000,000
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	2 Kelompok Tani		328,650,000
3.03.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	50 Orang	smd	328,650,000
3.03.72	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas kebun sawit	1.313 Juta Ha		964,250,000
3.03.72.01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Peningkatan luas kebun sawit	100 Ha	smd	964,250,000
3.03.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas perkebunan (Karet)	135232 Ha		6,308,250,000
		Luas areal komoditas perkebunan (Kakao)	7172 Ha		
		Luas areal komoditas perkebunan (Kelapa)	21259 Ha		
		Luas areal komoditas perkebunan (Lada)	9328 Ha		
3.03.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Peningkatan luas kebun non sawit	470 Ha	smd	6,308,250,000
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Luas area yang dihijaukan	100000 Ha		300,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME	1 Perusahaan		
3.03.76.01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi	1 PMS	bru	150,000,000
3.03.76.03	Pengembangan kebun pada area cadangan carbon rendah	Luas areal cadangan karbon rendah	10000 Ha	smd	150,000,000
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	50%		250,000,000
3.03.77.01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV	60 PBS	smd	100,000,000
3.03.77.02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi	130 Unit	smd	150,000,000
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan	25 Orang		363,475,000
3.03.78.01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang	25 Orang	smd	363,475,000
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	5 Gapoktan		828,650,000
3.03.79.01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah kelompok tani	30 Kelompok Tani	smd	477,400,000
3.03.79.02	Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Jumlah asosiasi	5 Asosiasi	smd	351,250,000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	30 Perusahaan		475,000,000
3.03.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial	2 Database	smd	164,000,000
3.03.80.02	Pelayanan adminitrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP	10 Perusahaan	smd	122,500,000
3.03.80.03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi	20 Perusahaan	smd	188,500,000
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	20 Kelompok		262,600,000
3.03.81.01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan	20 Kelompok	smd	262,600,000
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	5 Komoditi		468,000,000
3.03.82.01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina	5 Kelompok Tani	smd	239,250,000
3.03.82.02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi	15%	smd	228,750,000
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	40%		300,000,000
3.03.83.01	Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun	99 Ha	smd	300,000,000
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	4 Kasus		573,350,000
3.03.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang ilegal	4 Sumber Benih	smd	247,900,000
		Pertemuan Pengawas Benih se-Kalimantan Timur	30 Orang		
		Pengawasan Peredaran Benih	5000000 Benih		
3.03.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah Benih yang Diawasi	20000000 Benih	smd	325,450,000
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih		450,100,000
3.03.85.01	Pengujian benih	Jumlah Jenis Benih yang Diuji di Laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa)	5000000 Benih	smd	109,100,000
3.03.85.02	Sertifikasi benih	Jumlah Benih Tersertifikasi dan Berlabel, Jumlah Retribusi Jasa Pemeriksaan/Sertifikasi	5000000 Benih	smd	341,000,000
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade	30 Kelompok		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		proteksi yang mengendalikan OPT			557,500,000
3.03.86.01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT	25 Kelompok Tani	smd	527,500,000
3.03.86.02	Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan	5 Regu	smd	30,000,000
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)				575,682,200
3.03.87.01	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak	10000 Kg dan Liter	kk, smd	521,432,200
3.03.87.02	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Jumlah uji APH, Biopestisida dan Pestisida Kimia	3 Kali	smd	54,250,000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman				1,471,188,000
3.03.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Bahan Tanaman Komoditas Perkebunan	132520 Benih	kk	1,146,163,000
3.03.88.02	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Terpeliharanya kebun Induk/Kebun Koleksi dan BPT	11.5 Ha	kk	325,025,000
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				25,459,850,000
3.03.02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				25,459,850,000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%		3,909,707,000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	580 surat	ppu, smd	3,909,707,000
		Jumlah tabung pemadam kebakaran yang tersedia	12 Tabung		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan : Roda 6 (1 unit), Roda 4 (24 unit), Roda 3 (1 unit), Roda 2 (54 unit)	80 Unit		
		Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	42 Unit		
		Jumlah cetakan yang disediakan	700 Eksemplar		
		Jumlah penggandaan yang disediakan	90000 Lembar		
		Jumlah gedung yang disediakan jasa kebersihan	3.314 M2/Bulan		
		Jumlah tenaga keamanan	15 Orang		
		Jumlah tenaga non PNS	55 Orang		
		Jumlah pemakaian jasa komunikasi	20000000 Rp		
		Jumlah pemakaian jasa sumber daya air	1200 M3		
		Jumlah pemakaian jasa listrik	2800000 Kwatt		
		Jumlah pemakaian jasa internet	115000000 Rp		
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio aparatur yang memanfaatkan Personal Computer	1		2,973,550,000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (akumulasi)	2 Unit	ppu, smd	267,800,000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	70 Unit	ppu, smd	2,705,750,000
		Luas halaman yang dipelihara	800 M2		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara : Roda 6 (1 unit), Roda 4 (15 unit), Roda 3 (1 unit), Roda 2 (11 unit), Hand Traktor (2 Unit), Traktor (2 Unit)	32 Unit		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Laporan kegiatan koordinasi	1 Dokumen		1,972,743,000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi yang disediakan	25 Buah	ppu, smd	1,623,693,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95 Kegiatan		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	195 Kegiatan		
		Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	5000 Porsi		
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	25 orang	ppu, smd	349,050,000
		Jumlah pakaian dinas	167 Stel		
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77 Nilai		1,080,000,000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	666,000,000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	14 Laporan	smd	414,000,000
3.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0.01%		948,850,000
		Penurunan kasus cemaran mikroba	0.02%		
3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan	20 Orang	bpn, ppu, smd, psr	200,000,000
		Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	1 Unit usaha		
3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah promosi pembangunan	3 Kali	smd	548,850,000
		Jumlah laporan informasi harga komoditas peternakan	60 Kali		
3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Temak	Jumlah sertifikat NKV yang diterbitkan	2 Sertifikat	bpn, smd	200,000,000
		Jumlah kasus cemaran mikroba	1000 Kasus		
3.03.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Peningkatan populasi kawasan mini ranch	137 ekor sapi		5,800,000,000
3.03.34.02	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Jumlah mini ranch yang dikembangkan	5 lokasi	bru, ktm, kkr, smd, kbr, psr	5,200,000,000
3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	4 Dokumen	smd	300,000,000
		Jumlah berita peternakan melalui elektronik (website)	50 Berita		
3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah mitra perunggasan	150 Orang	bru, bpn, ppu, smd, psr	300,000,000
		Jumlah kelompok peserta sosialisasi asuransi ternak	10 Kelompok		
		Jumlah peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS)	50 Orang		
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana	50%		950,000,000
		Peningkatan status wilayah kesehatan hewan Brucellosis	100%		
		Peningkatan status wilayah kesehatan hewan Avian Influenza (AI)	60%		
		Peningkatan status wilayah kesehatan hewan rabies (anjing gila)	40%		
		Penurunan kasus parasiter/cacingan	36%		
		Peningkatan informasi kesehatan hewan melalui iSIKHNAS	5%		
		Penurunan kasus gangguan reproduksi	60%		
		Persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas	5%		
		Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan Rabies (Anjing Gila)	10%		
3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah kejadian penyakit jembrana	15 Kasus	bru, btg, bpn, ppu, smd, psr	450,000,000
		Jumlah kejadian penyakit AI	63 Kasus		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah kejadian penyakit parasiter/cacingan	900 Kasus		
		Jumlah kejadian penyakit rabies	15 Kasus		
		Jumlah kejadian penyakit Brucellosis	0 Kasus		
3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah petugas iSIKHNAS yang aktif	50 Orang	smd	200,000,000
		Jumlah laporan pertemuan lalu lintas hewan	3 Laporan		
3.03.89.03	Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus gangguan reproduksi	1500 Kasus	smd, psr	300,000,000
		Jumlah sampel obat hewan	7 Sampel		
3.03.90	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan angka kelahiran	2000 ekor		6,025,000,000
3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	Jumlah Pedet yang hidup sampai 2 bulan	2000 ekor	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, psr	4,625,000,000
		Pejantan Pemacek	100 Ekor		
3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Biogas yang dibangun	25 Unit	bru, ktm, bpn, kkr, smd, psr	1,000,000,000
		Inventarisasi alat mesin peternakan (alsinnak)	1 Buku		
3.03.90.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	Jumlah profil kelompok ternak	5 Kelompok	smd	400,000,000
		Jumlah konsep buku induk ternak	1 Buku		
		Jumlah proposal permohonan bantuan yang masuk melalui Biro Sosial	12 Proposal		
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan sampel yang diperiksa	10%		800,000,000
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah analisis pengujian sampel penyakit hewan	750 Pengujian	smd	400,000,000
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis pengujian sampel pangan asal hewan	600 Pengujian	bru, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	400,000,000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi dan distribusi semen beku	0%		1,000,000,000
		Peningkatan produksi bibit ternak sapi, rusa, dan ayam	10%		
3.03.92.01	Peningkatan produksi dan distribusi Semen Beku	Jumlah ternak bull	8 Ekor	ppu	350,000,000
3.03.92.02	Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah sapi bibit yang dihasilkan	13 Ekor	ppu	650,000,000
		Jumlah rusa bibit yang dihasilkan	20 (Ekor)		
		Produksi HPT	700 (Ton)		
3.04	Kehutanan				117,160,000,000
3.04.01	Dinas Kehutanan				117,160,000,000
3.04.01.01	Dinas Kehutanan				25,687,570,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2,661,100,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, bru, luarPrv	2,661,100,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1,844,890,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, psr	596,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd, luarPrv	1,248,890,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	100%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah			1,877,900,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, psr, kbr, smd, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	1,490,000,000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	170 Stell	bpn, smd, kbr, luarPrv	387,900,000
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		1,018,400,000
3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	611,900,000
3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, ktm, bpn, smd, kbr, psr, luarPrv	406,500,000
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Persentase pengelolaan kawasan hutan	40%		4,000,010,000
3.04.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Jumlah Dokumen Draf Peraturan dan Penyusunan Naskah Akademis	2 Dokumen	bru, smd, luarPrv	1,485,000,000
		Jumlah pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	40 Laporan		
3.04.16.02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah perusahaan yang sudah RIL/RIL C	7 IUPHHK	bru, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, mah, luarPrv	750,000,000
		Jumlah Pelatihan PHPL & RIL	8 Pelatihan		
3.04.16.03	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah laporan pendampingan, identifikasi perubahan status, dan sinkronisasi KPH	3 Laporan	bpn, smd, luarPrv	738,500,000
3.04.16.05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah Laporan Penertiban, Pengawasan Pengendalian Peredaran, dan Rekonsiliasi Penerimaan PNBP	40 Laporan	bru, bpn, smd, psr	1,026,510,000
		Jumlah Laporan Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi IU-IPHHK	25 Laporan		
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	1 DAS Prioritas		1,279,000,000
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	10 Laporan	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	250,000,000
3.04.39.15	Pengelolaan DAS	Jumlah Sistem Informasi DAS Berbasis IT	1 Laporan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, luarPrv	690,000,000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi/Realisasi keberhasilan penanaman, dokumen peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS dan Dokumen RPDAS	5 Laporan		
3.04.39.16	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Monitoring Peredaran Benih Tanaman Hutan	14 Laporan	bru, ktm, bpn, ppu, smd, psr, luarPrv	339,000,000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi	20%		842,100,000
3.04.41.24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	7 Laporan	bru, bpn, kkr, smd, kbr, psr	183,900,000
3.04.41.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 Laporan	bru, bpn, smd, kbr, psr,	108,900,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.41.26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang diberikan bimbingan teknis	5 IUPHHK-HA/HT	luarPrv ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	549,300,000
3.04.42	Program Penyuluhan, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN dan Perhutanan Sosial	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN dan Perhutanan Sosial	50%		2,560,320,000
3.04.42.36	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan	7 Laporan	bru, ktm, bpn, kkr, smd, kbr, psr, luarPrv	1,089,000,000
		Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	2 Laporan		
3.04.42.37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah Laporan rapat pokja dan sosialisasi	7 Laporan	bru, ktm, kkr, smd, kbr, luarPrv	1,021,320,000
		Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Usaha, Monev Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Pemanfaatan Sumber Dana PMDH/Comdev/CSR	38 Laporan		
3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Jumlah laporan identifikasi/inventarisasi/pemetaan resolusi konflik, pembinaan dan pendampingan hutan adat serta monev hutan adat	3 Laporan	bru, smd, luarPrv	450,000,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	50%		600,000,000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah kegiatan temu teknis KTH, Sekolah Lapangan, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari	4 Laporan	bru, smd, luarPrv	300,000,000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	9 Laporan	ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300,000,000
3.04.44	Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	50%		534,600,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	4 Laporan	bru, mah, kbr, smd, kkr, bpn, ktm, luarPrv	287,800,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	246,800,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	25%		4,999,250,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	72 Laporan	bru, smd, luarPrv	2,684,246,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	20 Laporan	bru, smd, luarPrv	1,377,251,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	455,441,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	482,312,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		535,000,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	6 Laporan	bru, bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	535,000,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		2,000,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	120 Hektar	kk, ppu, smd, luarPrv	2,000,000,000
		Luas Penanaman	100 Hektar		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	30%		535,000,000
3.04.48.03	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	13 Sertifikasi	bru, smd, luarPrv	123,800,000
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pengedar benih /bibit	16 SK	bru, smd, luarPrv	94,200,000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	60 Laporan	bru, smd, luarPrv	317,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	100 Hektar	bru, psr, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, luarPrv	400,000,000
3.04.01.02	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto				9,728,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		598,804,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	598,804,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		141,696,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		48,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		93,696,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		237,500,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	kk, smd, luarPrv	152,400,000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	114 Stell	bpn, smd, luarPrv	85,100,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	5%		462,500,000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	2 Laporan	kk, smd, luarPrv	462,500,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	10%		462,500,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 Laporan	kk, smd, luarPrv	462,500,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	31 Unit	kk, smd, luarPrv	1,189,250,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	kk, smd, luarPrv	1,584,450,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	4 Laporan	kk, smd, luarPrv	1,056,400,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	4 Laporan	kk, smd, luarPrv	569,900,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		462,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan	6 laporan		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Hutan			462,500,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	86 Hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	110 Hektar	kk, smd	1,750,000,000
		Luas Penanaman	86 Hektar		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	10%		462,500,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	kk, smd	350,000,000
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit/Benih yang Bersertifikat	20%	kk, smd	112,500,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	86 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	86 Hektar	kk, smd, luarPrv	400,000,000
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		350,000,000
3.04.50.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinergitas	2 Laporan	smd, luarPrv	50,000,000
3.04.50.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan, bantuan hukum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum	3 Laporan	kk, ppu, smd, luarPrv	300,000,000
3.04.01.03	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				10,192,680,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		435,100,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, smd	435,100,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		297,480,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	112,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	185,480,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		264,400,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru	213,300,000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	73 Stell	bru	51,100,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	50%		1,109,400,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial	3 Laporan	bru	235,900,000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	3 Laporan	bru, smd, luarPrv	720,500,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	3 5 Laporan	bru, smd, luarPrv	153,000,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	75%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	20 Unit	bru, smd, luarPrv	2,085,550,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	12 Laporan	bru, smd, luarPrv	1,211,150,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	12 Laporan	bru, smd, luarPrv	681,400,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca	12 Laporan	bru, smd,	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kebakaran	Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhuta, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar		luarPrv	421,900,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		628,400,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	20 Laporan	bru, smd	628,400,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	200 Hektar	bru, smd, luarPrv	1,750,000,000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	25%		112,200,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	bru, smd, luarPrv	112,200,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	200 Hektar	bru, smd, luarPrv	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	20%		795,700,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	7 Laporan	bru, smd, luarPrv	295,700,000
		Jumlah Laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan dan pembinaan industri hasil hutan pada pemegang IPHH	3 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan hutan, pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	10 Laporan	bru, smd, luarPrv	500,000,000
		Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan pembinaan pengelolaan usaha perhutanan sosial dan kemitraan	3 Kelompok Tani Hutan		
3.04.01.04	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				10,228,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		666,790,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	666,790,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		268,710,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	16,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	252,710,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		192,500,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn	165,000,000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stell		27,500,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha	10%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan			657,750,000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	249,000,000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	2 Laporan	kbr, luarPrv	200,000,000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	2 Laporan	ppu, luarPrv	208,750,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	10%		473,000,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	473,000,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	32 Unit	bpn, ppu, kbr, luarPrv	1,174,050,000
		Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	2 Laporan		
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	1,597,650,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	5 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	1,056,400,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	6 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	571,900,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		719,250,000
3.04.46.03	Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	4 Laporan	bpn, ppu, psr	262,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	6 Laporan	bpn, ppu	456,750,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	100 Hektar	bpn, smd, kbr, luarPrv	1,470,000,000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	4 Laporan	bpn, kbr, luarPrv	280,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	100 Hektar	bpn, kbr, luarPrv	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	10%		700,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarPrv	250,000,000
		Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	6 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan bantuan hukum penyidikan, penegakan hukum, advokasi, konsultasi bantuan hukum dan identifikasi permohonan masyarakat adat	10 Laporan	bpn, ppu, smd, luarPrv	450,000,000
		Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan	2 Kelompok Tani Hutan		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		kelembagaan kelompok tani hutan dan pembinaan pengelolaan usaha perhutanan sosial dan kemitraan			
3.04.01.05	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				10,528,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		565,800,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn, smd, luarPrv	565,800,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		530,600,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	46,500,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	484,100,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		381,600,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn, smd, luarPrv	278,400,000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	76 Stell	bpn, luarPrv	103,200,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	10%		260,528,400
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	2 Laporan	bpn, kkr	260,528,400
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	75%		5,049,924,400
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Unit	bpn, kkr	895,290,800
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	7 Laporan	bpn, kbr, ppu, kkr, luarPrv	3,065,456,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	16 Laporan	bpn, kkr, kbr	749,593,600
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	4 Laporan	kk, ppu, kbr	339,584,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		677,012,200
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	24 laporan	bpn, kbr, ppu, kkr, luarPrv	677,012,200
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	105 Hektar		2,012,535,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	105 Hektar	bpn, ppu, kbr	2,012,535,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	105 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Lokasi Rehabilitasi Hutan Lahan	105 Ha	bpn, ppu	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	25%		650,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	kk, psr	260,524,000
		Jumlah pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, koordinasi dan sinergitas antar KPH se Kalimantan Timur	7 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan identifikasi, inventarisasi daerah rawan kerusakan kawasan hutan,	10 Laporan	kk, kbr	389,476,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Pengamanan Kawasan Hutan, Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat			
		Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	3 Kelompok Tani Hutan (KTH)		
3.04.01.06	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				10,028,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		485,420,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	485,420,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		468,080,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	150,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	324800000 Bulan	psr	318,080,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		174,500,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	psr	150,000,000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Stell	psr	24,500,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Persentase Pengelolaan	4 KTH		514,300,000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	2 Laporan	psr, luarPrv	189,300,000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	4 Kelompok Tani Hutan (KTH)	psr, luarPrv	175,000,000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan Peningkatan kelembagaan KTH	4 Kelompok Tani Hutan (KTH)	psr	150,000,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	100%		656,100,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok tani yang dilakukan pembinaan pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan	4 Kelompok Tani Hutan	psr, luarPrv	411,100,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 5 Laporan	psr	245,000,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100 Persen		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	psr, luarPrv	1,411,750,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan				2,452,500,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	5 Laporan	psr	320,000,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	5 Laporan	psr	215,750,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi	485000000%		485,000,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	5 laporan	psr	485,000,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	200 Hektar	psr	1,750,000,000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		194,600,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	psr	194,600,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	2 Laporan	psr	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPMP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		500,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	5 Laporan	psr	250,000,000
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan, bantuan hukum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum	5 Laporan	psr	250,000,000
3.04.01.07	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				9,833,750,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		483,750,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	483,750,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		250,000,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	49,020,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	200,980,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		150,000,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, ktm, bpn	150,000,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	50%		462,500,000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	1 Laporan	btg, kkr	62,500,000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	6 Laporan	kk, smd	118,000,000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	1 Laporan	kk	132,000,000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari	6 Laporan	kk	44,250,000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	5 Laporan	kk	105,750,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	10%		462,500,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan	5 Laporan	kk	201,325,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Sosial			
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	1 Laporan	kkr	111,175,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	2 5 Laporan	btg	80,000,000
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah kegiatan Pembinaan	5 Laporan	kkr	70,000,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	25%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	kkr	875,400,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	5 Laporan	kkr, smd	2,944,600,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	5 Laporan	kkr, smd	505,000,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	5 Laporan	kkr	75,000,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		462,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	5 laporan	kkr, smd	462,500,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	350 Hektar	ktm, kkr	1,750,000,000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Penedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	25%		462,500,000
3.04.48.03	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	3 Sertifikasi	kkr	207,450,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	1250 Bibit	kkr	102,200,000
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pencedar benih /bibit	3 SK	kkr	78,850,000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	3 Laporan	kkr	74,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	350 Hektar	ktm	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		550,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan Peningkatan kelembagaan KTH	1 Kelompok Tani Hutan (KTH)	kkr, smd	550,000,000
		Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan dan pembinaan industri hasil hutan pada pemegang Ijin Usaha Industri Primer hasil hutan kayu (IU-IPHHK)	3 Laporan		
		Jumlah pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	5 Laporan		
		Jumlah laporan Identifikasi, Inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan dan pengamanan kawasan hutan	1 Laporan		
3.04.01.08	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan				10,278,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		787,150,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	787,150,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		160,450,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	80,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	80,450,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		330,400,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd	330,400,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	100%		391,700,000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	10 Laporan	smd	391,700,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	100%		501,800,000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	11 Laporan	smd	501,800,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	43 Unit	smd	1,827,600,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	58 Laporan	smd	2,031,000,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	4 Laporan	smd	466,400,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Terlaksananya Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	2 Laporan	smd	75,000,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		412,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	17 laporan	smd	412,500,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar		1,800,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	70 Hektar	smd	1,800,000,000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		494,000,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	kkp	494,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	70 Hektar	smd	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan	100%		600,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan dan pembinaan industri hasil hutan pada pemegang IPHH	7 Laporan	kkp	200,000,000
		Jumlah Laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani	10 Laporan		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		perijinan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan			
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	10 Kelompok Tani Hutan (KTH)	kkp	400,000,000
		Jumlah laporan perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Delta Mahakam dan sosialisasi perlindungan hutan di wilayah Delta Mahakam	12 Laporan		
3.04.01.09	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				10,328,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		478,000,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	478,000,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		250,000,000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	100,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	150,000,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		150,000,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	ktm, smd, luarPrv	150,000,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	10%		462,500,000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	1 Laporan	ktm	226,444,000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1 Laporan	ktm	170,964,000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	1 Laporan	ktm	65,092,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	35%		690,000,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas	2 Laporan	ktm	360,000,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 Laporan	ktm	160,000,000
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah kegiatan Pembinaan	2 Laporan	ktm	170,000,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	11 Unit	ktm	1,887,950,000
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	6 Laporan	ktm	1,649,250,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	3 Laporan	ktm	406,400,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	3 Laporan	ktm	456,400,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		462,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	4 laporan	ktm	462,500,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	250 Hektar	ktm	1,750,000,000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100%		235,000,000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	60000 Bibit	ktm	235,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	250 Hektar	bru, ktm, smd, luarPrv	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan	10%		1,050,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan	3 Laporan	ktm	650,000,000
		Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	4 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	5 Laporan	ktm	400,000,000
3.04.01.10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				10,328,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		512,600,000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr	512,600,000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		105,000,000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr	105,000,000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		360,400,000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd, kbr, luarPrv	245,500,000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	55 Stell	kbr	114,900,000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	100%		462,500,000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL	10 Laporan	kbr	229,380,000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	10 Laporan	kbr, mah	233,120,000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	100%		462,500,000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	207,025,000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	kbr, mah, luarPrv	255,475,000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	10%		4,400,000,000
3.04.45.01	Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	smd, kbr, mah, luarPrv	971,400,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
3.04.45.02	Penyelenggaraan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Sylvopastura, Kampanye, dan Patroli	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	1,777,450,000
3.04.45.03	Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Kegiatan Posko Siaga, dan Pemadaman	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	905,200,000
3.04.45.04	Penyelenggaraan Penanganan Pasca Kebakaran	Jumlah Kegiatan Monev Penanganan Pasca Kebakaran, Penafsiran Luas Areal Karhutla, Investigasi sebab-sebab Kebakaran, Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal bekas terbakar	0 Laporan	smd, kbr, mah, luarPrv	745,950,000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		925,000,000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas	10 Laporan	smd, kbr, luarPrv	462,500,000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	0 laporan	smd, kbr, mah	462,500,000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)				1,750,000,000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	0 Hektar	smd, kbr	1,750,000,000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 hektar		400,000,000
3.04.49.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	5 Laporan	smd, kbr, luarPrv	400,000,000
3.04.51	Program Pengelolaan KPMP				950,000,000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pengawasan, pengendalian Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Jumlah laporan Penerimaan luran Hasil Hutan pada unit manajemen dan Koordinasi	4 Laporan	smd, kbr, luarPrv	486,750,000
		Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan	4 Laporan		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	7 Kelompok Tani Hutan (KTH)	smd, mah, kbr	463,250,000
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				14,650,000,000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				14,650,000,000
3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				14,650,000,000
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2,593,060,000
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, ppu, smd, kbr, mah, psr, kkr, btg, ktm, bpn	2,593,060,000
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya disiplin aparatur	100%		1,142,110,000
3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	12 Unit	smd	679,500,000
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	462,610,000
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		1,233,830,000
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	25 Kali	bru, smd	870,000,000
		Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar	16 Kali		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		daerah			
3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 Orang	smd	363,830,000
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	60%		1,060,000,000
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	360,000,000
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	6 Kali	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, psr	700,000,000
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	2%		2,100,000,000
3.05.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah DED yang disusun	10 Buah	kk, smd, kbr, mah	1,500,000,000
3.05.27.02	Pengembangan Bioenergi	Jumlah Potensi pengembangan instalasi biogas skala rumah tangga	50 rumah tangga	bru, smd	300,000,000
		Jumlah Perusahaan dengan potensi energi berbasis POME	5 perusahaan		
		Jumlah penyalur BBM bersubsidi	60 penyalur		
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi	80 penyalur		
3.05.27.03	Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air	Jumlah OPD yang hemat listrik dan air	2 Laporan	ktm, smd	300,000,000
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	98%		1,800,000,000
3.05.37.03	Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Data Dasar untuk Basic Desain Renc Penyediaan Tenaga Listrik	3 Laporan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg	1,000,000,000
3.05.37.04	Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah monev pengembangan/pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	20 Lokasi	bru, ppu, smd, kbr, psr, kkr, btg, ktm, bpn	500,000,000
3.05.37.05	Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	25 Perusahaan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	300,000,000
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	3%		850,000,000
3.05.39.01	Konservasi Air Tanah	Jumlah peta konservasi air tanah CAT	10 Peta	btg, bpn, smd	400,000,000
3.05.39.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	60 Rekomtek	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	450,000,000
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	30%		571,000,000
3.05.41.01	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi	Luas Lahan yang direklamasi	8647 Hektar	bru, smd	571,000,000
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	80 Perusahaan		2,500,000,000
3.05.42.01	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Teknis Pertambangan	Jumlah penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	100 Milyar	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	500,000,000
3.05.42.02	Pembinaan dan pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Produksi Batubara	240 Juta Ton	bru, ktm, kkr, smd, kbr	650,000,000
		Jumlah Dana PPM	300 Milyar		
3.05.42.03	Pemantauan Perijinan Pertambangan	Jumlah Perusahaan Non CNC yang dipantau	75 Perusahaan	bru, btg, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300,000,000
3.05.42.04	Penggunaan Efisiensi biodiesel pada	Jumlah perusahaan yang menggunakan	20 Perusahaan	bru, ktm, kkr,	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	perusahaan tambang batubara	biodiesel		ppu, smd, kbr, psr	750,000,000
3.05.42.05	Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Ketaatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan	25 Perusahaan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	300,000,000
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	95%		800,000,000
3.05.43.01	Pemetaan sumberdaya Geologi	Data Lifting	4 Triwulan	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr	525,000,000
		Peta Geologi Tematik	4 Peta		
3.05.43.02	Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara	Data dan informasi Tekno ekonomi sumberdaya dan cadangan di Kaltim	7 Kab/Kota	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	275,000,000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				243,139,391,169
4.01	Kesekretariatan Daerah				118,991,200,000
4.01.03	Sekretariat Daerah				66,884,800,000
4.01.03.01	Biro Umum				35,000,000,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14,957,200,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	14,957,200,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8,195,600,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	600,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	7,595,600,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				9,052,400,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	45 Kegiatan	smd	8,500,000,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	190 Orang	smd	552,400,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				715,000,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	10,000,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18 Dokumen	smd	705,000,000
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum				811,500,000
4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro				84,500,000
4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda				499,000,000
4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan				228,000,000
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda				1,268,300,000
4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda				357,500,000
4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan				910,800,000
4.01.03.02	Biro Hubungan Masyarakat				8,248,400,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengelolaan keuangan biro Humas	12 Bulan		620,200,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	620,200,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				87,500,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 Unit	smd	57,500,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	10 Bulan	smd	30,000,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				268,550,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	10 Kegiatan	smd	150,000,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	20 Kegiatan	smd	118,550,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				22,600,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	13,400,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	4 Dokumen	smd	9,200,000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama				700,000,000
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah	20 Laporan	smd	250,000,000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	Laporan administrasi kerjasama Pemda yang terlayani dengan baik	20 Laporan	smd	200,000,000
4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Laporan kerjasama antar perintah	20 laporan	smd	250,000,000
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan				5,889,550,000
4.01.88.02	Kerjasama media	Jumlah kerjasama media	20 Media Massa	smd	167,000,000
4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi	1000 Berita	smd	5,518,050,000
4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi	2 2	smd	204,500,000
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan				660,000,000
4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda	90 Instansi	smd	291,500,000
4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan	400 Kegiatan	smd	368,500,000
4.01.03.03	Biro Hukum				2,702,400,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	95%		313,900,000
		Terlayannya Administrasi Perkantoran	95%		
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	313,900,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	10,000,000
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	32 Unit		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		369,500,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam	15 Kegiatan	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelembagaan Pemerintah Daerah	dan Luar Daerah			326,500,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Jumlah	smd	43,000,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				9,000,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	smd	6,500,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	10 Dokumen	smd	2,500,000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan	10 Jumlah		300,000,000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	10 Perda	smd	300,000,000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi				250,000,000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah	650 Produk Hukum	smd	250,000,000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik	660 Jumlah		150,000,000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum	660 Jumlah	smd	150,000,000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	250 Jumlah		600,000,000
4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan	250 Produk Hukum	smd	600,000,000
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kot	90%		530,000,000
4.01.33.01	Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	90%	smd	370,000,000
4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	85%	smd	160,000,000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	90%		170,000,000
4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM	90%	smd	170,000,000
4.01.03.04	Biro Organisasi				3,061,200,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Laporan yang dikerjakan sesuai aturan	100%		1,369,800,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran	23 Laporan	smd	1,369,800,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				186,900,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor	0 Unit	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	yang diadakan			110,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	0 Unit	smd	76,900,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi sesuai tupoksi	70%		280,000,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi	1 Laporan	smd, luarPrv	280,000,000
4.01.21	Program pengembangan SPM	Terlaksananya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%		512,000,000
4.01.21.01	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM	6 SPM	smd, luarPrv	512,000,000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	100%		246,000,000
4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey	1 Laporan	smd, luarPrv	246,000,000
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Area Perubahan yang dilaksanakan	100%		34,300,000
4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	smd, luarPrv	34,300,000
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				114,000,000
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Laporan	smd, luarPrv	114,000,000
		Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim	1 Laporan		
		Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP	1 Laporan		
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1 Pergub		
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKjIP	1 Pergub		
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK	1 Laporan		
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan				232,000,000
4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi				120,000,000
4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota				112,000,000
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan				86,200,000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan				86,200,000
4.01.03.05	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				3,374,800,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100%		770,900,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				770,900,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	2 Unit		25,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	25,000,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	80%		326,400,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	smd	276,400,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	2 Kegiatan	smd	50,000,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	90%		3,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Pemerintahan				
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	2,000,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	smd	1,000,000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Dokumen		211,400,000
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	1 Dokumen	smd	211,400,000
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pembakuan Nama Rupabumi	100%		854,500,000
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan	2 Dokumen	ktm, kkr, smd	197,000,000
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim	1 Dokumen	smd	225,400,000
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah				432,100,000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	100%		541,800,000
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan	1 Dokumen	smd	268,900,000
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	smd	272,900,000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Otda	1 Dokumen		373,900,000
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	smd	373,900,000
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		267,900,000
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen/Laporan	smd	267,900,000
4.01.03.06	Biro Kesejahteraan Rakyat				4,789,200,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	95%		580,100,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd, luarPrv	580,100,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	95%		213,300,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	15 Unit	smd	154,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	59,300,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	95%		541,000,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Dokumen	smd, luarPrv	506,000,000
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Dokumen		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd	35,000,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen	Meningkatnya kinerja Instansi	95%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintah			47,000,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	25,000,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	10 Dokumen	smd	22,000,000
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	90%		950,000,000
4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	4 Dokumen	smd, luarPrv	700,000,000
4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	4 Dokumen	smd, luarPrv	250,000,000
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	90%		1,020,000,000
4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	smd, luarPrv	550,000,000
4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4 Dokumen	smd, luarPrv	250,000,000
4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	4 Dokumen	smd, luarPrv	220,000,000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	90%		800,000,000
4.01.19.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	smd, luarPrv	300,000,000
4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Dokumen	smd, luarPrv	250,000,000
4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Dokumen	smd, luarPrv	250,000,000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat	90%		637,800,000
4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Hibah dan Bantuan Sosial	2 Dokumen	smd	337,800,000
4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kesra	1 Dokumen	smd	100,000,000
4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	smd	200,000,000
4.01.03.07	Biro Perekonomian				1,927,600,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		413,850,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	413,850,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		270,000,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr,	270,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
				bpn, ktm, btg, psr	
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20 kegiatan		
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%		133,950,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	5 Dokumen	smd	77,950,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	4 Dokumen	smd	56,000,000
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	2 Kebijakan		290,000,000
4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	3 kali	smd	76,000,000
4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	1 kali	smd	69,000,000
4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	2 kali	smd	108,000,000
4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	1 kali	smd	37,000,000
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Tersedianya Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah	1 Kebijakan		419,800,000
		Tersedianya Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola BUMD	1 Kebijakan		
		Tersusunnya Kebijakan Promosi Daerah Sarana dan Prasarana Perekonomian	1 Kebijakan		
4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah	1 Dokumen	smd	105,000,000
4.01.49.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	1 Dokumen	smd	100,000,000
4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	8 kali	smd	214,800,000
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	6 Kebijakan		400,000,000
4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan	smd	260,000,000
4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	1 kali	smd	60,000,000
4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	2 kali	smd	80,000,000
4.01.03.08	Biro Administrasi Pembangunan				5,477,600,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				868,900,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	868,900,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				207,500,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	5 Unit	smd	120,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	15 Unit	smd	87,500,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				928,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	smd, psr, luarPrv	828,000,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	20 Kegiatan	luarPrv	100,000,000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				177,400,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	9 Dokumen	bpn, smd, luarPrv	118,400,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	59,000,000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				805,000,000
4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	tertib administrasi	100%	bpn, smd, luarPrv	225,000,000
4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan/ peningkatan kapasitas	50 orang	bpn, smd, luarPrv	370,000,000
4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	250 paket	bpn, smd, luarPrv	210,000,000
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan				1,118,400,000
4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi APBD dan Sektoral	1 dokumen	bpn, smd, luarPrv	372,800,000
4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi APBD dan Sektoral	1 dokumen	bpn, smd, luarPrv	372,800,000
4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	1 dokumen	smd, luarPrv	372,800,000
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program				1,372,400,000
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Koordinasi antara OPD terkait Provinsi dan Kabupaten/kota	1 kali	bru	189,000,000
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Meningkatnya pengendalian program kegiatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan	90%	bru, bpn, smd, luarPrv	858,400,000
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Meningkatnya pengendalian program kegiatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan	90%	smd, luarPrv	325,000,000
4.01.03.09	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				2,303,600,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		287,200,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	287,200,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		50,500,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	37,500,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	13,000,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		536,100,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	14 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	536,100,000
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur	Terlaksananya Sinergitas dan	90%		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Fisik dan Bangunan	Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan			548,000,000
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	239,000,000
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	4 kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	204,500,000
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	4 kali	smd, luarPrv	104,500,000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100%		478,500,000
4.01.68.01	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Jumlah Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	120,000,000
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Jumlah Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	4 kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	120,000,000
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	4 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	238,500,000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral	90%		403,300,000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	203,800,000
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	199,500,000
4.01.04	Sekretariat DPRD				45,000,000,000
4.01.04.01	Sekretariat DPRD Provinsi				45,000,000,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik	100 Persen		10,206,000,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	10,206,000,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5,423,580,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia	334 Unit	smd	325,000,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	3,598,580,000
4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	1500000000 tahun	smd	1,500,000,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80%		5,570,000,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				4,270,000,000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota yang mengikuti pelatihan	100 Orang	smd	1,300,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dengan baik	80 Persen		1,059,020,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	80 Dokumen	smd	272,020,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	21 dokumen	smd, luarPrv	787,000,000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	80%		22,741,400,000
4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Raperda yang telah dikoordinasi	10 kegiatan	bpn, smd	1,335,000,000
4.01.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD	3 kali	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr	14,325,000,000
4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji	4 Kasus	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarPrv	102,500,000
4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi	1 kasus	smd	100,500,000
4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik	850 kegiatan	smd, luarPrv	2,056,800,000
4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah pelaksanaan rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 paket	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	4,821,600,000
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				7,106,400,000
4.01.05.01	Badan Penghubung Provinsi				7,106,400,000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2,409,345,000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2,409,345,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2,279,425,000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	62 Jenis	smd	624,425,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1,655,000,000
		Luas bangunan yang direhab	600 M2		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		1,071,400,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Kegiatan	smd	802,000,000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	25 Orang	smd	269,400,000
		Jumlah pakaian dinas	174 Stel		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%		44,500,000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	5 Dokumen	smd	26,500,000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	smd	18,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII	24000 Orang		601,230,000
4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun	23 Kegiatan	smd	162,000,000
4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun	7 Kegiatan	smd	50,750,000
4.01.38.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	1 Laporan	smd	388,480,000
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	100%		700,500,000
4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	60 Kunjungan	smd	261,500,000
4.01.39.02	Pelayanan mess	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess	1 Laporan	smd	194,000,000
4.01.39.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1077 Dokumen	smd	245,000,000
4.02	Pengawasan				6,603,500,000
4.02.01	Inspektorat				6,603,500,000
4.02.01.01	Inspektorat				6,603,500,000
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,174,400,000
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	1 1 Tahun	smd	1,174,400,000
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				160,000,000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	10 10 unit	smd	160,000,000
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				970,300,000
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas kelembagaan pemda yang dilaksanakan	60 60 kegiatan	smd	549,300,000
4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	60 60 orang	smd	421,000,000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				153,300,000
4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	7 7 dokumen	smd	153,300,000
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				511,500,000
4.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	12 12 kegiatan	smd	511,500,000
4.02.87	Program pengembangan zona integritas				108,000,000
4.02.87.01	Penerapan zona integritas pada SKPD	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2 2 perangkat daerah	smd	108,000,000
4.02.96	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				166,500,000
4.02.96.01	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90 90%	smd	166,500,000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				583,000,000
4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan	37 37 perangkat daerah	smd	583,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan				2,119,500,000
4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan pemprov dan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	13 13 laporan	smd	341,500,000
4.02.98.03	Pemeriksaan kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	46 46 laporan	smd	1,778,000,000
4.02.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN				657,000,000
4.02.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	20 20 pengaduan	smd	237,000,000
4.02.99.03	Pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	4 4 kegiatan	smd	420,000,000
4.03	Perencanaan				29,667,729,169
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				29,667,729,169
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				29,667,729,169
2.14.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	92 Persen		-
2.14.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 Dokumen	smd	-
2.14.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	25 IGT	smd	-
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100 Persen		6,343,490,000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	6,343,490,000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		2,741,784,700
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	559,150,000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	2,182,634,700
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 Persen		4,635,425,300
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 Bulan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	2,835,425,300
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	smd	1,800,000,000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 Persen		207,400,000
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	129,000,000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen		
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	78,400,000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	90 Persen		2,100,000,000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	smd	759,800,000
		Jumlah Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau	1 Laporan		

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	smd	670,000,000
		Jumlah laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Laporan		
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	smd	670,200,000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75 Persen		2,949,760,000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRRA dan LKPJ	3 Dokumen	smd	2,145,760,000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 Laporan	smd	804,000,000
		Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen		
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	90 Persen		2,184,000,000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	smd	551,300,000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	smd	583,400,000
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
		Jumlah RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 Laporan		
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	smd	1,049,300,000
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	1 Laporan		
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	1 Laporan		
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	1 Laporan		
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	100 Persen		2,606,800,000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	smd, luarPrv	1,109,500,000
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4 Laporan	smd, luarPrv	1,049,900,000
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	smd	447,400,000
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100 Persen		5,899,069,169
4.03.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	2 Dokumen	smd	885,000,000
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	1 Dokumen	smd	1,858,669,169
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan	3 Forum	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Provinsi	RKPD yang dilakukan			1,105,000,000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 Dokumen	smd	170,000,000
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 Tahap	smd	681,400,000
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 Dokumen	smd	1,199,000,000
4.04	Keuangan				65,545,612,000
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				37,868,292,000
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah				37,868,292,000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		18,257,588,000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kantor yang terlayani	45 unit	smd	18,257,588,000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		8,256,145,000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8 Jenis	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3,873,819,000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11 Jenis	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	4,382,326,000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		3,181,167,000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	40 Koordinasi / Konsultasi	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3,000,000,000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 PNS	smd	181,167,000
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase capaian Kinerja Instansi Pemerintah	100%		305,100,000
4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	186,300,000
4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen / Laporan	smd	118,800,000
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	100%		1,032,000,000
4.04.30.02	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	smd	673,200,000
		Jumlah sistem informasi pendapatan dikembangkan	2 Sistem Informasi		
4.04.30.03	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	3 Kajian	smd	358,800,000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%		2,832,280,000
4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60000000000 Rupiah	smd	334,500,000
4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	802000000000 Rupiah	smd	1,564,080,000
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	575000000000 Rupiah		
4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	1715000000000 Rupiah	smd	933,700,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	7350000000 Rupiah		
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	209475000000 Rupiah		
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%		1,045,400,000
4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	20901090000 Rupiah	smd	315,600,000
4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	244897640000 Rupiah	smd	275,000,000
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	571233541000 Rupiah		
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	9335897000 Rupiah		
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	2148010000000 Rupiah	smd	454,800,000
		Jumlah realisasi DAU	642101957000 Rupiah		
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	100 Dokumen		517,200,000
4.04.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3 Jenis Pendapatan	smd	298,200,000
4.04.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5 Dokumen Peraturan	smd	219,000,000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	100%		2,441,412,000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	23250000000 Rupiah	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	867,480,000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	1921000000000 Rupiah	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1,573,932,000
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				27,677,320,000
4.04.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				27,677,320,000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5,240,700,000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	5279100000 bulan	smd	5,240,700,000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,326,050,000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	954650000 bulan	smd	993,050,000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	333000000 bulan	smd	333,000,000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				100,000,000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	100000000 bulan	smd	100,000,000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				12,955,740,000
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	300000000 bulan	smd	300,000,000
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata	1595000000	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	daerah tentang APBD	kelola BMD yang berkualitas	bulan		1,595,000,000
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1510100000 bulan	smd	1,510,100,000
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	403880000 bulan	smd	403,880,000
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	436800000 bulan	smd	436,800,000
4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	414720000 bulan	smd	414,720,000
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	661800000 bulan	smd	661,800,000
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	463880000 bulan	smd	463,880,000
4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1345280000 bulan	smd	1,345,280,000
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	533,280,000
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	150000000 bulan	smd	150,000,000
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	766800000 bulan	smd	766,800,000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1656800000 bulan	smd	1,656,800,000
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	510,500,000
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 bulan	smd	376,000,000
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 bulan	smd	705,500,000
4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	50 bulan	smd	195,400,000
4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	9 bulan	smd	930,000,000
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				1,950,210,000
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	555000000 bulan	smd	555,000,000
4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	340,000,000
4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 bulan	smd	200,000,000
4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	210000000 bulan	smd	210,000,000
4.04.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 bulan	smd	248,000,000
4.04.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 bulan	smd	397,210,000
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah				6,104,620,000
4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 bulan	smd	4,600,020,000
4.04.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 bulan	smd	935,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	5 bulan	smd	569,600,000
4.05	Kepegawaian				12,227,600,000
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				9,227,600,000
4.05.01.01	Badan Kepegawaian Daerah				9,227,600,000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	12 bulan		1,768,727,000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1,768,727,000
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	30 unit		938,000,000
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor	1 unit	smd	338,000,000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	smd	600,000,000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	30 kegiatan		1,010,300,000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92 kegiatan	smd	800,000,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan		
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dilingkungan BKD Prov. Kaltim	5 PNS	smd	210,300,000
		Jumlah Pakaian Dinas	69 Stel		
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kinerja Instansi Pemerintah (nilai laporan kinerja)	100 skor		149,823,000
4.05.10.01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 dokumen	smd	36,823,000
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6 dokumen	smd	113,000,000
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur	1 laporan		2,540,750,000
4.05.47.01	Ujian Dinas	Jumlah PNS Pemprov. Kaltim yang mengikuti Ujian Dinas Tk. I	50 Orang	smd	98,000,000
4.05.47.02	Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang diterbitkan	120 SK	smd	2,442,750,000
4.06.45	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi SKPD	30 Orang		200,000,000
4.06.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim	155 Orang	smd	200,000,000
4.06.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur	1 laporan		2,620,000,000
4.06.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah laporan penyusunan formasi pegawai	2 laporan	smd	300,000,000
4.06.47.03	Penempatan PNS	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi	300 SK	smd	85,000,000
4.06.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu	1300 SK	smd	200,000,000
4.06.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	3 Aplikasi	smd	150,000,000
4.06.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan	300 Orang	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun			150,000,000
4.06.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I	10 PNS	smd	200,000,000
4.06.47.24	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah rekomendasi permasalahan kepegawaian	10 rekomendasi	bpn, smd	300,000,000
4.06.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98%	smd	50,000,000
4.06.47.32	Pemberhentian PNS	Jumlah Pegawai yang Pensiun	255 PNS	smd	100,000,000
4.06.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup	99%	smd	85,000,000
4.06.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terukur dan terpetakan kemampuannya	200 PNS	smd	200,000,000
4.06.47.35	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah Peremajaan Data PNS	11570 PNS	bpn, smd	150,000,000
4.06.47.37	Pengembangan Karir Pegawai	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	114 PNS	smd	500,000,000
4.06.47.38	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing, Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, dan Promosi	150 PNS	smd	150,000,000
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3,000,000,000
4.05.02.01	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3,000,000,000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				277,250,000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 12 Bulan	smd	277,250,000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				560,500,000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 10 Kegiatan	smd	466,000,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15 15 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 12 Bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	3 3 Kegiatan	smd	94,500,000
4.01.41	Program Kegiatan KORPRI				787,900,000
4.01.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Terlaksananya kegiatan Olahraga Seni dan Budaya anggota KORPRI	5 5 Kegiatan	smd	502,650,000
4.01.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI	1 1 Paket	smd	234,250,000
4.01.41.08	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Terlaksananya Musyawarah, Rakerja, Rakor DP KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	5 5 Kegiatan	smd	33,000,000
4.01.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan	1 1 Tahun	smd	18,000,000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,374,350,000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksana administrasi perkantoran	12 12 Bulan	smd	1,374,350,000
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				6,350,650,000
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber				

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Daya Manusia				6,350,650,000
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6,350,650,000
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12%		3,906,250,000
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3,906,250,000
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	0%		449,500,000
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	smd	48,000,000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	401,500,000
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				892,000,000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	smd	842,000,000
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	50 Kegiatan		
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Dalam dan Luar Daerah	50 Kegiatan	smd	50,000,000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				125,500,000
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	65,500,000
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	60,000,000
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan				358,500,000
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	100,000,000
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	158,500,000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/Kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	2 Dokumen	smd	100,000,000
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis				294,550,000
4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0 Orang	smd	102,050,000
4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	0 Orang	smd	90,500,000
4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	90 Orang	smd	102,000,000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				324,350,000
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Kepemimpinan dan CPNS yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Prajabatan	150 Orang	smd	100,000,000
4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang	4 Kegiatan	smd	

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Daerah dan Jabatan Tinggi	Lulus/Menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi			124,350,000
4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Lulus/Menyelesaikan Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	0 Orang	smd	100,000,000
4.07	Penelitian dan Pengembangan				3,753,100,000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				3,753,100,000
4.07.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				3,753,100,000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	100%		1,268,370,000
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1,268,370,000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor Balitbangda Prov. Kaltim	100%		499,350,000
4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 Bulan	smd	499,350,000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	125 Kegiatan		741,960,000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	84 kegiatan	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr, luarPrv	741,960,000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	41 Kegiatan		
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	34 Dokumen		146,120,000
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	ktm, bpn, smd, luarPrv	124,620,000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	24 laporan	bpn, smd	21,500,000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	100%		134,050,000
4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	80%	smd	42,550,000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana	70 artikel		
4.07.23.03	Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbangan	100%	ktm, bpn, smd	91,500,000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%		356,750,000
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	1 Laporan	btg, bpn, smd, luarPrv	263,250,000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Laporan		
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.41.02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	5 laporan	btg, bpn, kkr, smd, luarPrv	93,500,000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi	Persentase meningkatnya kualitas	100%		270,000,000

BAB VI- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	dan Teknologi	penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi			
4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	1 Laporan	btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, luarPrv	200,000,000
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.47.02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	4 Laporan	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, luarPrv	70,000,000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang sosial da pemerintahan	100%		336,500,000
4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan	1 Laporan	ktm, bpn, kkr, smd, luarPrv	200,000,000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbnag sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 Laporan		
4.07.48.02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan	7 laporan	bru, psr, mah, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarPrv	136,500,000
JUMLAH					3,096,887,498,544

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran

tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2019. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,12	75,00
2.	Rata-rata Lama Sekolah	9,36	10,00
3.	Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,51 6,54
4.	Angka Harapan Hidup (%)	73,70	74,02
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13	2,5 ± 1
6.	Tingkat kemiskinan	6,19	6,12 4,25
7.	Kontribusi sektor industri pengolahan	19,07	21,88
8.	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa	5,3	6,77
9.	Kontribusi sub sektor perkebunan	4,47	4,93
10.	Kontribusi sub sektor kehutanan	1,41	1,55
11.	Kontribusi sektor perikanan	1,63	1,79

BAB VII- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2019
12.	Kontribusi sub sektor peternakan	0,34	0,37
13.	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras	61,52	75,00
14.	Rasio Gini	0,333	0,329
15.	Inflasi	3,15	4 ± 1
16.	Nilai Investasi (Rp)	28,20	53,53
17.	Persentase jalan dalam kondisi baik	35,69	45,00
18.	Panjang jalan dilalui roda 4 (Provinsi)	1.640,07	2000
19.	Rasio elektrifikasi	84,07	90,00
20.	Persentase rumah tangga menurut sumber air bersih dan sumber air minum layak	90,9	91,44
21.	Cakupan layanan telekomunikasi	4	5
22.	IKLH	77,58	80
23.	Tingkat emisi GRK	1.515	3.600
24.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,15	87,50
25.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	77,49 (B+)	
27.	Indeks persepsi korupsi	5,56	6,13

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
1	Jumlah penyelesaian kasus kanrantibmas		
2	Rasio personil satpol PP terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)		
3	Jumlah pos siskamling/desa		
4	Angka Partisipasi Murni SD/MI		
5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI		
6	Angka Partisipasi Murni SMA/MA		
7	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		
8	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB		
9	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB		
10	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB		
11	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB		
12	Angka Partisipasi Murni SDLB/SMPLB		
13	Angka Partisipasi Kasar SDLB/SMPLB		
14	Jumlah prestasi sekolah (SMA, SMK, SLB) dalam 1 tahun		
15	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)		
16	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat		
17	Persentase jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi		
19	Angka Melek Huruf		
22	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih		
25	Angka kematian bayi per 1000 KH		
26	Angka kematian balita per 1000 KH		
27	Angka kematian ibu per 1000 KH		
28	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)		
29	Angka Kesakitan (Morbiditas)		
33	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi		
34	Besaran UMP		
35	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan		

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
38	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif		
39	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif		
48	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif		
49	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum		
57	jumlah wirausaha baru (WUB)		
58	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru		
62	Jumlah produksi perikanan budidaya		
63	Jumlah Produksi Budidaya		
64	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan		
65	Peningkatan produksi daging		
66	Peningkatan produksi telur		
67	Produksi hijauan pakan ternak		
68	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)		
69	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan		
72	Jumlah Produksi Padi (GKG) [Ton]		
73	Jumlah Kawasan Pertanian		
74	Nilai Tukar Petani (NTP)		
75	1. Peningkatan populasi ternak (%) :		
76	- Sapi (%)		
77	- Kerbau (%)		
78	- Kambing (%)		
79	- Babi (%)		
80	- Ayam Buras (%)		
81	2. Service per Conception (S/C)		
82	3. Produksi biogas yang dihasilkan (m ³)		
85	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)		
86	Jumlah sarana dan prasarana pertanian dalam kondisi baik		
88	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah		
93	Pertumbuhan industri olahan		
94	Produktivitas komoditas perkebunan Kelapa sawit		

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
95	Produktivitas komoditas perkebunan karet		
96	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa		
97	Produktivitas komoditas perkebunan kakao		
98	Produktivitas komoditas perkebunan lada		
101	Nilai Realisasi Investasi		
103	Luas kebun sawit (juta Ha)		
105	Pertumbuhan investasi industri		
106	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)		
107	Rasio ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis		
108	Volume usaha kawasan industri (Triliun)		
109	Jumlah UMKM Sektor pariwisata		
110	Jumlah objek wisata unggulan		
111	Jumlah RT miskin yang memiliki Rumah Layak Huni		
112	Kapasitas air baku (l/detik)		
117	Jumlah debit air baku yang dapat dialurkan		
118	Rasio elektrifikasi (%)	-	
122	Persentase desa berlistrik		
123	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi		
124	Penyediaan jalan dengan kapasitas daya mampu diatas 10 ton (%)		
125	Kuantitas komoditas dan penumpang		
126	Tingkat kemantapan jalan (%)		
127	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi baik		
128	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)		
129	Persentase peningkatan penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan pemanfaatan informasi publik		
130	Persentase penyebarluasan informasi kepada masyarakat		
131	Terwujudnya PD sebagai Zona Integritas		
132	Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan KKN		
133	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu /		

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir (2019)
	Pilkada		
134	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kinerja Kantor		
137	Terwujudnya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur		
138	Terlayannya administrasi perkantoran		
139	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		
141	Jumlah KPH		
142	Luas rehabilitasi hutan dan lahan		
143	Persentase penurunan beban pencemaran		
144	Jumlah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca		
145	Kab/Kota yang mengutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		
146	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi		
147	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU		
148	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima		
149	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu		
151	Persentase kapasitas produksi listrik yang dihasilkan dari sumber energi alternatif		
153	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik		
154	Luas genangan banjir (Ha)		
157	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)		

BAB VIII PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, yang dalam RPJPD dokumen RPJMD ini berada pada tahapan keempat. Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya dan merencanakan pembangunan daerah periode bersangkutan dengan berfokus pada tema **“Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”**. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan dalam merealisasikan peningkatan daya saing investasi dan percepatan hilirisasi industri mendapat perhatian khusus melalui perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan selaras dengan kondisi Provinsi Kalimantan Timur saat ini, disebutkan bahwa:

1. Dalam hal daerah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada:
 - ✓ arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program
 - ✓ prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Provinsi;
2. Dalam hal daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2018, penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur perlu melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan seluruh OPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Koordinasi ini akan menjadi mempertajam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga koridor pembangunan dapat diarahkan menuju perwujudan tujuan pembangunan.

Poin penting lainnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung pada tahun 2019 diharapkan mampu untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial antar penduduk maupun antar wilayah; serta
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

Penyusunan dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholder* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah akan terealisasi. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat, maka diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana secara optimal.

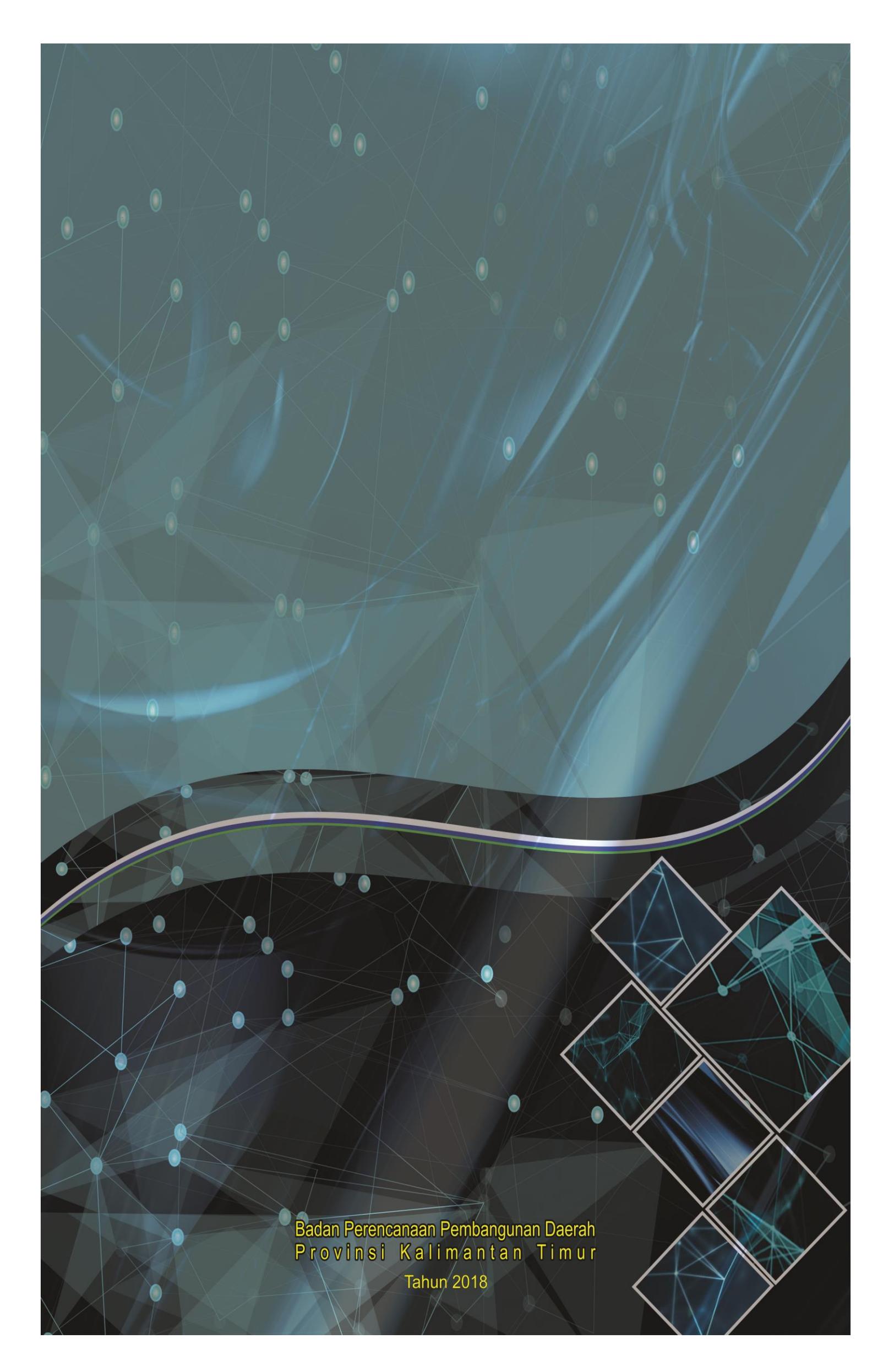
7.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2019 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2018-2023.
2. RKPD tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur).
3. Setiap OPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2019 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 digunakan untuk menyesuaikan (jika ada) kebijakan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan perdanya.
5. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap

kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019.
8. Setiap kepala OPD pada akhir tahun 2019 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018